



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN RISIKO TERHADAP RANTAI PASOK
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI**

TESIS

LULUK PRIAMBUDI

0906578932

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN GAS
JAKARTA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN RISIKO TERHADAP RANTAI PASOK
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik

LULUK PRIAMBUDI

0906578932

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN GAS
JAKARTA
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Luluk Priambudi

NPM : 0906578932

Tanda Tangan :

Tanggal : Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

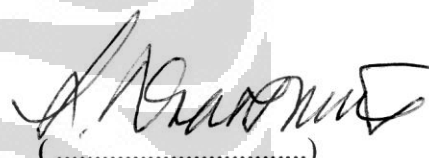
Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Luluk Priambudi
NPM : 0906578932
Program Studi : Teknik Kimia bidang kekhususan Manajemen Gas
Judul Tesis : Manajemen Risiko Terhadap Rantai Pasok Bahan Bakar
Bersubsidi

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Teknik pada Program Studi Teknik Kimia bidang kekhususan Manajemen Gas, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

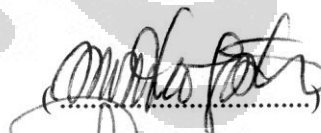
DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Dr.Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA



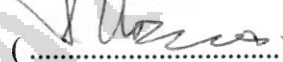
(.....)

Pembimbing 2 : Prof.Dr.Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng



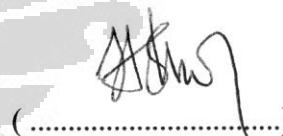
(.....)

Penguji 1 : Prof.Ir. Sutrasno Kartohardjono, M.Sc,
PhD



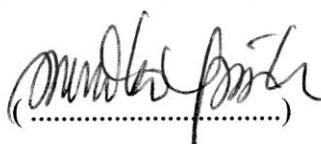
(.....)

Penguji 2 : Dr. Heri Hermansyah, ST, M.Eng



(.....)

Penguji 3 : Prof.Dr.Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt atas terselesaikannya penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Teknik Program Studi Teknik Kimia pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selain itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA dan Bapak Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyisihkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan terhadap penyusunan tesis ini.
2. Seluruh Staf Pengajar Pasca Sarjana Magister Manajemen Gas Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
3. Keluarga tercinta yang telah membantu secara moril dan melalui doa yang tulus.
4. Rekan-rekan Direktorat BBM BPH Migas atas bantuan data dan dukungan Morilnya.
5. Rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan wawasan dalam penyusunan tesis ini, oleh karena itu pada kesempatan ini juga penulis membuka diri akan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca agar dapat memperbaiki penulisan ini dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat kepada para pembaca, dan semoga Allah swt berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Jakarta, Januari 2012

Penulis

Luluk Priambudi

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luluk Priambudi
NPM : 0906578932
Program Studi : Manajemen Gas
Departemen : Teknik Kimia
Fakultas : Teknik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“MANAJEMEN RISIKO TERHADAP RANTAI PASOK
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2012

Yang menyatakan :



(Luluk Priambudi)

ABSTRAK

Nama : Luluk Priambudi
Program Studi : Manajemen Gas
Judul : Manajemen Risiko Terhadap Rantai Pasok Bahan Minyak
Bersubsidi

Upaya-upaya meniasati risiko ekonomi akibat kenaikan harga atau bentuk risiko lainnya bertujuan untuk menjamin kualitas kehidupan ekonomi yaitu kegiatan ekonomi masyarakat luas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM. Indikatif ekonomi tersebut seyogyanya dapat diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan secara berlanjut guna mengurangi dampak kerugian yang timbul akibat aktifitas ekonomi global. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu sistem yang berperan aktif dalam mengendalikan risiko ekonomi atau disebut dengan Manajemen Risiko yang ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang berisikan langkah-langkah antisipatif maupun pengendalian berbagai potensi risiko terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM yang dapat mempengaruhi ekonomi regional. Rekomendasi regional yang dihasilkan oleh manajemen risiko berupa program kegiatan atau langkah-langkah strategis untuk menciptakan kondisi ekonomi masyarakat kearah kondusif dan konstruktif. Keberadaan Manajemen Risiko disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat sebagai bagian proses edukasi dalam penanganan suatu risiko ekonomi secara regional yang dapat diantisipasi sebelum krisis sesungguhnya terjadi. Ini merupakan bagian penting dari tugas komite BPH Migas untuk menjabarkan dalam konteks membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola kebijakan ekonomi regional di era yang penuh ketidakpastian informasi. Peran manajemen risiko tentunya segera dapat mengantisipasi melalui suatu pendekatan berupa rancangan program-program ekonomi untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kondusif dan konstruktif.

Key words : Risiko, Manajemen Risiko, Rekomendasi

ABSTRACT

Name : Luluk Priambudi
Study Program : Gas Management
Title : Risk Management of Subsidized Oil Fuel Supply Chain

The efforts of strategy of economic risk as result of a hike in price or the form of other risk aims to guarantee the quality of the economy life, that is economic activity of public at large in of Oil fuel supply chain. The indicative Economy should be indentified, measured, monitored and controlled continuously to reduce impact of losses due to the global economy activity. Hence it takes the presence of a system wich played the role oc active in the control of the risk of economic or called Risk Management devoted to any recommendations to the Local Government and other Stakeholders which consist of anticipatory steps or controlling of a variety of the potential risk against of Oil Fuel Supply Chain that affect the regional economy. A recommendation that is produced by Risk Management in the form of a program of activity or steps strategic to create the public economy at conducive and constructive condition. The existence of Risk Management of luminance tiers of provincial and District /City is expected to be as part of a process means of education in handling a risk economic regional that can be anticipated before the crisis actually going on. It constitutes the essential part of the duty of BPH Migas committee to detailing in the context of help Local Government in managing the economic policy of regional in the era full of uncertainty information. The role of risk economic programs to create the socio economic diversities a society that conducive and consturctive.

Key words : Risk, Risk Management, Recommendation

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
1. PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Perumusan Masalah	1-2
1.3 Tujuan Penulisan	1-3
1.4 Batasan Penulisan	1-4
1.5 Metodologi Penulisan	1-4
1.6 Sistematika Penulisan	1-5
2. TINJAUAN PUSTAKA	2-1
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2-1
2.2 Penyediaan Jenis BBM Tertentu.....	2-1
2.2.1 Sistem Penyediaan di Wilayah Pulau Sumatera dan Sekitarnya	2-2
2.2.2 Sistem Penyediaan di Wilayah Pulau Kalimantan dan Sekitarnya	2-3
2.2.3 Sistem Penyediaan di Wilayah Pulau Jawa dan Sekitarnya	2-3
2.2.4 Sistem Penyediaan di Wilayah Pulau Papua dan Sekitarnya	2-4
2.2.5 Sistem Penyediaan di Wilayah Bali NTB, NTT dan Sekitarnya	2-5
2.3 Pendistribusian Jenis BBM Tertentu	2-5
2.3.1 Pola Pendistribusian Premium.....	2-7
2.3.2 Pola Pendistribusian Minyak Tanah (Kerosene)	2-8
2.3.3 Pola Pendistribusian Solar.....	2-9
3. METODOLOGI PENELITIAN	3-1
3.1 Diagram Penelitian.....	3-1
3.2 Pendekatan-pendekatan	3-2
3.3 Simulasi dan Interpretasi	3-3
3.4 Penyusunan Rancangan dan Formulasi Model.....	3-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penyediaan BBM wilayah Sumatera dan sekitarnya	4
Gambar 2.2	Sistem Penyediaan BBM di wilayah Kalimantan dan sekitarnya	5
Gambar 2.3	Sistem Penyediaan BBM di wilayah Jawa dan sekitarnya	6
Gambar 2.4	Sistem Penyediaan BBM di wilayah Papua dan sekitarnya	7
Gambar 2.5	Sistem Penyediaan BBM di Wilayah Bali, NTT, NTB & sekitarnya	8
Gambar 2.6	Wilayah Distribusi Niaga (WDN)	15
Gambar 2.7	Fasilitas Kilang dan kapasitasnya di Indonesia	17
Gambar 2.8	Pola Pendistribusian Premium	18
Gambar 2.9	Pola Pendistribusian Minyak Tanah	22
Gambar 2.10	Pola Pendistribusian Solar	24
Gambar 3.1	Diagram Alir Metodologi Penelitian	25
Gambar 3.2	Pendekatan Quantitative Risk Management	26
Gambar 3.3	Matriks Tahapan dalam Analisis Skenario Pengurangan Volume BBM bersubsidi	27
Gambar 3.4	Process Flow Pembuatan Model	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Salah satu amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kewajiban Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran Penyaluran Bahan Bakar Minyak di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban tersebut dicantumkan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) masih merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Tanggung jawab pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan atas Ketersediaan dan Pendistribusian BBM tersebut dilakukan oleh Badan Pengatur. Baik dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tidak menyebutkan jenis BBM yang menjadi kewajiban Pemerintah tersebut, ini berarti BBM yang harus tersedia dan didistribusikan di tengah masyarakat adalah BBM bersubsidi dan BBM Non-subsidi dengan jumlah sesuai dengan kebutuhannya.

Keberadaan BBM bersubsidi di tengah masyarakat dimaksudkan sebagai wujud bantuan Pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu sekaligus bertujuan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, dan sampai saat ini jumlah volume BBM bersubsidi yang terdistribusi masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah volume BBM Non-subsidi. Volume kebutuhan BBM bersubsidi tiap tahunnya menunjukkan kecenderungan terus meningkat dengan akselerasi mengikuti angka pertumbuhan jumlah kendaraan yang fantastis, sementara itu kemampuan Pemerintah dalam menyediakan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibatasi oleh kemampuan keuangan Negara dengan faktor penentu diantaranya harga minyak dunia, nilai tukar Rupiah, dan lainnya. Besaran kuota volume BBM bersubsidi setiap tahunnya ditetapkan bersama antara DPR RI dan Pemerintah yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang APBN. Nampaknya fakta yang ada menunjukkan bahwa DPR RI dan Pemerintah berupaya menekan laju peningkatan kebutuhan BBM Bersubsidi yang ditunjukkan dalam upaya pengurangan volume kuota BBM Nasional setiap tahunnya.

Mata rantai pendistribusian BBM yang selama ini dilakukan meliputi sejak dari titik suplai berupa kilang atau Impor hingga ke titik serah untuk melayani konsumen akhir, dan BBM yang berasal dari Kilang ataupun Impor disimpan di tanki Instalasi atau Terminal

Transit untuk selanjutnya disalurkan ke Depot-depot sebelum ke Titik-titik serah. Moda transportasi pengangkut BBM yang digunakan mulai dari titik suplai ke titik serah dapat berupa kapal tanker, pipa, tongkang, LCT, truk tanki, Kereta Api dan sebagainya yang disesuaikan dengan keadaan geografi setempat. Meskipun telah dilakukan perencanaan penyaluran dan pengawasan namun kegiatan penyaluran BBM dari titik satu ke titik berikutnya sewaktu-waktu berpotensi terjadinya distorsi yang dapat menimbulkan resiko. Distorsi tersebut dapat ditimbulkan oleh faktor internal sistem Rantai Pasok BBM seperti *Emergency Shutdown* Kilang, keterlambatan pasokan minyak mentah. Sedangkan faktor eksternal Sistem Rantai Pasok misalnya faktor Alam yang mengakibatkan keterlambatan pasokan BBM dari Terminal Transit ke Depot. Keadaan yang demikian tentunya berdampak pada kegiatan perekonomian, sektor Usaha dan kegiatan masyarakat lainnya yang aktivitasnya menggunakan BBM.

Salah satu jenis BBM yang beredar di masyarakat adalah Bensin Premium (Gasoline RON 88), baik yang bersubsidi maupun yang Non subsidi). Keberadaan BBM jenis Bensin Premium ini digunakan oleh masyarakat untuk bahan bakar transportasi, baik di darat maupun di air, mesin penggerak di Industri dan untuk Genset. Konsumsi tiap tahunnya memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat dengan akselerasi yang cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan peningkatan aktivitas masyarakat, hal ini dapat diartikan makin meningkatnya kegiatan ekonomi di Indonesia.

1.2 Perumusan Permasalahan

Hingga saat ini BBM merupakan sumber energi yang utama di Indonesia dalam menggerakkan perekonomian, oleh karena itu jika terjadi distorsi pada kegiatan Rantai Pasok energi fosil ini akan berdampak langsung pada kegiatan perekonomian Indonesia. Sayangnya, meskipun ada yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya namun terjadinya distorsi pada rantai pasok BBM tetap saja ada yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti *Emergency Shutdown* Kilang, kondisi alam dan sebagainya. Meskipun selama ini PT Pertamina (Persero) dalam menghadapi kemungkinan terjadinya Distorsi tersebut telah melakukan beberapa langkah pencegahan melalui penyempurnaan sistem pemantauan yang terintegrasi, peningkatan ketahanan stok BBM yang mencakup stok di Kilang, Unit Pemasaran dan dalam proses impor BBM, dan adanya rencana Pemerintah melakukan pengurangan jumlah Kuota volume BBM bersubsidi, namun pemaparan resiko (Risk

Exposed) yang ditimbulkan oleh adanya distorsi pada kegiatan Rantai Pasok BBM akan bertambah juga.

Untuk mengelola resiko yang mungkin timbul akibat adanya distorsi pada kegiatan rantai pasok BBM bersubsidi diperlukan langkah-langkah strategis dan tindakan-tindakan mitigasi, dan untuk menyusun langkah-langkah strategis tersebut diperlukan langkah-langkah yang sistematis dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk Rantai Pasok BBM bersubsidi. Dengan demikian untuk pengelolaan resiko pada rantai pasok BBM jenis Bensin Premium diperlukan manajemen resiko yang menggunakan metodologi yang tepat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang terkandung dalam setiap rantai pasok BBM bersubsidi dalam rangka menyusun rekomendasi berupa langkah-langkah strategis dan mitigasi yang diperlukan untuk mengelola/ meminimalisir resiko yang terjadi pada kegiatan rantai pasok BBM bersubsidi.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengumpulan data serta identifikasi/analisis awal
- Pengumpulan/inventarisasi data dan survey lapangan yang berhubungan dengan preferensi konsumen dan dampak
- Memilih metodologi manajemen resiko yang akan dipakai,
- Pengembangan batas toleransi resiko, sistem deteksi dini dan sistem respon terhadap resiko.
- Penyusunan rekomendasi skenario pengurangan volume BBM bersubsidi dan tindakan mitigasi.

Adapun batasan wilayah terkait dengan tempat dilakukan kegiatan pengumpulan data sekunder dan pelaksanaan survei ke lapangan untuk mencermati dan memperoleh data perilaku konsumen BBM bersubsidi untuk sektor transportasi, usaha kecil, nelayan dan rumah tangga pada beberapa provinsi di Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

Mencermati permasalahan yang ada maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan pendekatan metodologi yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Studi Literatur terkait dengan kegiatan rantai pasok BBM bersubsidi
2. Melakukan Survei lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk tujuan analisis
3. Melakukan Analisis terhadap hasil survei lapangan

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, penulisan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
Bab ini berisikan sekilas mengenai pola Rantai Pasok BBM bersubsidi, tinjauan peraturan perundang-undangan minyak dan gas bumi, dan teori tentang manajemen risiko.
- BAB III METODOLOGI PENELITIAN**
Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian, dari input serta variable yang ada sehingga mendapatkan keluaran yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengelola/ meminimalisir resiko yang terjadi pada kegiatan Rantai Pasok BBM bersubsidi dan adanya upaya pengurangan volume BBM bersubsidi.
- BAB IV PENGUMPULAN DATA AWAL**
Bab ini menjelaskan tentang pengumpulan data awal dan identifikasi masalah serta deskripsi survei data lapangan
- BAB V PEMBAHASAN**
Pada Bab ini dilakukan Pengembangan Batas Toleransi Risiko, Pengembangan sistem respon risiko, Batas Toleransi Risiko, dan sistem deteksi dini
- BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**
Pada Bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan berupa Kesimpulan dan saran yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPH Migas

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merupakan Institusi yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan Pengaturan dan Pengawasan terhadap kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM serta kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Badan ini hadir sebagai konsekuensi logis dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, dan pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 serta ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 2002. Fungsi Badan ini adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Kegiatan Rantai Pasok (penyediaan dan pendistribusian) Jenis BBM Tertentu dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat Penugasan oleh BPH Migas, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2009 pemilihan Badan Usaha Pelaksana Penugasan Rantai Pasok Jenis BBM Tertentu dilaksanakan melalui mekanisme Lelang dan Penunjukan langsung.

2.2 Penyediaan Jenis BBM Tertentu (BBM bersubsidi)

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (BBM bersubsidi) menurut Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan Jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu. Bahan Bakar yang termasuk dalam jenis tersebut meliputi Bensin Premium, Minyak Tanah, dan Minyak Solar, ketiga jenis Bahan Bakar Minyak tersebut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas sebagai sumber energi untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, oleh karena itu Pemerintah masih memberikan subsidi pada ketiga jenis BBM tersebut.

Titik penyediaan awal BBM bersumber dari kilang dalam negeri yang memiliki kapasitas terbatas untuk memproduksi BBM, dan pada kenyataannya kebutuhan volume BBM subsidi jenis premium lebih besar dari kapasitas produksi kilang dalam negeri,

sehingga untuk memenuhi kekurangannya dilakukan dengan cara mengimpor BBM jenis Premium.

Pada peta di bawah ini menggambarkan sistem penyediaan BBM saat ini dalam skala nasional yang dipilah berdasarkan jalur dan jangkauan distribusinya.

2.2.1 Sistem Penyediaan di Wilayah Pulau Sumatera dan Sekitarnya

Penyediaan BBM di wilayah pulau Sumatera dan sekitarnya bersumber dari kilang Dumai dan kilang Plaju, kedua kilang tersebut dimiliki oleh badan usaha PT. Pertamina. BBM tersebut didistribusikan ke depot dan atau terminal transit yang berada di Medan, Sumatera Barat, Pekanbaru, Bengkulu, Tanjung Uban, Pontianak, Lampung, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang dan lainnya.



Gambar 2 - 1 Sistem Penyediaan BBM wilayah Sumatera dan sekitarnya

2.2.2 Sistem Penyediaan di Wilayah Pulau Kalimantan dan Sekitarnya

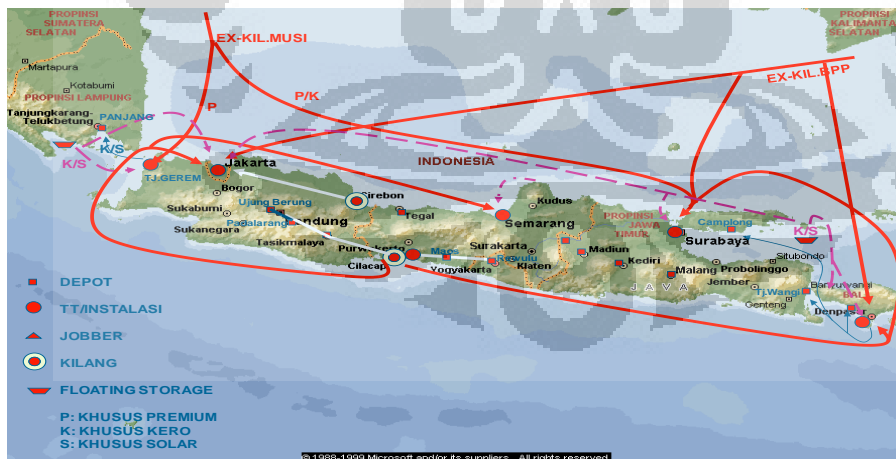
Penyediaan BBM di wilayah pulau Kalimantan dan sekitarnya bersumber dari kilang Balikpapan dan kilang Plaju, kedua kilang tersebut dimiliki oleh badan usaha PT. Pertamina (Persero). Selanjutnya sebagian BBM tersebut didistribusikan ke depot-depot dan atau terminal transit yang berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan sebagian di distribusikan ke pulau Jawa dan Bali. BBM yang berasal dari Kilang Balikpapan sebagian di distribusikan ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, sedangkan Kalimantan Barat berasal dari Kilang Plaju.



Gambar 2 - 2 Sistem Penyediaan BBM di wilayah Kalimantan dan sekitarnya

2.2.3 Sistem Penyediaan di Wilayah Pulau Jawa dan Sekitarnya

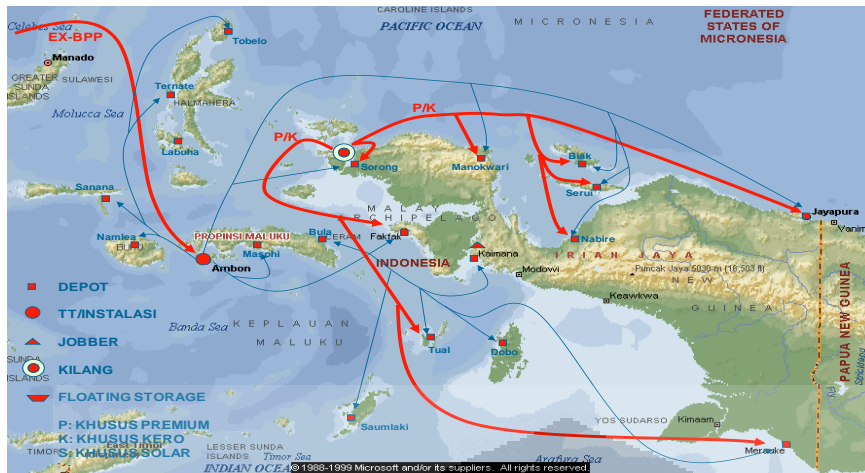
Penyediaan BBM di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya bersumber dari 4 kilang domestik yakni kilang Plaju / Musi, kilang Cilacap, kilang Balongan dan kilang Balikpapan, dan BBM yang berasal dari kilang-kilang tersebut didistribusikan ke depot dan atau terminal transit yang berada di Jakarta, Tanjung Gerem, Padalarang, Bandung, Yogyakarta, Tegal, Semarang, Madiun, Kediri, Surabaya dan lainnya.



Gambar 2 - 3 Sistem Penyediaan BBM di wilayah Jawa dan sekitarnya

2.2.4. Sistem Penyediaan di Wilayah Pulau Papua dan Sekitarnya

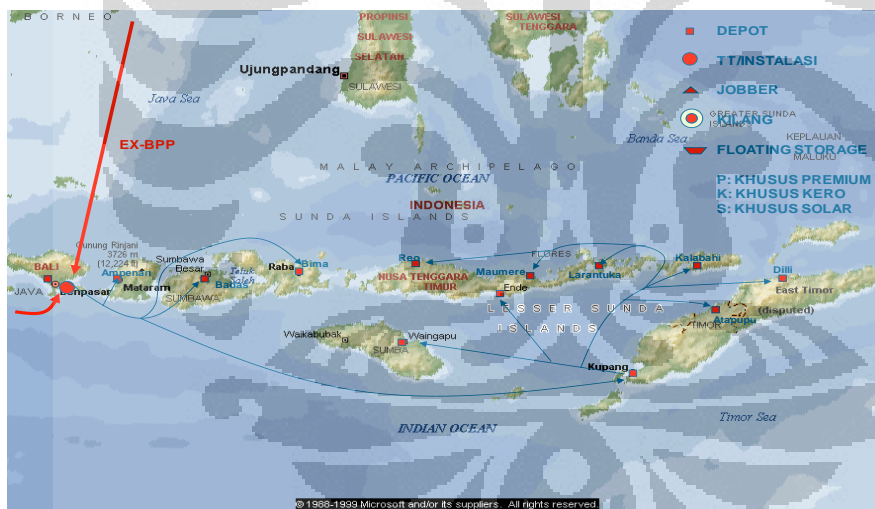
Penyediaan BBM di wilayah pulau Papua dan sekitarnya bersumber dari kilang Balikpapan, kilang tersebut dimiliki oleh badan usaha PT. Pertamina. BBM tersebut didistribusikan ke depot dan atau terminal transit yang melayani kawasan Ambon, Sorong, Fakfak, Merauke, Manokwari dan lainnya.



Gambar 2 - 4 Sistem Penyediaan BBM di wilayah Papua dan sekitarnya

2.2.5 Sistem Penyediaan di Wilayah Bali, NTB, NTT, dan Sekitarnya

Penyediaan BBM di wilayah pulau Bali, NTT, NTB dan sekitarnya bersumber dari kilang Balikpapan, dan BBM yang berasal dari kilang tersebut didistribusikan ke depot dan atau terminal transit yang melayani kawasan Bali, Mataram, Kupang, Larantuka, Atambua dan lainnya.



Gambar 2 - 5 Peta Sistem Penyediaan BBM di wilayah Bali, NTT, NTB & sekitarnya

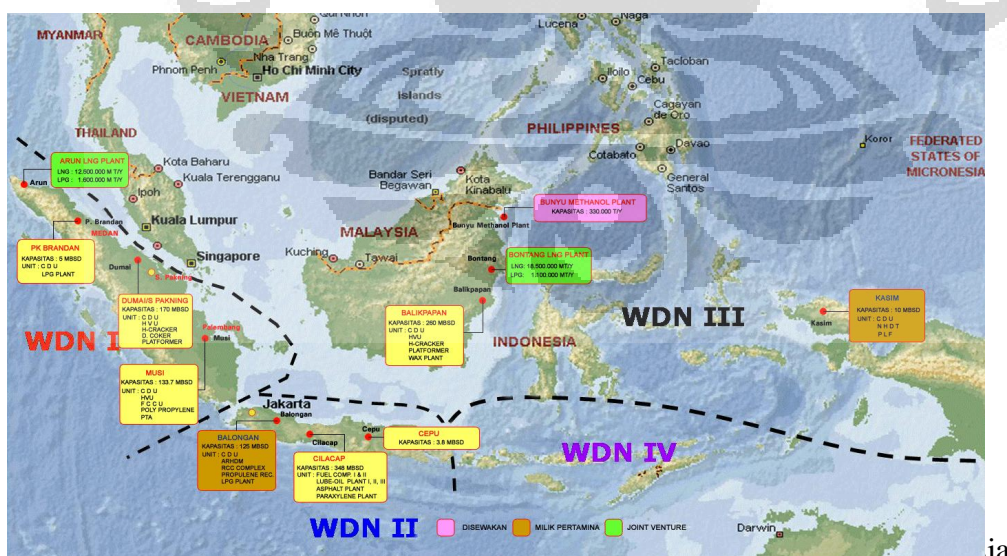
2.3. Pendistribusian Jenis BBM Tertentu

Dalam kajian manajemen risiko terhadap Rantai Pasok BBM dan upaya pengurangan volume BBM bersubsidi, perlu diketahui secara pasti pola Rantai Pasok BBM khususnya BBM bersubsidi untuk mengetahui peta risiko yang mungkin timbul dan menganalisa dampak tertentu yang diakibatkan dari sistem eksisting. Sejalan dengan itu, hal yang menjadi fokus utama berkenaan dengan hasil kajian ini ialah terjaminnya pasokan dan kepastian tepat sasaran BBM bersubsidi, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap

besaran volume BBM yang akan disubsidi oleh pemerintah. Ketepatan sasaran distribusi kepada pengguna BBM sangat dipengaruhi adanya celah potensi penyelewengan distribusi BBM di lapangan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM bersubsidi) BPH Migas menetapkan Wilayah Indonesia menjadi empat Wilayah Distribusi Niaga (WDN), keempat Wilayah Distribusi Niaga tersebut adalah :

- WDN I : meliputi Pulau Sumatera dan sekitarnya
- WDN II : meliputi Pulau Jawa, Bali dan sekitarnya
- WDN III : meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
- WDN IV : meliputi Pulau-pulau pada NTB dan NTT

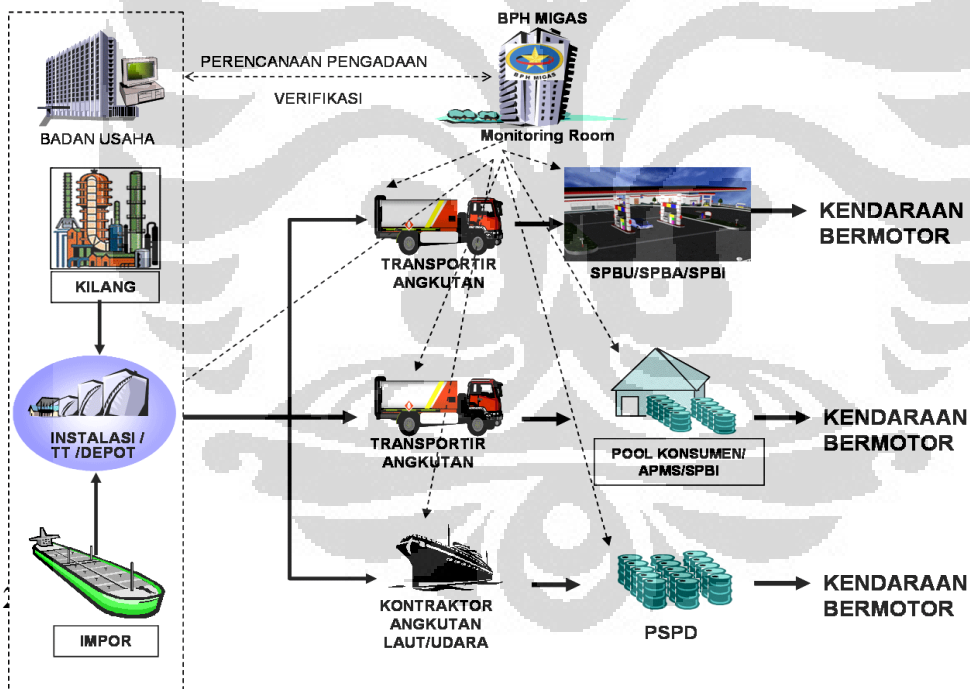


2.3.1 Pola Pendistribusian Premium

Pola distribusi untuk BBM jenis Premium mempunyai kaitan erat dengan sistem penyediaannya, penyediaan yang dimaksud adalah sistem persediaan Premium yang ada di depot, pengangkutan truk tanki dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), APMS dan *retail point* lain yang sejenisnya. Produk BBM ini berasal dari :

- Kilang dalam negeri : pemrosesan minyak mentah dalam kilang menjadi produk Premium.
- Impor : Impor minyak tanah dilakukan bila terjadi indikasi kekurangan ketersediaan produk Premium di Indonesia.

Penyediaan Premium oleh badan usaha diklasifikasikan sebagai Premium bersubsidi (public service obligation / PSO) yang peruntukannya hanya untuk sektor penggunaan transportasi.



n minyak tanah,

penyediaan yang dimaksud adalah sistem persediaan minyak tanah bersubsidi yang ada di depot, pengangkutan truk tanki dan pangkalan minyak tanah. Produk BBM ini berasal dari:

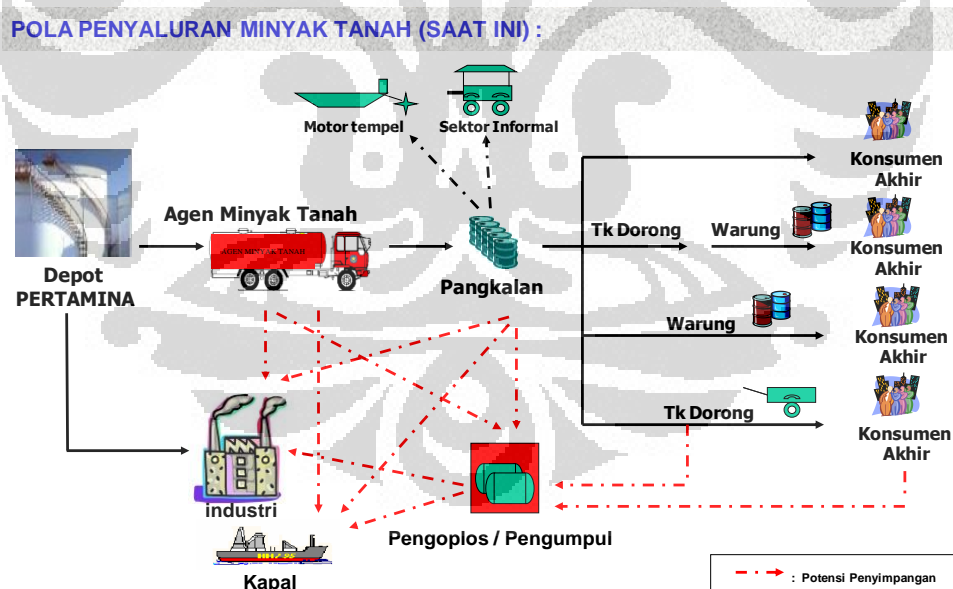
Kilang dalam negeri : pemrosesan minyak mentah dalam kilang menjadi produk minyak tanah.

Penyediaan minyak tanah oleh Pertamina diklasifikasikan menjadi minyak tanah bersubsidi dan minyak tanah non subsidi. Minyak tanah bersubsidi hanya diperuntukan

bagi masyarakat yaitu rumah tangga, usaha kecil dan industri kecil. Minyak tanah non subsidi diperuntukan bagi konsumen sektor industri (komersial).

PT. Pertamina mendapatkan penugasan (Public Service Obligation,PSO) dari pemerintah untuk menyediakan minyak tanah bersubsidi sesuai dengan ketentuan besaran kuotanya. Jaminan ketersediaan minyak tanah bersubsidi bergantung pada stok di depot, APMT, transportir di darat & laut serta di pangkalan (termasuk pengecer). Saat ini ketersediaan BBM khususnya minyak tanah bersubsidi bisa terpantau penuh pada penyediaan di depot, sedangkan di tingkat APMT, pengangkutan dan pangkalan (termasuk pengecer) agak sulit diketahui secara mudah dan cepat. Hal ini menyebabkan potensi kelangkaan minyak tanah di tingkat mata rantai APMT hingga pangkalan.sulit untuk diantisipasi.

Agen Penyalur Minyak Tanah (APMT) melakukan penyediaan dengan cara mendistribusikan minyak tanah bersubsidi ke pangkalan-pangkalan sesuai wilayah pendistribusian yang ditetapkan. Penyerahan minyak tanah bersubsidi dari tempat penyediaan (depot) milik Pertamina kepada APMT direkam dalam sistem komputerisasi Pertamina dengan cara mencatat dokumen Paktur Nota Bon Penjualan (PNBP).



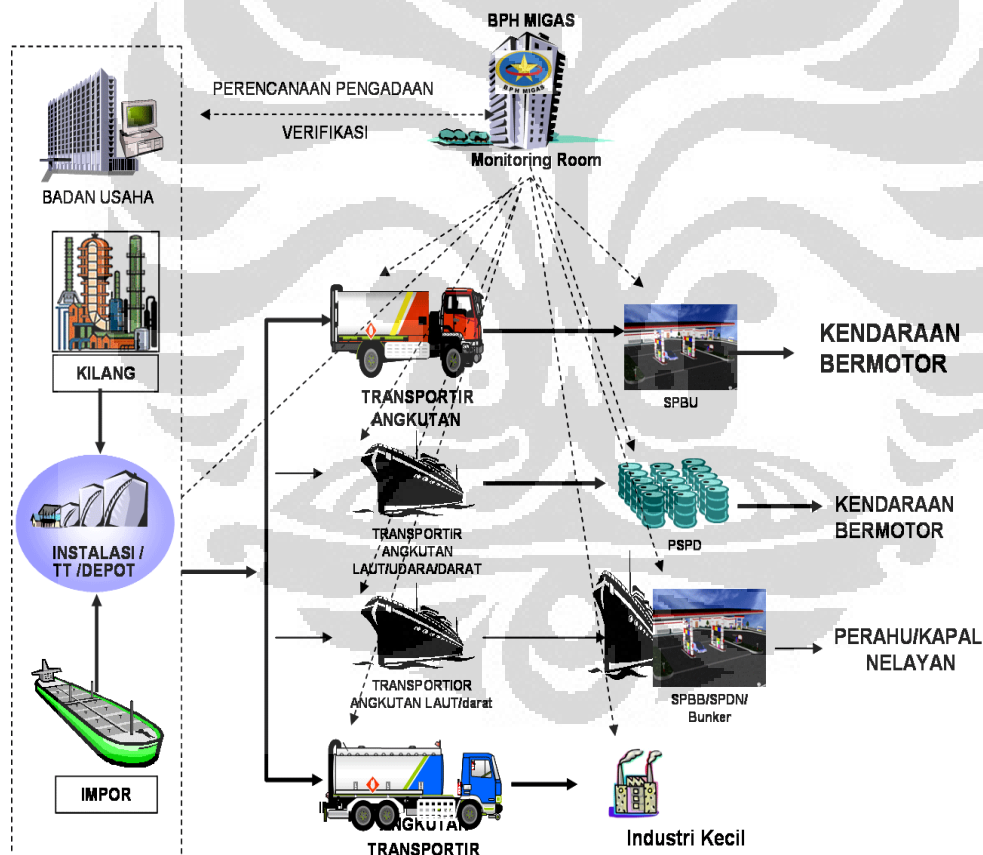
Gambar 2 - 9 Pola Pendistribusian Minyak Tanah

2.3.3. Pola Pendistribusian Solar

Pola distribusi untuk BBM jenis solar berhubungan erat dengan persediaan Solar yang ada di depot, pengangkutan truk tanki dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan *retail* lain sejenisnya. Produk BBM ini berasal dari :

Kilang dalam negeri : Pemrosesan minyak mentah dalam kilang menjadi produk Solar.

Penyediaan solar oleh badan usaha diklasifikasikan sebagai solar bersubsidi (public service obligation / PSO) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 untuk sektor penggunaan Transportasi, Usaha Kecil, dan Usaha Perikanan, sedangkan untuk sektor lainnya seperti Industri, pertambangan dan kegiatan komersial lainnya harus menggunakan solar yang tidak disubsidi..



Gambar 2 - 10 Pola Pendistribusian Solar

2.4. Karakteristik Tiap Wilayah

Berikut ini gambaran karakteristik untuk masing-masing wilayah :

2.4.1 Sumatera Utara



Kondisi Pemerintahan

Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.

Tabel 1 - 1 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1	Kab. Asahan	18	Kab. Pakpak Bharat
2	Kab. Batubara	19	Kab. Samosir
3	Kab. Dairi	20	Kab. Serdang Badagai
4	Kab. Deli Serdang	21	Kab. Simalungun
5	Kab. Humbang Hasudutan	22	Kab. Tapanuli Selatan
6	Kab. Karo	23	Kab. Tapanuli Tengah
7	Kab. Labuhanbatu	24	Kab. Tapanuli Utara
8	Kab. Labuhanbatu Selatan	25	Kab. Toba Samosir
9	Kab. Labuhanbatu Utara	26	Kota Binjai
10	Kab. Langkat	27	Kota Gunung Sitoli
11	Kab. Mandailing Natal	28	Kota Medan
12	Kab. Nias	29	Kota Padang Sidempuan
13	Kab. Nias Barat	30	Kota Pematang Siantar
14	Kab. Nias Selatan	31	Kota Sibolga
15	Kab. Nias Utara	32	Kota Tanjung Balai
16	Kab. Padang Lawas	33	Kota Tebing Tinggi

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, berbatasan dengan Aceh di sebelah utara dan dengan Sumatera Barat serta Riau di sebelah selatan.

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena infrastruktur (jalan raya, fasilitas umum, pasar, sekolah dan sebagainya) yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya.

Di daerah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini ada beberapa dataran tinggi yang merupakan kantong-kantong konsentrasi penduduk.

Pesisir barat biasa dikenal sebagai daerah Tapanuli. Dengan dimekarkannya kembali Kabupaten Tapanuli Selatan, maka provinsi ini memiliki kabupaten baru, yaitu Kabupaten Padang Lawas yang beribukota di Sibuhuan dengan dasar hukum UURI No. 38/2007 dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang beribukota di Gunung Tua dengan dasar hukum UURI No. 37/2007 terdapat 419 pulau di propinsi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah Pulau Simuk (kepulauan Nias), dan Pulau Berhala di selat Malaka.

Kepulauan Nias terdiri dari Pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli. Pulau Nias diwacanakan akan dimekarkan kembali yaitu dengan membentuk Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli.

Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibulasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Kabupaten Telo di pulau Sibulasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias.

Pulau-pulau lain di Sumatera Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatera setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950. Provinsi Sumatera Utara dibentuk meliputi sebagian Aceh. Tahun 1956, Aceh dipisahkan menjadi Daerah Otonom dari Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km².

Sumatra Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

Pesisir timur

Pegunungan Bukit Barisan

Pesisir barat

Kepulauan Nias.

Kepulauan Batu.

Pulau Samosir di danau Toba

Demografi

Sumatera Utara merupakan provinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) Tahun 1990 penduduk Sumatera Utara menurut Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah kurang lebih 12.972.000 juta jiwa, dan pada tahun 2002, jumlah penduduk Sumatera Utara adalah seramai 14.220.000 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 165 jiwa per km², sedangkan kadar peningkatan pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun.

Kadar Partisipasi Angkatan Kerja (KPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tidak tetap. Pada tahun 2000 KPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

Agama

Agama di Sumatra Utara adalah:

Islam, terutama dipeluk oleh suku Melayu, suku Mandailing, suku Jawa

Kristen (Protestan dan Katolik), terutama dipeluk oleh suku Batak dan suku Nias

Hindu, terutama dipeluk oleh keturunan India yang minoritas di perkotaan

Buddha, terutama dipeluk oleh suku Tionghoa di perkotaan

Konghucu, terutama dipeluk oleh suku Tionghoa di perkotaan

Parmalim, dipeluk oleh sebagian suku Batak yang berpusat di Huta Tinggi

2.4.2 Kepulauan Riau



Kondisi Pemerintahan

Berikut daftar [kabupaten](#) dan/atau [kota](#) di wilayah Provinsi [Kepulauan Riau](#) :

Tabel 1 - 2 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

NO	KABUPATEN/KOTA
1	KAB. BINTAN
2	KAB. KARIMUN
3	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
4	KAB. LINGGA
5	KAB. NATUNA
6	KOTA BATAM
7	KOTA TANJUNG PINANG

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251,810,71 km dengan 96

persennya adalah perairan dengan 1350 pulau besar dan kecil telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis dan terpadat pada tingkat internasional, serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar.

Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan. Pada beberapa daerah di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah diupayakan sebagai *pilot project* pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura.

Demografi

Jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau sekitar 1.200.000 jiwa dan secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km², di mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat.

Penerapan kebijakan KEK di Batam-Bintan-Karimun, merupakan bentuk kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan partisipasi dunia usaha. KEK ini nantinya merupakan simpul-simpul dari pusat kegiatan ekonomi unggulan, yang didukung baik fasilitas pelayanan prima maupun kapasitas prasarana yang berdaya saing internasional. Setiap pelaku usaha yang berlokasi di dalamnya, akan memperoleh pelayanan dan fasilitas yang mutunya dapat bersaing dengan praktik-praktik terbaik dari kawasan sejenis di Asia-Pasifik.

2.4.3 Sumatera Selatan



Gambar 1 - 4 Peta Provinsi Sumatera Selatan

Kondisi Pemerintahan

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten / Kota tersebut sebagai berikut :

Tabel 1 - 3 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA
1	K AB. BANYUASIN
2	K AB. EMPAT LAWANG
3	K AB. LAHAT
4	K AB. MUARA ENIM
5	K AB. MUSI BANYUASIN
6	K AB. MUSI RAWAS
7	K AB. OGAN ILIR
8	K AB. OGAN KOMERING ILIR
9	K AB. OGAN KOMERING ULU
10	K AB. OGAN KOMERING ULU SELATAN
11	K AB. OGAN KOMERING ULU TIMUR
12	K OTA LUBUK LINGGAU

13	K OTA	PAGAR ALAM
14	K OTA	PALEMBANG
15	K OTA	PRABUMULIH

Kondisi Geografis

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang. Secara geografis provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan, dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selain itu ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena sempat menjadi ibu kota dari Kerajaan Sriwijaya.

Sumatera Selatan terletak antar 1-4 derajat LS dan 102-104 derajat BT. Wilayahnya berbatasan dengan Prop. Jambi di sebelah utara, Prop. Lampung di sebelah Selatan, Prop. Bangka Belitung di sebelah Timur dan Prop. Bengkulu di sebelah Barat. Sumatera Selatan mempunyai luas wilayah 87.017 Km²(8.701.742 Ha). terdiri dari 11 kabupaten dan 4 Kota.

Di samping itu, provinsi ini banyak memiliki tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau, Kota Pagaralam, dll. Karena sejak dahulu telah menjadi pusat perdagangan, secara tidak langsung ikut mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Makanan khas dari provinsi ini sangat beragam seperti pempek, model, tekwan, pindang patin, pindang tulang, sambal jajok, berengkes, dan tempoyak.

Demografi

Jumlah desa di Sumatera Selatan sebanyak 343. Dan jumlah kecamatan sebanyak 149 buah. Dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat setiap aparat pemerintahan Sumatera Selatan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Agama

Jumlah agama yang ada meliputi 5 agama yaitu : Islam, Khatolik, Kristen, Budha dan Hindu. Pada Sensus penduduk tahun 2000 persentase pengikut agama Islam sebesar 96,23

persen, Budha 1,56 persen, Khatolik 1,32 persen, Kristen 1,20 persen dan Hindu 0,91 persen.

Hubungan sosial terutama di dasarkan kepada semangat kebangsaan, walaupun dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, seperti dalam bercakap-cakap atau cara bicara yang sopan. Pada umumnya penduduk Sumatera Selatan sangat hormat kepada para tamu dan pengunjung yang berasal dari daerah lain. Gaya hidup mereka sangat dipengaruhi oleh era modernisasi. Sebagian besar penduduk sangat terbuka dalam perilaku mereka terutama dengan aspek positif serta menyambut baik reformasi dan inovasi terutama yang berkaitan dengan konsep pembangunan.

2.4.4 Lampung



Gambar 1 - 5 Peta Provinsi Lampung

Kondisi Pemerintahan

Berikut daftar kabupaten dan/atau kota di Lampung

Provinsi Lampung berdiri sejak tanggal 13 Februari 1964 berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1954 dengan ibukota di Bandar Lampung. Provinsi Lampung memiliki Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan samudera, dan empat dermaga sungai yaitu Pelabuhan Menggala, Pelabuhan Teladas, Pelabuhan Wiralaga dan Pelabuhan Sindang. Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa.

Tabel 1 - 4 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA
1	K AB. LAMPUNG BARAT
2	K AB. LAMPUNG SELATAN
3	K AB. LAMPUNG TENGAH
4	K AB. LAMPUNG TIMUR
5	K AB. LAMPUNG UTARA
6	K AB. MESUJI
7	K AB. PESAWARAN
8	K AB. PRINGSEWU
9	K AB. TANGGAMUS
10	K AB. TULANG BAWANG
11	K AB. TULANG BAWANG BARAT
12	K AB. WAY KANAN
13	K OTA BANDAR LAMPUNG
14	K OTA METRO

Kondisi Geografis

Daerah ini berbatasan dengan keadaan geografis dan iklim sebagai berikut :

Provinsi Lampung berada antara 3°45' dan 6° Lintang Selatan serta 105°45' dan 103°48' Bujur Timur; di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan dengan Selat Sunda Sunda dan di sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Dengan posisi yang demikian, Provinsi Lampung menjadi penghubung utama lalu-lintas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa maupun se-baliknyanya. Luas wilayahnya mencapai 35.376,50 km, sedikit lebih besar dari pada luas Provinsi Jawa Tengah atau 1,75% seluruh wilayah Indonesia.

Demografi

Berdasarkan hasil sensus tahun 2000, Jumlah penduduk daerah ini sebesar 6.654.354 jiwa. Provinsi Lampung merupakan daerah beriklim tropis, dengan ciri-ciri cukup panas dan banyak turun hujan. Musim kemarau berlangsung antara Mei -September dan musim hujan antara Nopember - Mei. Angka hujan rata-rata tahunan mencapai 2.000 - 3.000 mm, bahkan di bagian barat mencapai 3.000 - 4.000 mm/tahun sedang di bagian timur Lampung Selatan 1.000 - 2.000 mm/tahun. Pada daerah ketinggian 30 - 60 m suhu rata-rata berkisar antara 26° C - 28° C. Suhu maksimum 33° C dan suhu minimum 22° C. Rata-rata kelembaban udara antara 80% - 88% dan pada daerah yang lebih tinggi kelembaban juga akan lebih tinggi.

Dengan luas ± 3.528.835 ha, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan. Provinsi ini memiliki lahan sawah irigasi teknis seluas 103.245 ha, sawah, irigasi setengah teknis 24.164 ha, dan lahan sawah irigasi non teknis seluas 244.008 ha. Total saluran irigasi mencapai 371.417 km. Sawah-sawah inilah yang pada tahun 2006 menghasilkan 2.129.914 ton padi (gabah kering giling/GKG), terdiri atas 1.959.426 ton padi sawah dan 170.488 ton padi ladang. Dibanding dua tahun terakhir, produktivitas padi yang dicapai meningkat. Pada tahun 2004, produksi padi mencapai 2.091.996 ton sementara pada 2005 mencapai 2.124.144 ton, Semua itu belum termasuk produksi ubi kayu rotan 2006 mencapai lebih dari 5.473.283 ton, dan produksi jagung 1.183.982 ton. Dengan demikian ketahanan pangan di provinsi ini cukup kuat.

Kawasan hutan mencapai 1.004.735 ha atau sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata/taman

nasional 462.030 ha; hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap 91.732 ha. Dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, produksi kehutanan kini lebih diarahkan kepada hasil hutan non kayu dan potensi ekowisatanya. Hasil hutan pada 2006 berupa kayu bulat sebanyak 3.4121.171 m³, kayu gergajian 145.732,25 m³ dan kayu lapis 82.714.45 m³, Sedangkan produksi hasil hutan non kayu berupa damar mata kucing sebanyak 5.454,17 ribu ton, damar batu 1.351,30 ton, arang 30.347 rotan manau 3.000 batang, dan rotan lilin 1.293,24 ton.

Dari laut dan sungainya yang besar pada tahun 2006 Lampung menikmati hasil tangkapan laut hingga 133.503,4 ton, sedangkan tangkapan perairan umum mencapai 10.345,4 ton. Produksi budidaya tambaknya mencapai 164.264,8 ton, budidaya air tawar mencapai 17.448,9 ton dan hasil budidaya laut sebanyak 1.569,7 ton.

Daerah berlahan kering yang mencapai 89,88% dari total luas provinsi adalah tempat yang sangat cocok untuk mengembangkan sapi potong. Dengan potensi ini, Lampung memiliki perusahaan penggemukan sapi potong (*feedlotter*) terbesar di Indonesia dengan total populasi sapi potong mencapai 428 ribu ekor atau sama dengan 60% dari total populasi sapi potong nasional di *feedlotter*. Provinsi ini juga dikenal sebagai penghasil jagung, ubi kayu, dan dedak halus sebagai bahan baku pembuat konsentrat yang sangat dibutuhkan oleh ternak. Dengan dukungan potensi bahan baku ini, Lampung mampu menghasilkan produksi 23 juta ekor ayam potong pada tahun 2006, meningkat dibandingkan dengan produksi tahun 2005 yang mencapai 21 juta ekor ayam potong.

Perekonomian di Provinsi Lampung juga sangat didukung oleh produksi perkebunan seperti kopi, lada, karet, kelapa, dan tebu. Produksi kopi pada tahun 2006 mencapai 143.050 ton, produksi kakao 22.976 ton, lalu diikuti produksi kelapa dalam lebih dari 112.631 ton, lada 24.011 ton, karet 54.461 ton, kelapa sawit 367.840 ton, dan tebu 693.613 ton. Dari hasil produksi tebu itu Lampung memberi kontribusi 35% dari total produksi gula nasional, meningkat dibanding kontribusi 2005 yang mencapai 20%.

Keanekaragaman sumberdaya mineral di provinsi itu meliputi mineral logam, bahan galian industri, bahan galian energi, dan bahan galian konstruksi. Pada tahun 2006, dari galian industrinya berhasil diproduksi 1.980.000.000 m³ andesit, 389.000.000 m³ felspar dan 590.000.000 m³ granit dengan mutu terjamin. Untuk cadangan zeolit sebesar 2.145.000 m³ dengan cadangan yang diprediksi sebesar 8.000.000 m³, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, Bahan galian logam yang ada di provinsi ini meliputi emas, mangaan, bijih besi dan pasir besi, namun baru sebagian saja dari potensi ini yang

telah dikelola. Sekarang sumberdaya energi terbaru berupa panas bumi, air, serta bahan bakar nabati (BBN) yang berasal dari tebu, singkong, sawit, dan tanaman jarak tengah dikembangkan, Saat ini Provinsi Lampung memiliki pabrik etanol berbahan tebu terbesar di Indonesia.

Potensi energi seperti panas bumi yang berlokasi di daerah Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, mencapai 400 MW. Di Suoh, Kabupaten Lampung Barat, potensi tersebut mencapai 300 MW. Semua potensi itu telah di eksplorasi oleh Pertamina sebesar 110 MW. Potensi air untuk pembangkit tenaga listrik juga sangat besar. Pada SWS Way Semangka Upper tersedia kapasitas sebesar 78 MW dan telah dioperasikan melalui PLTA Besai dan PLTA Baru Tegi. Pada SWS *Way Semangka Lower* dan *Way Semung* masing-masing tersedia potensi sebesar 76 MW dan 2,6 MW.

Sumber: Indonesia Tanah Airku (2007)

2.4.5 Jawa Timur



Gambar 1 - 6 Peta Provinsi Jawa Timur

Kondisi Pemerintahan

Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.

Tabel 1 - 5 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur

N O	KABUPATEN/KOTA	N O	KABUPATEN/KOTA
1	K BANGKALAN	2	K PASURUAN

	AB.	0	AB.
2	K BANYUWAN AB. GI	2 1	K AB. PONOROGO
3	K AB. BLITAR	2 2	K AB. O PROBOLINGG
4	K BOJONEGOR AB. O	2 3	K AB. SAMPANG
5	K BONDOWOS AB. O	2 4	K AB. SIDOARJO
6	K AB. GRESIK	2 5	K AB. SITUBONDO
7	K AB. JEMBER	2 6	K AB. SUMENEP
8	K AB. JOMBANG	2 7	K AB. K TRENGGALE
9	K AB. KEDIRI	2 8	K AB. TUBAN
10	K AB. LAMONGAN	2 9	K AB. NG TULUNGAGU
11	K AB. LUMAJANG	3 0	K OTA BATU
12	K AB. MADIUN	3 1	K OTA BLITAR
13	K AB. MAGETAN	3 2	K OTA KEDIRI
14	K AB. MALANG	3 3	K OTA MADIUN
15	K AB. MOJOKERTO	3 4	K OTA MALANG
16	K AB. NGANJUK	3 5	K OTA MOJOKERTO
17	K AB. NGAWI	3	K PASURUAN

7	AB.	6	OTA
1	K	3	K PROBOLINGG
8	AB. PACITAN	7	OTA I
1	K	3	K
9	AB. PAMEKASAN	8	OTA SURABAYA

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibukotanya adalah Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 37.070.731 jiwa (2005). Jawa Timur merupakan provinsi terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 km. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 km. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 km sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau-pulau, yang paling timur adalah Kepulauan Kangean dan yang paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil: Nusa Barung dan Pulau Sempu.

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah. Dibandingkan dengan wilayah Pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar antara 21-34°C. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah, dan bahkan di daerah Ranu Pani (lereng Gunung Semeru), suhu bisa mencapai minus 4°C, yang menyebabkan turunnya salju lembut.

Demografi

Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2005 adalah 37.070.731 jiwa, dengan kepadatan 774 jiwa/km². Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Malang, sedang kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya. Laju pertumbuhan penduduk adalah 0,59% per tahun (2004).

Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah suku Jawa, namun demikian, etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura mendiami Pulau Madura dan daerah Tapal Kuda (Jawa Timur

bagian timur), terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Di sejumlah kawasan Tapal Kuda, suku Madura bahkan merupakan mayoritas. Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat minoritas suku Madura, umumnya mereka bekerja di sektor informal.

Suku Tengger, konon adalah keturunan pelarian Kerajaan Majapahit, tersebar di Pegunungan Tengger dan sekitarnya. Suku Osing tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Orang Samin tinggal di sebagian pedalaman Kabupaten Bojonegoro.

Selain penduduk asli, Jawa Timur juga merupakan tempat tinggal bagi para pendatang. Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup signifikan dan mayoritas di beberapa tempat, diikuti dengan Arab; mereka umumnya tinggal di daerah perkotaan. Suku Bali juga tinggal di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Dewasa ini banyak ekspatriat tinggal di Jawa Timur, terutama di Surabaya dan sejumlah kawasan industri lainnya.

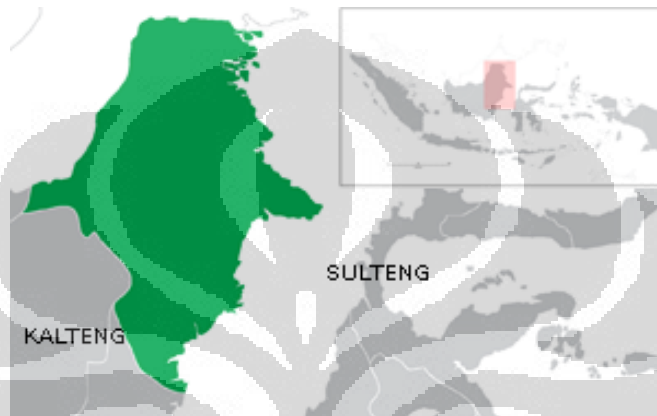
Suku Jawa umumnya menganut agama Islam, sebagian menganut agama Kristen dan Katolik, dan ada pula yang menganut Hindu dan Buddha. Sebagian orang Jawa juga masih memegang teguh kepercayaan Kejawen. Agama Islam sangatlah kuat dalam memberi pengaruh pada Suku Madura. Suku Osing umumnya beragama Islam. Sedangkan Suku Tengger menganut agama Hindu.

Orang Tionghoa umumnya menganut Konghucu, meski ada pula sebagian yang menganut Buddha, Kristen, dan Katolik; bahkan Masjid Cheng Ho di Surabaya dikelola oleh orang Tionghoa dan memiliki arsitektur layaknya kelenteng.

Jawa Timur memiliki sejumlah industri besar, diantaranya galangan pembuatan kapal terbesar di Indonesia PT PAL di Surabaya, industri kereta api PT INKA di Madiun, pabrik kertas (PT Tjiwi Kimia di Tarik-Sidoarjo, PT Lece di Probolinggo), pabrik rokok (Gudang Garam di Kediri, Sampoerna di Surabaya dan Pasuruan, serta Bentoel di Malang). Di Gresik terdapat Semen Gresik dan Petrokimia. Pemerintah telah menetapkan 12 kawasan industri estate, diantaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto, Kawasan Industri Jabon di Kabupaten Sidoarjo, serta Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan. Sentra industri kecil tersebar di seluruh kabupaten/kota, dan beberapa diantaranya telah menembus ekspor; Industri kerajinan kulit berupa tas dan sepatu di Tanggulangin, Sidoarjo adalah salah satu industri kecil yang sangat terkenal.

Blok Cepu, salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, ditambang di Bojonegoro. Pembangkit listrik di Jawa Timur dikelola oleh PT PJB, dimana meliputi PLTA (Ir. Sutami, Selorejo, Bening), PLTU, dan PLTGU, yang menyediakan energi listrik ke sistem Jawa-Bali. Beberapa daerah menikmati pembangkit energi mikrohidro dan energi surya.

2.4.6 Kalimantan Timur



Gambar 1 - 7 Peta Provinsi Jawa Timur

Kondisi Pemerintahan

Berikut daftar kabupaten dan/atau kota di Kalimantan Timur :

Tabel 1 – 4 Kabupaten Kota Kalimantan Timur

NO	KABUPATEN/KOTA
1	KAB. BERAU
2	KAB. BULUNGAN
3	KAB. KUTAI BARAT
4	KAB. KUTAI KERTANEGARA
5	KAB. KUTAI TIMUR
6	KAB. MALINAU
7	KAB. NUNUKAN
8	KAB. PASER
9	KAB. PENAJAM PASER UTARA
10	KAB. TANA TIDUNG
11	KOTA BALIKPAPAN

12	KOTA BONTANG
13	KOTA SAMARINDA
14	KOTA TARAKAN

Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Sebelumnya Kalimantan Timur adalah salah satu karesidenan dari Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi tiga Provinsi, yaitu **Kalimantan Timur**, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Kondisi Geografis

Kalimantan Timur adalah Daerah Tingkat I yang berstatus provinsi di Indonesia. Provinsi ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan dan merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah 245.237,80 km² atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur.

Demografi

Provinsi ini berpenduduk sekitar 2.750.369 jiwa (2004) dan masalah sumber daya alam di sini terutama adalah penebangan hutan ilegal yang memusnahkan hutan hujan, selain itu Taman Nasional Kutai yang berada di Kab. Kutai Timur ini juga dirambah hutannya. Kurang dari setengah hutan hujan yang masih tersisa, seperti Taman Nasional Kayan Mentarang di bagian utara provinsi ini. Pemerintah lokal masih berusaha untuk menghentikan kebiasaan yang merusak ini. Hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Sektor lain yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata, dan industri pengolahan.

Beberapa daerah seperti Balikpapan dan Bontang mulai mengembangkan kawasan industri berbagai bidang demi mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sementara kabupaten-kabupaten di Kaltim kini mulai membuka wilayahnya untuk dibuat perkebunan seperti kelapa sawit, dll.

Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan pariwisata yang menarik seperti Kepulauan Derawan di Berau, Taman Nasional Kayan Mentarang dan Pantai Batu Lamampu di Nunukan, peternakan buaya di Balikpapan, peternakan rusa di Penajam, Kampung Dayak Pampang di Samarinda, Pantai Amal di Kota Tarakan, Pulau Kumala di Tenggarong, dan lain-lain.

Tapi ada kendala dalam menuju tempat-tempat di atas yaitu transportasi. Banyak bagian di provinsi ini masih tidak memiliki jalan aspal, jadi banyak orang berpergian dengan perahu dan pesawat terbang dan tak heran jika di Kalimantan Timur memiliki banyak bandara perintis. Selain itu, akan ada rencana pembuatan *Highway* Balikpapan-Samarinda- Bontang- Sangatta demi memperlancar perekonomian.

Kalimantan Timur memiliki beberapa macam suku bangsa. Selama ini yang dikenal oleh masyarakat luas hanya suku Dayak, padahal selain Dayak ada 1 suku yang juga memegang peranan penting di Kaltim yaitu suku Kutai.

Suku Kutai merupakan suku melayu asli Kalimantan Timur, yang awalnya mendiami wilayah pesisir Kalimantan Timur. Lalu dalam perkembangannya berdiri dua kerajaan Kutai, Kerajaan Kutai Martadipura yang berdiri lebih dulu dengan rajanya Mulawarman, lalu berdiri pula belakangan Kerajaan Kutai Kartanegara yang kemudian menaklukan Kerajaan Kutai Martadipura, dan lalu berubah nama menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Di Kalimantan Timur terdapat juga banyak suku pendatang dari luar, seperti Bugis, Jawa dan Makassar. Bahasa Jawa dan Bahasa Bugis adalah dua dari banyak bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Suku Bugis banyak mendiami Kalimantan, Samarinda, Sangatta dan Bontang. Sedangkan suku Jawa banyak mendiami Samarinda dan Balikpapan.

Agama

Penduduk Kalimantan Timur umumnya menganut agama Budha, Hindu, Islam dan Katolik Kristen. Bahasa-bahasa daerah di Kaltim merupakan bahasa Austronesia dari rumpun Malayo-Polynesia, diantaranya adalah Bahasa Tidung, Bahasa Banjar, Bahasa Berau, dan Bahasa Kutai. Bahasa lainnya adalah Bahasa Lundayeh.

2.4.7 Sulawesi Utara



Gambar 1 - 8 Peta Provinsi Sulawesi Utara

Kondisi Pemerintahan

Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 - 5 Kabupaten / Kota Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA
1	KOTA MANADO
2	KOTA BITUNG
3	KOTA TOMOHON
4	KOTA KOTAMOBAGU
5	KAB. BOLAANG MONGONDOW
6	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
7	KAB. MINAHASA UTARA
8	KAB. MINAHASA TENGGARA
9	KAB. MINAHASA SELATAN
10	KAB. MINAHASA
11	KAB. KEPULAUAN TALAUD
12	KAB. KEPULAUAN SANGIHE
13	KAB. KEPULAUAN SITARO

Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 13 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.199.117 jiwa (2008), Pada tanggal 23 September 1964, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang menetapkan perubahan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dengan menjadikan Sulawesi Utara sebagai Daerah Otonom Tingkat I, dengan Manado sebagai Ibukotanya. Sejak saat itu, secara de facto Daerah Tingkat I Sulawesi Utara membentang dari Utara ke Selatan Barat Daya, dari Pulau Miangas ujung utara di Kabupaten Sangihe Talaud sampai Molosipat di bagian Barat Kabupaten Gorontalo.

Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua provinsi lainnya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Sulawesi Utara terletak pada 0.300-4.300 Lintang Utara (LU) dan 1210-1270 Bujur Timur (BT).

Sebagian besar wilayah dataran Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran. Gunung-gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1000 dari permukaan laut. Beberapa gunung yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu: G. Klabat (1895 m) (wil. Minahasa Utara), G. Lokon (1579 m), G. Mahawu (1331 m) (wilayah Tomohon), G. Soputan (1789 m) (wilayah Minahasa), G. Dua Saudara (1468 m) (wil. Bitung), G. Awu (1784 m), G. Ruang (1245 m), G. Karangetan (1320 m), G. Dalage (1165m) (wil. Sangihe dan Talaud), G. Ambang (1689 m), G. Gambula (1954 m), G. Batu-Balawan (1970) (wil. Bolmong). Dataran rendah dan tinggi secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran yang terdapat di daerah ini antara lain: Tondano (2.850 ha), Langowan (2.381 ha), Modinding (2.350 ha), Tompaso Baru (2.587 ha) di Kabupaten Minahasa, Tarun (265 ha) di Sangihe Talaud, Dumoga (21.100 ha), Ayong (2.700 ha), Sangkub (6.575 ha), Tungoi (8.020 ha), Poigar (2.440 ha), Molibagu (3.260 ha), Bintauna (6.300 ha) di Bolaang Mongondow.

Danau-danau di daerah ini secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi. Danau-danau tersebut adalah Danau Tondano luas 4.278 ha di Kabupaten Minahasa, Danau Moat seluas 617 ha di Kab. Bolaang Mongondow. Pada umumnya sungai sungai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain untuk irigasi juga sebagai sumber tenaga listrik disamping

dimanfaatkan sumber air minum. Sungai-sungai tersebut antara lain, Sungai Tondano (40 km) Sungai Poigar (54,2 km); Sungai Ranoyapo (51,9 km); dan Sungai Talawaan (34,8 km), di Kabupaten Minahasa. Sungai besar lainnya terdapat di daerah Bolaang Mongondow yaitu Sungai Dumoga (87,2 km); Sungai Sangkup (53,6 km), Sungai Ongkaw (42,1 km), dan lainnya.

Sulawesi Utara merupakan salah satu dari 7 Provinsi Kepulauan kepulauan yang terdiri dari 258 Pulau dan 11 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina dan Laut Pasifik.

Demografi

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai penduduk sekitar 2.199.117 jiwa (2008), Dalam perjalanan panjang sampai dengan Tahun 2000, Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 5 Kabupaten dan 3 Kotamadya, yaitu : Kabupaten Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Sangihe dan Talaud, Boalemo serta Kotamadya Manado, Bitung dan Gorontalo. Selanjutnya, seiring dengan Nuansa reformasi dan otonomi daerah, maka telah dilakukan pemekaran wilayah dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui UU No. 38 Tahun 2000. Pada tahun 2002 dan 2003 Provinsi Sulawesi Utara ketambahan Kabupaten Talaud berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2002 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Sangihe dan Talaud. Selanjutnya terbentuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2003 serta Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2003. Ketiga daerah tersebut adalah hasil pemekaran Kabupaten Minahasa.

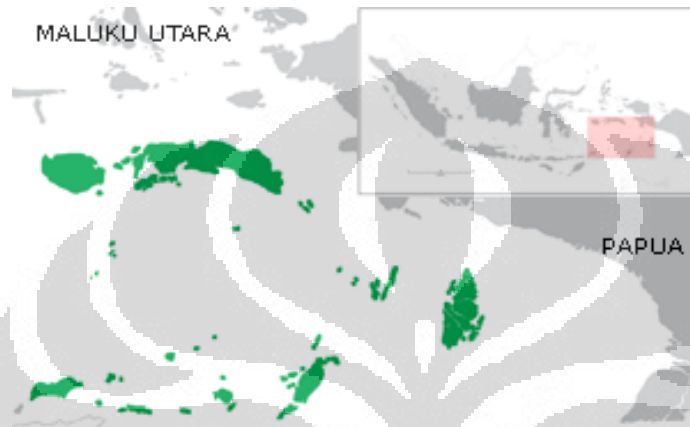
Agama

Penduduk Sulawesi Utara terdiri dari 3 (tiga) kelompok etnis utama, yaitu: Suku Minahasa, Suku Sangihe dan Talaud, Suku Bolaang Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut terbagi pula dalam sub etnis yang memiliki bahasa, tradisi dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse dan Moposad. Dengan demikian, bahasa yang ada di Sulawesi Utara dibagi ke dalam:

- Bahasa Minahasa (Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Ponosakan dan Bantik).
- Bahasa Sangihe Talaud (Sangie Besar, Siau, Talaud).
- Bahasa Bolaang Mongondow (Mongondow, Bolaang, Bintauna, Kaidipang).

Namun demikian Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Agama yang dianut oleh penduduk di Provinsi Sulawesi Utara adalah Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha.

2.4..8 Maluku



Gambar 1 - 9 Peta Provinsi Maluku

Kondisi Pemerintahan

Berikut daftar kabupaten dan/atau kota di Maluku :

Tabel 1- 6 Kabupaten / Kota Maluku

NO	KABUPATEN/KOTA
1	KAB. MALUKU TENGGARA
2	KAB. MALUKU TENGAH
3	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
4	KAB. BURU
5	KAB. ARU
6	KAB. AMBON
7	KAB. SERAM BAGIAN BARAT
8	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR

Maluku adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibukotanya adalah Ambon. Pada tahun 1999, sebagian wilayah Provinsi Maluku dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara, dengan ibukota di Sofifi. Provinsi Maluku terdiri atas gugusan kepulauan yang dikenal dengan Kepulauan Maluku.

Kondisi Geografis

Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 632 pulau besar dan kecil. Pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 Km²) disusul Pulau Buru (9.000 Km²), pulau Yamdena (5.085 Km²) dan Pulau Wetar (3.624 Km²). Pulau-pulau di daerah ini dapat digolongkan atas dua bagian utama yaitu pulau vulkanis dan pulau karang yang terjadi dari pertemuan antara sistem orogenetik dan lingkaran pasifik dengan sistem orogenetik sunda. Di pulau-pulau ini terdapat 4 gunung, 11 danau dan 113 sungai besar dan kecil, dan sekitar 83% desa di provinsi ini berada pada ketinggian 0-100 m dari permukaan laut. Iklim yang terdapat di Kepulauan Maluku adalah iklim Tropis dan iklim Muson, karena daerah Maluku merupakan daerah kepulauan dan dikelilingi oleh lautan yang luas. Dengan demikian iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh lautan yang luas dan berlangsung seirama dengan iklim musim yang terdapat di sini. Provinsi Maluku dengan Ibukota Ambon, terletak diantara 3° Lintang Utara 8.30° Lintang Selatan dan 125° - 135° Bujur Timur dengan batasan sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara
- sebelah selatan berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Australia
- sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah
- sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Irian Jaya

Luas Wilayah Provinsi Maluku 712.479,69 km² yang terdiri dari 54.185km daratan dan 658.294,69km lautan. Tanah dataran tinggi hampir tidak ada. Pegunungan merupakan sebuah punggung yang membentang ditengah-tengah pulau membentuk deretan gunung dengan ketinggian tertinggi 3.055 m. Provinsi Maluku terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil. Ibu kotanya adalah Ambon. Provinsi ini disebut juga dengan "Kepulauan rempah-rempah" karena provinsi ini merupakan penghasil cengkeh dan pala. Penduduk asli Provinsi Maluku adalah orang Ambon. Banyak pula orang-orang dari daerah lainnya yang menetap di Maluku, misalnya orang Jawa dan orang Bugis yang datang ke sana sebagai pedagang.

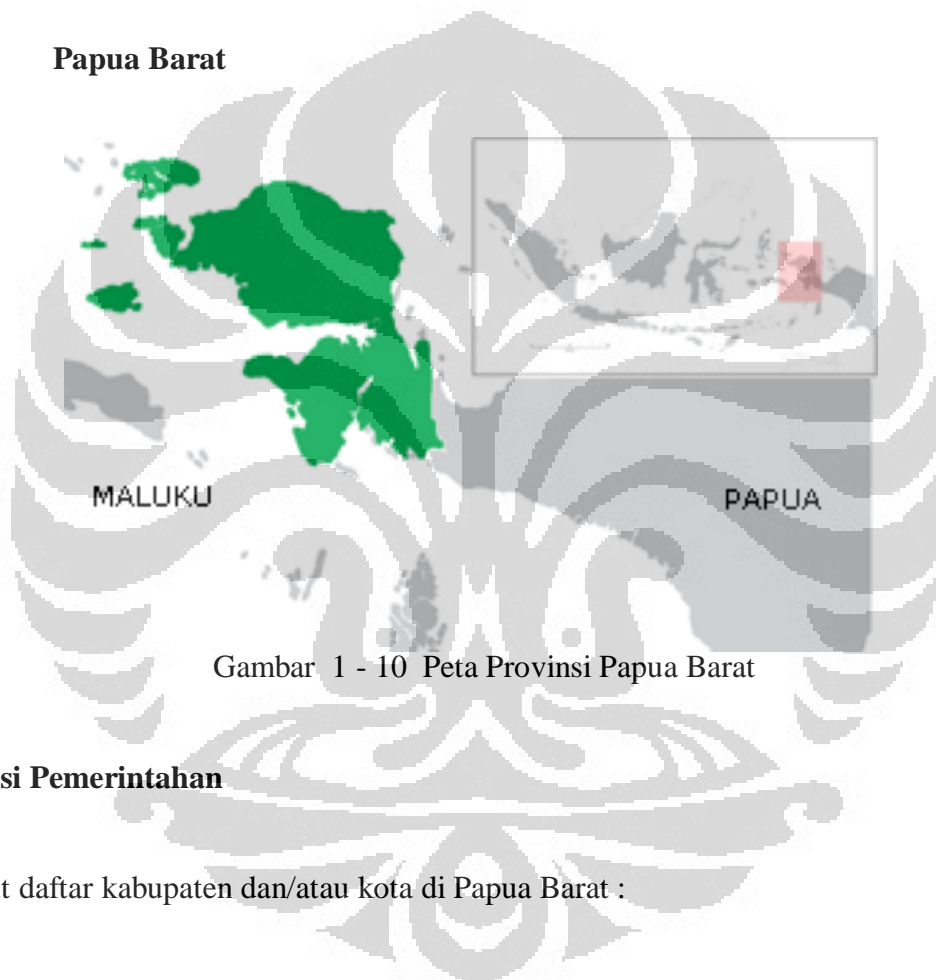
Demografi

Beberapa tahun yang lalu Provinsi Maluku dibagi menjadi dua, yaitu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku Selatan.

Hasil Sensus tahun 2000 jumlah penduduk Provinsi Maluku sebanyak 1.200.000 jiwa. Sebagian besar penduduk daerah ini berdiam di wilayah pedesaan pada tahun 1995 : 75,43 %, umumnya terletak di pesisir pantai sedangkan yang berdiam di daerah perkotaan sekitar 24,57 %.

Penyebaran penduduk tidak merata, dimana konsentrasi penduduk pada umumnya di pulau-pulau kecil seperti Ambon, Kepulauan Lease, Kei Kecil dan sebagian pulau sedang dan besar dapat dikatakan jarang penduduknya.

2.4.9 Papua Barat



Gambar 1 - 10 Peta Provinsi Papua Barat

Kondisi Pemerintahan

Berikut daftar kabupaten dan/atau kota di Papua Barat :

Tabel 1 - 7 Kabupaten / Kota di wilayah Papua Barat

NO	KABUPATEN/KOTA
1	KAB. FAKFAK
2	KAB. KAIMANA
3	KAB. TELUK WONDAMA

4	KAB.	TELUK BINTUNI
5	KAB.	MANOKWARI
6	KAB.	SORONG SELATAN
7	KAB.	SORONG
8	KAB.	RAJA AMPAT
9	KOTA	SORONG

Provinsi Papua Barat beribukota di Kabupaten Manokwari. Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya, yaitu Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kotamadya Sorong. Terdiri dari 124 Kecamatan, 48 Kelurahan, dan 1173 Kampung.

Kondisi Geografis

Letak Geografis Provinsi Papua Barat terletak antara 0 ° - 4 ° Lintang Selatan dan 124 ° - 132 ° Bujur Timur, tepat dibawah garis katulistiwa dengan ketinggian 0 - 100 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Provinsi Papua Barat sebesar 126.093 kilometer persegi.

Batas Utara: Laut Pasifik, Batas Barat: Laut Seram Provinsi Maluku, Batas Selatan: Laut Banda Provinsi Maluku, Batas Timur: Provinsi Papua.

Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten tertinggi dengan ketinggian 10 - 100 meter diatas permukaan laut, sedangkan kota-kota lainnya berkisar antara 10 - 50 meter diatas permukaan laut.

Demografi

Pada tahun 1990 jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 385.509 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 tercatat 571.107 jiwa, dan tahun 2007 telah mencapai 722.981 jiwa.

Penduduk Provinsi Papua Barat memeluk agama yang berbeda-beda, namun kerukunan hidup beragama dapat terjaga dengan baik, hal ini terlihat dari tumbuhnya fasilitas peribadatan bagi semua pemeluk agama dan bertambahnya rohaniawan dari masing-masing agama.

Agama

Data Tahun 2006 menunjukkan bahwa prosentase terbesar pemeluk agama adalah Kristen Protestan (50,70%), kemudian Islam (41,27%), Kristen Katolik (7,70%), Hindu (0,12%),

Budha (0,08%) dan Konghucu (0,01%). Pada Provinsi Papua Barat terdapat kabupaten yang mendapat julukan Kota Injil yaitu Kabupaten Manokwari dimana pertama kali Injil datang ke Tanah Papua di Pulau Mansinam yang merupakan wilayah Kabupaten Manokwari.

2.4.10 Banten



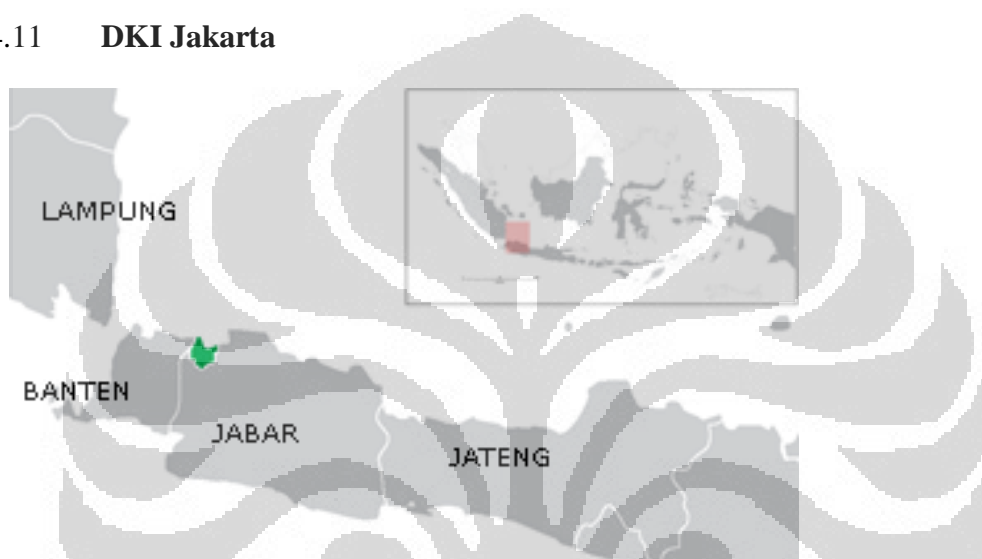
Gambar 1 - 11 Peta Provinsi Banten

Tabel 1 - 8 Profil Provinsi Banten

KABUPATEN	4
KOTA	4
KOORDINAT	5°7'50" - 7°1'11" LS DAN 105°1'11" - 106°12" BT
TANGGAL PENTING	4 OKTOBER 2000 (HARI JADI)
IBUKOTA	KOTA SERANG
GUBERNUR	HJ. RATU ATUT CHOSIYAH
LUAS	9.160,70 KM2
PENDUDUK	9.351.470 JIWA
KEPADATAN	1.020,82/KM2
SUKU	SUNDA, BETAWI, JAWA, TIONGHOA DAN LAMPUNG
AGAMA	ISLAM (96,6%), KRISTEN (1,2%), KATOLIK (1%),

	BUDHA (0,7%)
	HINDU (0,4%)
BAHASA	SUNDA, INDONESIA, BETAWI, BAHASA BANYUMASAN, DAN JAWA
ZONA WAKTU	W I B

2.4.11 DKI Jakarta



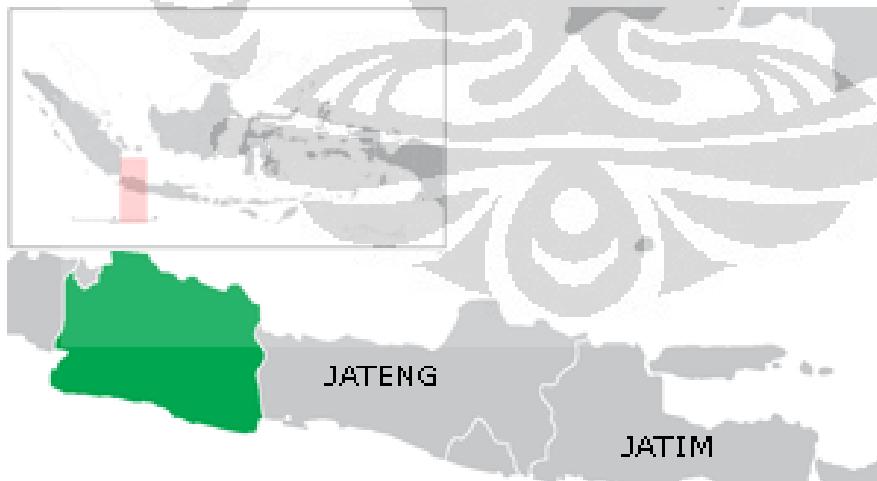
Gambar 1 - 12 Peta Provinsi DKI Jakarta

Tabel 1 - 9 Profil Provinsi DKI Jakarta

KABUPATEN	1
KOTA	5
KECAMATAN	44
KELURAHAN/DES A	267
KOORDINAT	5°19'12" - 6°23'42" LS DAN 106°22'42" - 106°58'18" BT
DASAR HUKUM	UU RI NOMOR 29 TAHUN 2007
TANGGAL PENTING	22 JUNI 1527 (HARI JADI)

	JAKART
IBUKOTA	A
GUBERNUR	FAUZI BOWO
LUAS	740,28 KM2
PENDUDUK	8.792.000 JIWA (2004)
KEPADATAN	16.667/KM2
SUKU	JAWA (35%), MELAYU BETAWI (25%), SUNDA (15%), TIONGHOA (6%), MINANG (3%), BATAK (3%), ACEH (2%)
AGAMA	ISLAM (83%), PROTESTAN (6,2%), KATOLIK (5,7%), BUDHA (3,5 %) HINDU (1,2%)
BAHASA	BAHASA INDONESIA, BAHASA BETAWI, BAHASA JAWA, BAHASA SUNDA, BAHASA INGGRIS
ZONA WAKTU	W I B

2.4.12 Jawa Barat



Gambar 1 - 13 Peta Provinsi Jawa Barat

Tabel 1 - 10 Profil Provinsi Jawa Barat

KABUPATEN	17
KOTA	9
KECAMATAN	558
KELURAHAN/DESA	5.778
IBUKOTA	BANDUNG
GUBERNUR	H. AHMAD HERYAWAN
LUAS	34.816,96 KM2
PENDUDUK	39.140.812 JIWA (2004)
KEPADATAN	1.124,19/KM2 (2004)
SUKU	SUNDA, JAWA DAN HAMPIR SEMUA SUKU BANGSA SE- INDONESIA
AGAMA	ISLAM (96,51%), PROTESTAN (1,24%), KATOLIK (0,70%), BUDHA (0,24%), HINDU (0,10%)
BAHASA	BAHASA SUNDA
ZONA WAKTU	W I B

2.4.13 Jawa Tengah



Gambar 1 - 14 Peta Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1 - 11 Profil Provinsi Jawa Tengah

KABUPATEN	29
KOTA	6
KECAMATAN	534
KOORDINAT	5°40' - 8°30' LS DAN 108°30' - 111°30' BT (TERMASUK PULAU KARIMUNJAWA)
TANGGAL PENTING	15-Agust-50
IBUKOTA	SEMARANG
GUBERNUR	BIBIT WALUYO
LUAS	35.548,20 KM2
PENDUDUK	31.820.000 JIWA (EST.2005)
KEPADATAN	977 JIWA/KM2
SUKU	JAWA (98%), SUNDA (1%), TIONGHOA DAN LAIN-LAIN
AGAMA	ISLAM, PROTESTAN, KATOLIK, HINDU, BUDHA DAN KEJAWEN
BAHASA	BAHASA INDONESIA, BAHASA JAWA, BAHASA SUNDA
ZONA WAKTU	W I B

2.4.14 DI Yogyakarta



Gambar 1 - 15 Peta Provinsi
DI Yogyakarta

Tabel 1 - 11 Profil Provinsi D I Yogyakarta

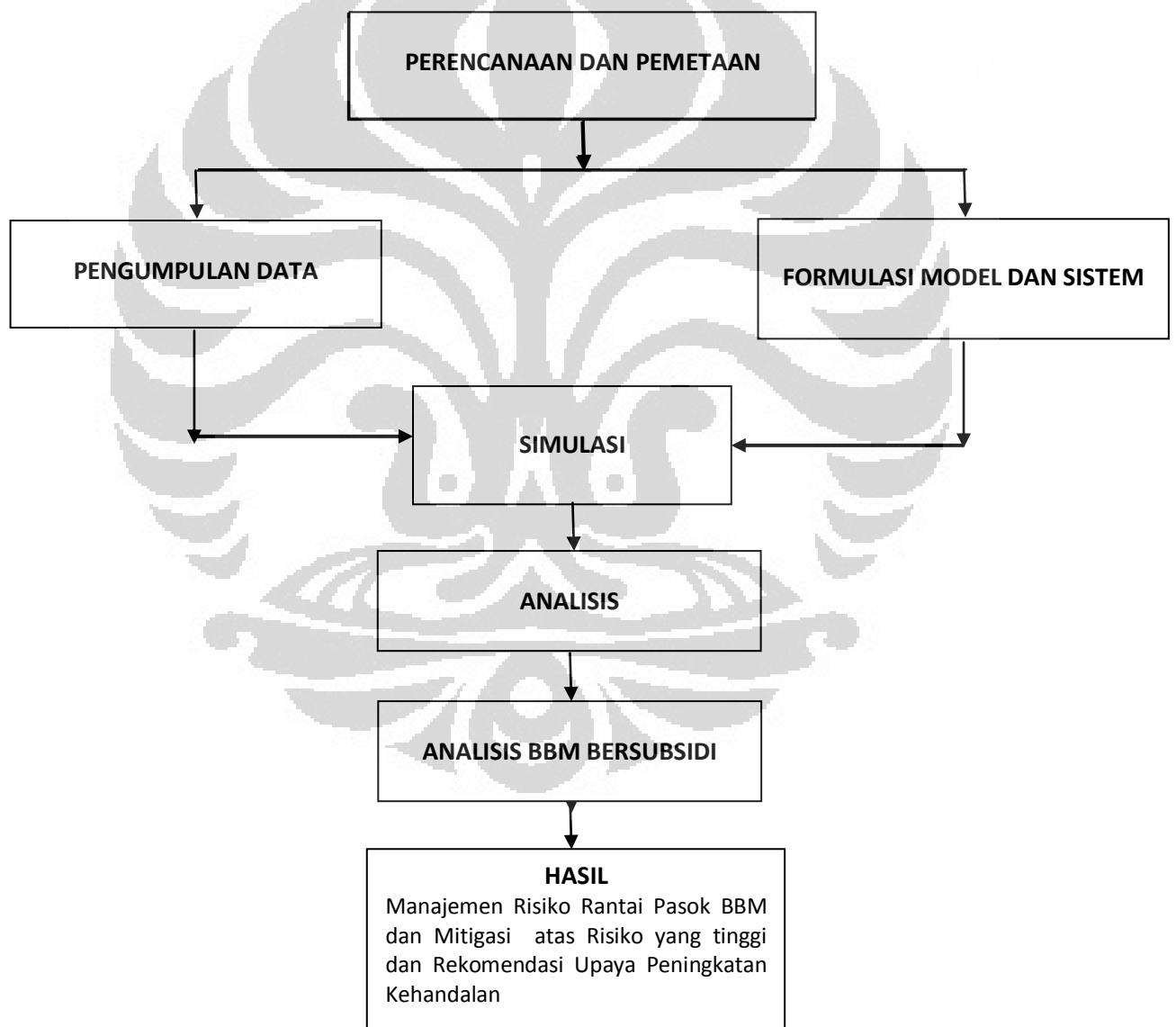
KABUPATEN	4
KOTA	1
KECAMATAN	78
KELURAHAN/DES A	440
KOORDINAT	7-8 LS DAN 110 - 111 BT
DASAR HUKUM	UU NOMOR 3 TAHUN 1950
TANGGAL PENTING	4 MARET 1950
IBUKOTA	YOGYAKARTA
GUBERNUR	SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X
LUAS	3.185,80 KM2
PENDUDUK	4.364.000 (+/-) JIWA
KEPADATAN	13.687 JIWA/KM2
SUKU	JAWA, SUNDA, MELAYU, TIONGHOA, BATAK, MINANG, BALI DAN MADURA
AGAMA	ISLAM (92,1%), KATOLIK (4,9%), PROTESTAN (2,7%), LAIN-LAIN (0,2%)
BAHASA	BAHASA INDONESIA, BAHASA JAWA
ZONA WAKTU	W I B

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Diagram Penelitian

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan pada penelitian ini secara umum digambarkan pada gambar 3.1 di bawah ini :



Gambar 3-1 Diagram Alir Metodologi Penelitian

3.2 Pendekatan-pendekatan

1. Analisis Pareto Law digunakan untuk melakukan pemetaan awal agar pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memberikan hasil yang akurat.
2. Survei untuk mendapatkan data primer dan sekunder, baik secara uji petik ataupun pendapat/penilaian Ahli (FGD, Forum Group Discussion), digunakan untuk memperoleh data yang akan dipakai untuk mendukung analisis dan uji skenario dalam manajemen risiko.
3. Pendekatan Risk Matrix digunakan untuk pengelolaan Risiko Standar Manajemen Risiko Australia dan New Zealand AS/NZS 4360: 2004 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Komunikasi dan Konsultasi

Melakukan Komunikasi dan Konsultasi dengan stakeholder yang tepat, baik internal maupun eksternal, dilakukan pada setiap tahapan dari proses Manajemen Risiko dan proses secara keseluruhan

b. Penetapan Konteks

Melakukan penetapan konteks eksternal, konteks internal dan konteks manajemen risiko dilakukan pada saat proses manajemen risiko akan diterapkan. Selain itu perlu dilakukan juga penyusunan kriteria yang akan digunakan pada saat risiko akan dievaluasi serta pendefinisian struktur analisis.

c. Identifikasi Risiko

Melakukan identifikasi Risiko yang berpotensi akan terjadi, tempatnya, waktu, mengapa dan bagaimana peristiwa dapat mencegah, menurunkan, menunda atau meningkatkan pencapaian tujuan.

d. Analisis Risiko

Melakukan identifikasi dan evaluasi pengendalian yang ada. Menentukan konsekuensi dan kemungkinan serta level Risiko. Analisis ini harus

mempertimbangkan kisaran konsekuensi potensial dan bagaimana Risiko dapat terjadi.

e. Evaluasi Risiko

Melakukan perbandingan estimasi level Risiko dengan kriteria yang telah disusun terlebih dahulu dan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat potensial dan hasil yang menguntungkan. Hasilnya adalah berupa keputusan untuk menentukan luas dan sifat perlakuan Risiko yang diperlukan Risiko yang diperlukan dan menentukan prioritas Risiko.

f. Perlakuan Risiko

Mengembangkan dan melaksanakan strategi tertentu yang efektif dan efisien serta rencana aksi untuk meningkatkan manfaat potensial dan mengurangi biaya potensial.

g. Monitor dan Review

Monitoring terhadap efektivitas seluruh tahapan proses manajemen risiko sangat diperlukan, hal ini sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan. Risiko dan efektivitas perlakuan Risiko perlu dimonitor untuk meyakinkan bahwa perubahan situasi tidak mengubah prioritas Risiko.

3.3 Simulasi dan Interpretasi

Melakukan simulasi dan Interpretasi serta aktivitas lanjutannya yang mencakup sebagai berikut :

- Pemetaan manajemen risiko ketidakmampuan Rantai Pasok BBM bersubsidi
- Melakukan analisis dan interpretasi atas ketidakmampuan Rantai Pasok serta pengurangan volume BBM bersubsidi dan risiko yang akan dihadapi manajemen
- Mitigasi terhadap risiko atas Rantai Pasok serta pengurangan volume BBM bersubsidi

3.4 Penyusunan Rancangan dan Formulasi Model

a. Pemetaan awal

Guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan survei dan analisis sesuai dengan lingkup tanpa mengurangi hasil yang tetap akurat, maka akan digunakan

pendekatan Pareto Law atau hukum 80/20, artinya dengan wilayah yang hanya 20% menerima volume distribusi sebesar 80% dan sebaliknya.

b. Perencanaan Kebutuhan Data

Pada dasarnya kebutuhan data disesuaikan dengan intensitas volume BBM bersubsidi yang mencakup penyediaan dari Kilang dalam negeri maupun Impor, pendistribusian BBM berdasarkan mata rantai distribusinya serta perilaku konsumsi BBM bersubsidi yang merepresentasikan suatu aplikasi yang obyektif dalam lingkup nasional. Data sampling difokuskan pada wilayah-wilayah tambahan selain wilayah yang tercantum dalam lingkup wilayah pada bab terdahulu, hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat merepresentasikan gambaran utuh secara nasional.

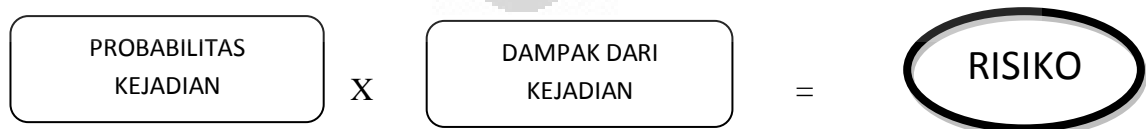
c. Metodologi Analisis dan Pembuatan Sistem/Model

c.1. Analisis kehandalan Rantai Pasok dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap :

- Sistem Logistik penyediaan dan pendistribusian, antara lain karakteristik pasok dan kebutuhan dan jumlah cadangan (stock).
- Kehandalan fisik dan situasi alam setiap rantai Rantai Pasok antara lain Pelabuhan, tanki, tanker, dan sebagainya
- Statistik Rantai Pasok antara lain statistik tiga tahun terakhir kegiatan pasok, permintaan, stok, kejadian kelangkaan BBM.

c.2. Manajemen Risiko

Dalam analisis ini pendekatan manajemen risiko yang digunakan adalah Quantitative Risk Management (QRM) sebagai berikut :



Probabilitas suatu kejadian
(negatif) terjadi

Dampak/akibat suatu
kejadian (negatif)

Risiko

Gambar 3-2 Pendekatan Quantitative Risk Management

3.4 Probabilitas suatu kejadian (Probability of Occurance)

3.4.1 Ketidakhandalan Rantai Pasok

Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketidakhandalan penyediaan dan pendistri-busian BBM antara lain terdiri dari:

- a. Jaringan (*network*) Rantai Pasok BBM.
- b. Kecukupan kesesuaian fasilitas, jumlah, kapasitas, dan kehandalan operasi Infrastruktur; tanker, pelabuhan, pipa, tanki, pompa, dan fasilitas lainnya.
- c. Kecukupan komoditi yang akan disalurkan.
- d. Ketepatan perencanaan/prediksi dari sisi permintaan (*demand*) dan sisi penyediaan & pendistribusian (*supply*) khususnya pada masa *cyclic demand*.
- e. Ketepatan realisasi operasional memenuhi perencanaan yang telah dibuat.
- f. Kondisi alam, jalan, keamanan dan lingkungan.

Ketidakhandalan Rantai Pasok BBM diukur oleh kalkulasi probabilitas ketidakhandalan sesuai tuntutan tingkat pelayanan (*service level*) yang diinginkan. Semakin tinggi probabilitas ketidak-handalan, semakin tinggi pula Probabilitas Kejadian Negatif. Faktor ketidakhandalan mewakili 90% dari Probabilitas Kejadian Negatif, sedangkan *Generic Factor* hanya mewakili 10%.

Probabilitas Ketidak-handalan *)	Skala pada Risk Matrix
98% - 100%	4 - 5
95% - 97%	3 - 4
91% - 94%	2 - 3
85% - 90%	1 - 2
< 85%	0 - 1

*) Skala tersebut di atas akan disesuaikan dengan realisasi kalkulasi, dimana yang tertinggi akan diberikan nilai tertinggi pula dan demikian juga yang terendah.

- Faktor Generik a

dalah faktor-faktor yang *given* yaitu faktor-faktor yang melekat dan kompleks yang tidak mudah untuk diurai. Kinerja tidak akan berubah jika tidak dilakukan perubahan yang mendasar atau terobosan yang mendasar.

2.4.1 Dampak jika sesuatu terjadi (*Consequence of Occurance*).

Jika suatu kejadian dalam hal ini kegagalan dalam Rantai Pasok BBM bersubsidi atau kelangkaan maka sebagai konsekuensinya akan berdampak negatif. Besarnya dampak tergantung dari jenis dampak dan paparan (*exposures*) dari akibat kelangkaan tersebut.

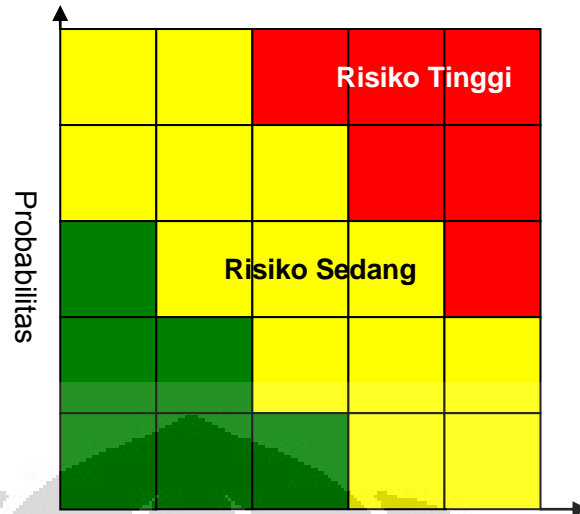
Dalam Rantai Pasok BBM bersubsidi maka besarnya dampak yang terjadi adalah kombinasi jenis dampak dan wilayah paparan atau cluster paparan. Analisis dilakukan oleh kelompok dimana masing-masing ahli dalam bidangnya, terhadap kombinasi unsur-unsur di bawah ini.

<u>Jenis Dampak:</u>	<u>Paparan:</u>
<ul style="list-style-type: none">• Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Cluster/area #1
<ul style="list-style-type: none">• Politik	<ul style="list-style-type: none">• Cluster/area #2
<ul style="list-style-type: none">• Keamanan / Ketahanan	<ul style="list-style-type: none">• Cluster/area #3
<ul style="list-style-type: none">• Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Cluster/area #5

Tabel 3-1 Kombinasi Jenis Dampak dan Wilayah Paparan

Tingkat kekritisannya wilayah akan ditentukan oleh keputusan kelompok para ahli dalam bidangnya. Cluster/Area #1 relatif lebih kritis dibanding dengan Cluster/Area #2 dan seterusnya. Hasil akhir dari analisis ini adalah nilai bobot dampak relatif untuk setiap wilayah.

Tingkat kekritisannya wilayah paparan disusun dengan dibandingkan wilayah satu dengan yang lain dan memberi pembobotan kepada masing-masing wilayah. Wilayah paparan dapat diwakili oleh Wilayah UPMS atau lainnya. Salah satu metode yang akan diterapkan adalah melalui proses Analisis *Hierarchy* dengan formulasi “Probabilitas dari Kejadian” terhadap “Dampak dari Kejadian” maka dapat digambarkan profil risiko dalam Matriks Risiko sebagai berikut:



Gambar 3-3 Metode Proses Analisis Hierarchy

Jika digambarkan titik-titik kombinasi antara Probabilitas Kejadian atau *Likelihood* vs Dampak Kejadian untuk fasilitas tertentu seperti kilang / terminal /depot dan fasilitas pendukungnya yang melayani wilayah tertentu maka mungkin terpapar pada area Risiko Tinggi, Sedang dan Rendah.

Untuk setiap titik paparan pada area Risiko Tinggi akan disusun mitigasi terhadap risiko. Mitigasi bertujuan untuk menurunkan potensi Risiko Tinggi menjadi ke Sedang atau Rendah jika dijalankan sesuai butir-butir dalam mitigasi risiko.

BAB IV

PENGUMPULAN DATA AWAL

Pada Bab ini akan dilakukan pembahasan tentang pengumpulan data awal, hal ini menjadi penting karena data ini yang akan menjadi bahan untuk melakukan analisis, dan kegiatan pengumpulan data sekunder ini termasuk dalam tahapan persiapan. Pengumpulan data sekunder mengacu pada skenario kebutuhan data yang diidentifikasi sebagai data awal yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM. Pada pelaksanaannya, aktivitas pengumpulan data dilaksanakan dengan mengunjungi sumber data seperti Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta beberapa Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian BBM PSO maupun Non PSO.

Sumber data yang disebutkan di atas, diharapkan akan memberikan data seperti yang disebutkan sebagai berikut :

- Data mengenai pola penyediaan dan pendistribusian BBM khususnya yang terkait dengan BBM bersubsidi.
- Data infrastruktur, kemampuan dan kapasitas penyediaan BBM di Kilang (Unit proses), tank storage (tempat penampungan BBM di Kilang), thruput kilang dan pengangkutan BBM.
- Data fasilitas pengangkutan BBM yang dimiliki oleh Badan Usaha.
- Data sarana dan alat transportasi darat serta laut yang terkait dengan penggunaan BBM bersubsidi di wilayah terpilih
- Data mengenai Usaha Kecil pengguna BBM bersubsidi
- Data sektor Rumah Tangga pengguna BBM bersubsidi
- Data yang berhubungan dengan penentuan karakteristik per sektor pengguna
- Data mengenai keterbatasan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi serta intensitas keterbatasan tersebut yang mengakibatkan kelangkaan di suatu wilayah

Data tersebut di atas perlu di analisis terlebih dahulu guna penelusuran mendalam untuk memperoleh formulasi dan rancangan awal model risiko. Selain itu analisa awal

berkenaan dengan data akan menjadi tolok ukur kebutuhan data primer yang akan dikumpulkan dari beberapa sumber data.

4.1 Pengumpulan Data Primer (Lapangan)

Pada tahap pengumpulan data primer, hal awal yang perlu disiapkan adalah menyusun lembar observasi yang akan digunakan untuk menghimpun hasil survey dari obyek-obyek yang mewakili beberapa kategori yang diperlukan dalam melakukan kajian manajemen risiko yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian BBM, dan Data Primer yang dibutuhkan terkonsentrasi antara lain sebagai :

Perilaku Konsumsi BBM

Salah satu survey lapangan guna memperoleh data perilaku konsumsi BBM adalah bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumsi BBM disuatu wilayah tertentu. Data perilaku konsumsi yang akan disurvei berdasarkan kelompok/sektor pengguna yang mengkonsumsi BBM bersubsidi jenis Premium, Kerosene (Minyak Tanah), dan Minyak Solar.

Adapun sektor pengguna BBM bersubsidi yang dimaksud adalah sektor transportasi, rumah tangga, usaha kecil dan Nelayan. Pelaksanaan kajian perilaku pengguna BBM bersubsidi akan di bagikan menjadi tiga, yakni Survey Pola Konsumsi Penggunaan BBM bersubsidi oleh sektor Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan dan Transportasi, Penentuan Jumlah Obyek Survei dan Pembuatan Kuestionair.

4.1.1 Survei Pola Konsumsi Penggunaan BBM oleh Rumah Tangga

- **Sasaran**

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagian Rumah Tangga yang berdomisili di Provinsi terpilih, baik memiliki Kartu Keluarga maupun tidak. Untuk Rumah Tangga yang berpendapatan tinggi ditanyakan pula pola konsumsi penggunaan BBM untuk Mobil Pribadi.

Rumah Tangga terpilih dipisahkan juga kedalam klasifikasi sebagai berikut :

- Rumah Tangga Perkotaan
- Rumah Tangga Daerah Pesisir
- Rumah Tangga Daerah Non Pesisir

Baik Rumah Tangga perkotaan maupun Daerah Pesisir dan Non Pesisir dikelompokan dalam kategori tingkat pendapatan sebagai berikut :

- Pendapatan rendah
- Pendapatan Sedang
- Pendapatan Tinggi

- **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data Rumah Tangga terpilih menggunakan daftar pertanyaan. Pemilihan rumah tangga dilakukan secara purposive smpling dengan rumah tangga terpilih harus mencakup seluruh klasifikasi yang telah dijelaskan di atas, dan untuk rumah tangga berpendapatan tinggi harus yang memiliki mobil pribadi. Pengumpulan data di setiap rumah tangga dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dan responden dengan menggunakan kuestioner terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan individu dalam kuestioner diusahakan bersumber dari individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumah tangga harus dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan kepala rumah tangga, suami atau istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

- **Jumlah Sampel terpilih**

Setiap Provinsi mempunyai sampel terpilih sebesar 24 Rumah Tangga dengan alokasi 2 Rumah Tangga untuk setiap klasifikasi

4.1.2 Survei Pola Konsumsi Penggunaan BBM oleh Usaha Kecil

- **Sasaran**

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagian dari Usaha Kecil/Usaha Rumah Tangga yang berdomisili di Provinsi terpilih, baik formal maupun non formal. Pemilihan Usaha Kecil/Usaha Rumah Tangga dilakukan secara purposive sampling dengan usaha terpilih harus mencakup seluruh klasifikasi yang dijelaskan di bawah. Usaha Kecil/Usaha Rumah Tangga yang dicacah adalah yang menggunakan BBM bersubsidi.

Usaha Kecil/Usaha Rumah Tangga terpilih dipisahkan juga ke dalam klasifikasi sebagai berikut :

- Industri Makanan
- Pedagang Makanan Keliling
- Pedagang Makanan Non Keliling

- **Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data untuk Usaha Kecil/Usaha Rumah Tangga dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dan responden dengan menggunakan kuestioner terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan tentang keterangan usaha harus dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pengelola usaha, bisa Kepala Rumah Tangga, Suami atau Istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

- **Jumlah Sampel Terpilih**

Setiap provinsi mempunyai sampel terpilih sebesar 6 Usaha Kecil/Usaha Rumah Tangga dengan alokasi 2 Rumah Tangga untuk setiap klasifikasi.

4.1.3 Survei Pola Konsumsi Penggunaan BBM oleh Nelayan

- **Sasaran**

Sasaran dari Kegiatan ini adalah sebagian dari Usaha Nelayan yang berdomisili di Provinsi terpilih, baik formal maupun non formal. Pemilihan Usaha Nelayan dilakukan secara purposive sampling dengan usaha terpilih harus mencakup seluruh klasifikasi yang dijelaskan di bawah. Usaha Nelayan yang dicacah adalah yang menggunakan BBM bersubsidi.

Usaha Nelayan terpilih dipisahkan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Nelayan Perahu Tanpa Motor Kategori Perahu Besar
- Nelayan dengan Perahu Motor Tempel
- Nelayan dengan Kapal Motor < 30 GT
- Nelayan dengan Kapal Motor > 30 GT

- **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk Usaha Nelayan dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dan responden dengan menggunakan kuestioner terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan tentang keterangan usaha harus dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pengelola usaha, dapat Kepala Rumah Tangga, Suami atau Istri Kepala Rumah Tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

- **Jumlah Sampel Terpilih**

Setiap Provinsi mempunyai sampel terpilih sebesar 8 usaha Nelayan dengan alokasi 2 Usaha Nelayan untuk setiap klasifikasi.

4.1.4 Survei Pola Konsumsi Pengguna BBM oleh Transportasi

- **Sasaran**

Sasaran dari kegiatan survei ini adalah sebagian dari Perusahaan transportasi darat dan laut serta pemilik mobil pribadi yang berdomisili di provinsi terpilih, baik formal maupun non formal. Khusus pola konsumsi pengguna BBM oleh pemilik mobil pribadi dilakukan melalui pendekatan Rumah Tangga berpendapatan Tinggi.

Untuk pengumpulan data jenis transportasi darat dan laut dibedakan menurut klasifikasi sebagai berikut :

Transportasi Darat

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi

Angkutan Kota

Angkutan Pedesaan

Angkutan Taksi

Angkutan Pariwisata

Angkutan bermotor untuk Barang Umum

Angkutan bermotor untuk Barang Khusus

Transportasi Laut

Angkutan Laut Domestik Umum Liner Untuk Penumpang

Angkutan Laut Domestik Umum Tramper untuk Penumpang

Angkutan Laut Domestik Umum Liner Untuk Barang

Angkutan Laut Domestik Umum Tramper Untuk Barang

Angkutan Laut Domestik Umum Khusus Untuk Wisata

Angkutan Laut Domestik Umum Khusus Untuk Barang

Angkutan Laut Domestik Umum Perintis

Angkutan Laut Domestik Umum Pelayaran Rakyat

- **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk kegiatan transportasi laut dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dan responden dengan menggunakan kuestioner terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan tentang keterangan usaha harus dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pengelola usaha atau anggota perusahaan lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

- **Jumlah Data Terpilih**

Setiap Provinsi mempunyai sampel terpilih sebesar 10 perusahaan / Usaha Transportasi dengan perincian 6 untuk Transportasi Darat dan 4 untuk Transportasi Laut.

4.2 Penyusunan Kuestioner Survei Pola Konsumsi Pengguna BBM

Pertanyaan-pertanyaan pada kuestioner terdiri dari 3 kelompok, yaitu (1) Data (Profil) Responden; (2) Data Faktor Sosial Ekonomi Responden dan (3) Preferensi Risiko Responden serta Data Penjelasan / Detail Pertanyaan Terkait dengan Risiko dan Pengelolaan Risiko Responden.

Data (Profil) Responden digunakan sebagai identitas responden dan deskripsi responden. Oleh karena risiko berhubungan dengan fungsi utilitasnya, maka perlu dihitung tentang utilitas pengguna terhadap kekayaan (*wealth*). Sedangkan *wealth* berhubungan dengan faktor sosial ekonomi pengguna. Dengan demikian akan dihitung faktor-faktor sosial ekonomipengguna yang mempengaruhi utilitas *wealth*, utilitas *wealth* dalam kondisi ketidakpastian didekati dengan nilai CE.

Untuk memperoleh gambaran sikap pengguna dipakai preferensi pengguna terhadap risiko, yaitu apakah penghindar risiko, pengambil risiko atau tidak terpengaruh (netral). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Mean-variance (E,V) Scandizzo dan Dillon, dan model fungsi penduga logaritma.

Pertama, menganalisis preferensi pengguna/konsumen terhadap risiko, dengan menggunakan model (E,V) Scandizzo dan Dillon (1977) yaitu :

$$U(x) = E(x) + \Phi [V(x)]^{1/2} = U(CE)$$

Analisis empirik terhadap kemampuan pengguna dalam mengelola risiko digambarkan oleh pilihan pengguna berdasarkan alternatif kuasi realistik. Pertanyaan diajukan kepada pengguna sehingga diketahui ekivalensi keamanan dari prospek yang berisiko dengan probabilitas tertentu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sikap pengguna terhadap risiko; apakah penghindar risiko, pengambil risiko atau tidak terpengaruh (netral).

Model (E,V) menurut kepustakaan teori utilitas dengan dasar-dasar analisis Mean-variance (E,V) yaitu argumen-argumen nilai tengah (Mean) dan ragam (variance) dari perubah acak pay off dapat diambil sebagai : (1) penduga bagi fungsi utilitas lebih umum, atau (2) transformasi yang memadai bagi suatu fungsi utilitas yang memiliki distribusi dua parameter.

Scandizzo dan Dillon (1977) menguraikan implikasi model (E,V) dengan asumsi bahwa utilitas merupakan fungai linier dari nilai harapan (*expected value*) dan

simpangan baku (*Standard Deviation*) dari suatu hasil/nilai (pay off), maka persamaannya dapat ditulis sebagai berikut :

$$U(x) = E(x) + \Phi [V(x)]^{1/2} = U(CE)$$

Dimana :

U = Utilitas

X = Pendapatan acak dari prospek yang berisiko

E(x) = Ekspektasi (x) ; pendapatan acak rata-rata dari prospek berisiko

CE = Ekuivalen kepastian (*Certainty Equivalent*)

Suatu Hasil atau pendapatan usaha tani yang diputuskan pengguna dalam kondisi Ketidakpastian dimana pengguna merasa tidak berbeda antara menerima hasil Yang dicerminkan dalam kondisi ketidakpastian atau menerima dengan kepastian sesuatu hasil dengan nilai tertentu .

$V(x)^{1/2}$ = Simpangan baku pendapatan acak dari prospek berisiko

Φ = Koefisien pilihan risiko

Secara teoritis telah digambarkan oleh Roumasset (1979), bahwa hubungan antara Utilitas dengan kesejahteraan (*wealth*) tidak berbentuk garis lurus, melainkan cembung atas kombinasi cekung dan cembung ke arah Utilitas. Oleh karena itu dalam penelitian ini faktor-faktor kesejahteraan dikembangkan dan diperkaya dengan faktor sosial ekonomi pengguna, fungsi penduga yang digunakan adalah fungsi logaritma. Sebagai variabel dependen adalah utilitas, dan karena risiko berhubungan dengan fungsi utilitasnya maka terdapat hubungan antara fungsi utilitas terhadap kekayaan (*wealth*). *Wealth* berhubungan dengan faktor sosial ekonomi, oleh sebab itu akan diduga faktor-faktor sosial ekonomi pengguna yang mempengaruhi Utilitas *Wealth*.

Utilitas Wealth dalam kondisi ketidakpastian didekati dengan CE, sedangkan CE didapat dari variabel luas lahan dan pendapatan usaha tani yang dihitung pada hipotesis satu, sedangkan variabel lain dipertimbangkan dimasukan karena diduga mempunyai keterkaitan dengan CE. Pengguna diasumsikan memaksimalkan utilitas sesuai dengan fungsi utilitas Von Neuman-Morgestern terhadap Wealth.

4.2.1 Dasar Analisis

- a. Bila responden memilih Certainty Equivalent dari prospek berisiko nya sebesar CE, maka $CE = E(x)$, berarti $\Phi = 0$ (Risk neutral).
- b. Bila responden memilih Certainty Equivalent dari prospek berisiko nya sebesar Rp. 'kurang dari CE' ,- dan seterusnya, maka $CE < E(x)$, berarti $\Phi < 0$ (risk averter)
- c. Bila responden memilih Certainty Equivalent dari prospek berisiko nya sebesar Rp. 'lebih besar dari CE' ,- dan seterusnya, maka $CE > E(x)$, berarti $\Phi > 0$ (Risk preferring)

4.2.2 Risiko Ketidakmampuan

Dalam pelaksanaannya kegiatan pengumpulan data primer memerlukan bahan kanjian untuk penilaian risiko ketidakmampuan rantai pasok BBM. Data tersebut akan dikaitkan dengan pelaksanaan Risk Assessment methodology yang standar.

- Melakukan pengumpulan data lapangan terkait dengan perilaku konsumen BBM
- Melakukan pengumpulan data/pengamatan lapangan risiko ketidakmampuan rantai pasok BBM
- Pengolahan, kompilasi dan input data yang telah dikumpulkan.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko rantai pasok BBM

Data Penilaian Risiko dengan Berbagai Faktor

Guna memenuhi kebutuhan data yang merupakan parameter utama untuk menentukan penilaian risiko yang diperoleh dari data hasil lapangan dengan berbagai faktor yang antara lain seperti yang disebutkan di bawah ini :

- *Management Factor*

Data yang dibutuhkan adalah potret yang terkait dengan faktor manajemen seperti:

Tabel 4-1

Kebutuhan Data Lapangan - Management Factor

Faktor Terkait	Relevansi Data
Infrastruktur dan Organisasi	Organigram, budaya kerja, kepemimpinan, Jobdesk, arahan dan lain-lain
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Sistem Informasi	Keahlian, Pelatihan, Knowledge, dll Penggunaan Sistem, Database dan jaringan, dan lain-lain
Program / Rencana dalam keadaan darurat	Contingency Plan, Koordinasi dengan pihak lain, dsb

- *Generic Factor*

Kebutuhan data akan representasi dari statistik kinerja kehandalan atau kegagalan rantai pasok BBM bersubsidi.

- *Likelihood factor*

Data kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehandalan dalam rantai pasok BBM antara lain :

Tabel 4-2
Kebutuhan Data Lapangan - Generic Factor

Faktor Terkait	Relevansi Data
Fungsional	Kondisi infrastruktur/fasilitas/mesin/alat pendukung seperti tanki, pipa, pompa, alat transportasi, dan lain lain
Alam	Kondisi alam : cuaca, jalan, laut, alur sungai
Mekanisme	Perilaku pelaksana, pemeliharaan (repair, preventif dan prediktif)
Efectivitas Pengendalian	Perencanaan, monitoring, pengawasan dan penelusuran

4.3 Data Penilaian Risiko Berdasarkan Dampak dan Paparan (Exposures)

Selain data yang berhubungan dengan faktor-faktor untuk melakukan analisa risiko, data yang terkait dengan parameter dasar terhadap dampak dan paparan juga menjadi penting. Ada beberapa kebutuhan parameter-parameter yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- *Paparan (exposures)*

Lingkup kebutuhan data paparan sangat erat relevansinya dengan wilayah atau cluster paparan yang akan terkena dampak (consequences). Dampak yang terjadi pada suatu wilayah paparan dengan wilayah paparan lain tidaklah sama meskipun bersumber dari permasalahan yang sama, oleh karena itu data spesifikasi lapangan untuk masing-masing wilayah sangat diperlukan.

Tabel 4-3

Kebutuhan Data Lapangan – Wilayah / Cluster Paparan

Wilayah / Cluster	Representasi Data
Wilayah/Cluster I	Lingkup Wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung
Wilayah/Cluster II	Lingkup Wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Timur
Wilayah/Cluster III	Lingkup Wilayah Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat

- *Dampak*

Lingkup kebutuhan Data yang mencakup sekitar dampak (consequences) yang diklasifikasikan sesuai masing-masing wilayah/Cluster paparannya. Untuk itu perlu data dasar yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4-4

Kebutuhan Data Lapangan – Dampak Consequences

Jenis Dampak	Literatur untuk setiap Wilayah
Ekonomi	Potensi ekonomi, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, mata pencaharian
Politik	Struktur dan sistem pemerintahan daerah dan sebagainya

Ketahanan/keamanan	Sistem Pertahanan Lingkungan dan lain-lain
Lingkungan	Letak Geografis, kondisi alam dan sebagainya
Sosial dan Budaya	Adat istiadat dan nilai-nilai setempat, keagamaan dan lain-lain

Harus diakui bahwa pelayanan dalam rantai pasok BBM oleh PT Pertamina (Persero) saat ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat seperti kelangkaan dan kenaikan harga BBM yang disampaikan melalui media massa, bahkan unjuk rasa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang positif terhadap aparat pemerintah dan memberikan dampak sosial-politik yang luas di masyarakat.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka perlu adanya kajian tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat (yaitu BBM), dan kemudian menganalisa dampak-dampak sosio-politiknya yang mungkin muncul apabila terjadi gangguan rantai pasok BBM. Dengan analisa dampak tersebut, diharapkan pemerintah dapat mengukur besaran dampak sosial dan politik di masyarakat guna meminimalisir atau menghindari risiko / dampak yang lebih besar.

4.4 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisa dampak sosial dan politik dalam rantai pasok BBM adalah penelitian evaluasi deskripsi (Evaluation and Description Research) dan bersifat studi kasus yang dikaji secara kualitatif.

Menurut Danim, penelitian evaluasi ini menekankan pada upaya membuat pertimbangan terhadap dampak atau manfaat program-program/ kebijakan dengan melakukan penjelasan (deskripsi) rasional atas evaluasi tersebut (1979:29). Penelitian ini dimaksudkan sebagai sebuah penjelasan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan kondisi subyek atau pun obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2001:41).

4.5 Tahapan Penelitian

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilaksanakan beberapa kegiatan dari mulai pemantapan Tim Peneliti, penyiapan bahan kuestioner yang terdiri dari 2 bagian: Pertama, berisi identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisa profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan rantai pasok BBM. Kedua, meminta respon/pendapat masyarakat tentang seberapa besar dampak apabila terjadi gangguan dalam rantai pasok BBM terhadap gejala sosial (kecemasan dan keresahan masyarakat), gejala dan stabilitas politik (unjuk rasa, kerusuhan sosial), tingkat kriminalitas (pencurian, pengoplosan, penyelundupan, dan penimbunan BBM), dan kesejahteraan masyarakat (pendapatan, pendidikan, kesehatan).

2. Tahap Survei dan Pengumpulan Data

Didalam tahap ini kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- Melakukan survei
- Identifikasi masalah/dampak

Artinya, pada tahap ini dilakukan tahap pengumpulan data melalui pengisian kuestioner, pengisian kuestioner dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- Dilakukan sendiri oleh konsumen BBM dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Dilakukan oleh pencacah (petugas survei) melalui wawancara.

Untuk mendapatkan gambaran dampak sosial dan politik di masyarakat jika terjadi gangguan/ kegagalan rantai pasok BBM diperlukan pengumpulan data baik yang bersumber dari lapangan (kuestioner) maupun pendapat ahli, yakni :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumbernya, yaitu pada responden (konsumen BBM) di beberapa wilayah yang mewakili seluruh wilayah Indonesia seperti Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur , Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber di lapangan, yaitu literatur, makalah, majalah, junal, buku, website dan dokumen-dokumen lain yang menunjang penelitian ini.

4.5.1 Perhitungan Obyek Data dan Asumsi

Untuk mengetahui jumlah besaran data yang akan dikumpulkan, berikut ini merupakan perkiraan jumlah daya untuk masing-masing wilayah dan sebagai bahan untuk memperdalam kajian pada Rantai pasok BBM yang diperlukan, dan khusus di instansi Pertamina Pusat dilakukan observasi kepada beberapa expert.

Tabel 4-5

Jumlah Obyek Survei per wilayah

No.	Provinsi	Expert	Dampak	Sektor Pengguna	Rincian Sektor Pengguna			
					TR	UK	NLY	RT
1	Sumut		8	84	14	21	14	35
2	Kep. Riau		8	84	14	14	21	35
3	Sumsel		8	84	14	14	21	35
4	Lampung		8	84	14	14	21	35
5	Banten		8	280	140	64	41	35
6	DKI Jakarta		8	280	150	64	31	35
7	Jabar		8	280	140	64	41	35
8	Jateng		8	280	132	62	51	35
9	DI Yogyakarta		8	280	132	62	51	35
10	Jatim		8	280	132	62	51	35
11	Kaltim		8	84	14	21	21	35
12	Sulut		8	84	14	21	21	35
13	Maluku		8	84	14	21	21	35
14	Papua Barat		8	84	14	21	21	35
	Pertamina Pusat	6						
		6	112	2352	938	497	427	490
				Total	2464			

Tabel 4-6

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		84
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	14

	Usaha Kecil	21
	Nelayan	14
	Rumah Tangga	35
Total		92

Obyek yang akan disurvei untuk provinsi Sumatera Utara berjumlah sekitar 92 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-7

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Riau		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		84
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	14
	Usaha Kecil	14
	Nelayan	21
	Rumah Tangga	35
Total		92

byek yang akan disurvei untuk provinsi Kepulauan Riau berjumlah sekitar 92 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-8

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		84
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	14
	Usaha Kecil	14
	Nelayan	21
	Rumah Tangga	35

Total	92
--------------	-----------

byek yang akan disurvei untuk provinsi Sumatera Selatan berjumlah sekitar 92 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-9

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Lampung

Lampung		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		84
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	14
	Usaha Kecil	14
	Nelayan	21
	Rumah Tangga	35
Total		92

byek yang akan disurvei untuk provinsi Lampung berjumlah sekitar 92 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-10

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Banten

Banten		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		280
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	140
	Usaha Kecil	64
	Nelayan	41
	Rumah Tangga	35
Total		288

byek yang akan disurvei untuk provinsi Banten berjumlah sekitar 288 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-11

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		280
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	150
	Usaha Kecil	64
	Nelayan	31
	Rumah Tangga	35
Total		288

byek yang akan disurvei untuk provinsi DKI Jakarta berjumlah sekitar 288 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-12

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		280
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	140
	Usaha Kecil	64
	Nelayan	41
	Rumah Tangga	35
Total		288

byek yang akan disurvei untuk provinsi Jawa Barat berjumlah sekitar 288 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-13

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		280
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	132
	Usaha Kecil	62
	Nelayan	51
	Rumah Tangga	35
Total		288

byek yang akan disurvei untuk provinsi Jawa Tengah berjumlah sekitar 288 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-14

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi DI Yogyakarta

DI Yogyakarta		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		280
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	132
	Usaha Kecil	62
	Nelayan	51
	Rumah Tangga	35
Total		288

byek yang akan disurvei untuk provinsi DI Yogyakarta berjumlah sekitar 288 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-15

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		280
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	132
	Usaha Kecil	62
	Nelayan	51
	Rumah Tangga	35
Total		288

byek yang akan disurvei untuk provinsi Jawa Timur berjumlah sekitar 288 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-16

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		84
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	14
	Usaha Kecil	14
	Nelayan	21
	Rumah Tangga	35
Total		92

byek yang akan disurvei untuk provinsi Kalimantan Timur berjumlah sekitar 92 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-17

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Sulawesi Utara

Sulawesi Utara		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		84
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	14
	Usaha Kecil	14
	Nelayan	21
	Rumah Tangga	35
Total		92

byek yang akan disurvei untuk provinsi Sulawesi Utara berjumlah sekitar 92 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-18

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Maluku

Maluku		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		84
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	14
	Usaha Kecil	14
	Nelayan	21
	Rumah Tangga	35
Total		92

byek yang akan disurvei untuk provinsi Maluku berjumlah sekitar 92 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

Tabel 4-19

Jumlah Obyek Survey untuk Provinsi Papua Barat

Papua Barat		Rencana
Dampak		8
Observasi Analisis		84
Rincian Sektor Pengguna	Transportasi	14
	Usaha Kecil	14
	Nelayan	21
	Rumah Tangga	35
Total		92

byek yang akan disurvei untuk provinsi Papua Barat berjumlah sekitar 92 titik dengan sebaran lokasi di beberapa Kabupaten / Kota terpilih.

B A B V

MANAJEMEN RISIKO DAN MITIGASI

DAMPAK EKONOMI, SOSIAL, POLITIK, DAN PERTAHANAN KEAMANAN

Distorsi terhadap Rantai Pasok BBM bersubsidi mengakibatkan munculnya dampak ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan keamanan (hankam). Dampak perlu diidentifikasi sehingga dapat diketahui sumber risikonya agar dapat ditentukan langkah mitigasinya. Dalam kajian Manajemen Risiko Distorsi terhadap Rantai Pasok BBM bersubsidi, dilakukan survei ke beberapa wilayah sampel yang dapat mewakili seluruh wilayah Indonesia, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Maluku, dan Kepulauan Riau. Survei dampak diperlukan untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi dari dampak ekonomi, sosial, politik, dan hankam. Analisis hasil survei berdasarkan wilayah survei dapat dilihat pada sub bab-sub bab di bawah ini.

5.1. Propinsi Sumatera Selatan

5.1.1. Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di kota Palembang. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam menghadapi distorsi terhadap Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Sumatera Selatan, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Palembang. Kota Palembang digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Sumatera Selatan, Palembang merupakan kota yang paling banyak menggunakan BBM.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	2	2	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	1	1	1
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	2	2	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	1	1	1
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	1	1	1

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata bensin 1,4, solar 1,4 dan minyak tanah 1,25. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 1,35. Nilai 1,35 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah rendah. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Terjadinya Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tidak akan menjadi masalah terhadap biaya transportasi apabila BBM tersebut diganti dengan bahan bakar yang lain yang nilai keekonomiaannya sama dengan BBM bersubsidi.
- Apabila terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tanpa penggantian bahan bakar yang lain yang nilai keekonomiaannya sama dengan BBM

bersubsidi, maka BBM yang ada harganya sama dengan harga industri, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan biaya transportasi sampai dengan 40% dan apabila lebih dari 50% aktivitas perekonomian menjadi terganggu atau lumpuh.

- Apabila terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi disubstitusikan dengan bahan bakar lain, maka tidak akan terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.
- Apabila terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tidak diimbangi dengan penggantian dan berlaku harga BBM standar industri, maka akan terjadi peningkatan harga kebutuhan pokok.
- Diberlakukannya BBM tanpa subsidi mengakibatkan daya beli masyarakat akan menurun karena cenderung terjadi penurunan penghasilan dan kenaikan pengeluaran

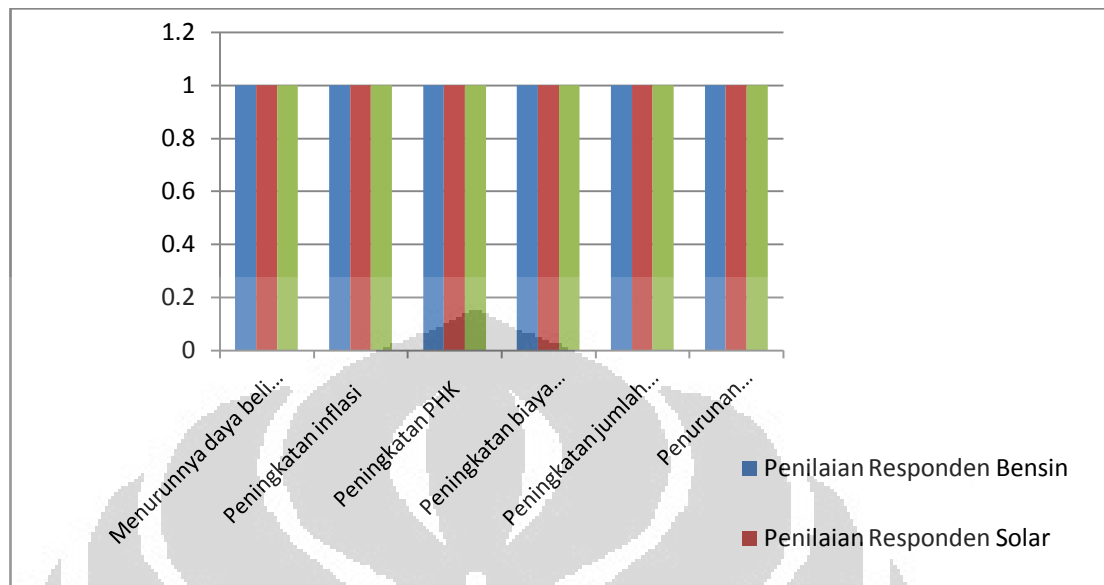
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	1	1	1
2	Peningkatan inflasi	1	1	1
3	Peningkatan PHK	1	1	1
4	Peningkatan biaya produksi industri	1	1	1
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	1	1	1
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	1	1	1

Gambar 5.2. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 5.2 terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin, solar, dan minyak tanah yang sama yaitu 1. Nilai 1 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah rendah. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi, yaitu:

- Apabila terjadi kenaikan harga, maka masyarakat cenderung membatasi pembelian dan hal ini hanya berlaku untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Masyarakat berpenghasilan tinggi tidak terjadi penurunan daya beli karena daya belinya tinggi

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 5.3.

**Tabel 5.3. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak
Ekonomi**

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	2	1	1
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	1	1	1
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	1	1	1
	Peningkatan biaya produksi di industri	1	1	1
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	1	1	1
	Penurunan daya beli masyarakat	1	1	1
	Peningkatan inflasi	1	1	1
	Peningkatan PHK	1	1	1
	Peningkatan kemiskinan	1	1	1
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	1	1	1
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	2	1	1
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	1	1	1
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	1	1	1
	Peningkatan biaya produksi di industri	1	1	1
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	1	1	1
	Penurunan daya beli masyarakat	1	1	1
	Peningkatan inflasi	1	1	1
	Peningkatan PHK	1	1	1
	Peningkatan kemiskinan	1	1	1
Penurunan pertumbuhan ekonomi	1	1	1	
Penyelewengan	Kenaikan biaya transportasi	1	2	1

Penggunaan	Peningkatan harga kebutuhan pokok	1	1	1
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	1	1	1
	Peningkatan biaya produksi di industri	1	1	1
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	1	1	1
	Penurunan daya beli masyarakat	1	1	1
	Peningkatan inflasi	1	1	1
	Peningkatan PHK	1	1	1
	Peningkatan kemiskinan	1	1	1
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	1	1	1

Berdasarkan tabel 5.3 terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 1,07, solar 1,03, dan minyak tanah 1. Secara rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 1,03. Nilai 1,03 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah rendah. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Propinsi Sumsel telah melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg sehingga minyak tanah bersubsidi secara bertahap dikurangi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 5.4

Tabel 5.4. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

1	Penurunan daya beli masyarakat	Substitusi bensin	Substitusi solar	Konversi LPG
2	Peningkatan inflasi	Kenaikan lebih dari 25% operasi pasar	Kenaikan lebih dari 25% operasi pasar	Kenaikan lebih dari 25% operasi pasar
3	Peningkatan PHK	Padat karya	Padat karya	Padat karya
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	Bantuan langsung tunai	Bantuan langsung tunai	Bantuan langsung tunai
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Substitusi bensin	Substitusi solar	Konversi LPG
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Merger	Merger	Merger

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya, apabila pada saat adanya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah substitusi bensin, solar, dan minyak tanah dengan bahan bakar alternatif yang memiliki nilai keekonomian sama dengan BBM bersubsidi.

- Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi
- Probabilitas Sebelum Mitigasi
 Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 60%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 60%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 80%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 67%.
- Dampak Sebelum Mitigasi
 Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 73%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 73%. Sedangkan untuk minyak tanah

adalah 80%. Rata-rata total untuk dampak sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 75,56%.

- **Probabilitas Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 40%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk probabilitas sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

- **Dampak Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 40%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk dampak sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

5.1.2 Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan bila terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 5.5. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Keresahan masyarakat	3	5	2	4	3	4

Berdasarkan tabel 5.5 terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 3, dan minyak tanah 3,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Ketergantungan masyarakat terhadap bensin dan minyak tanah lebih besar dibandingkan dengan solar karena mayoritas masyarakat Indonesia berada di interval menengah ke bawah.

b. Dampak

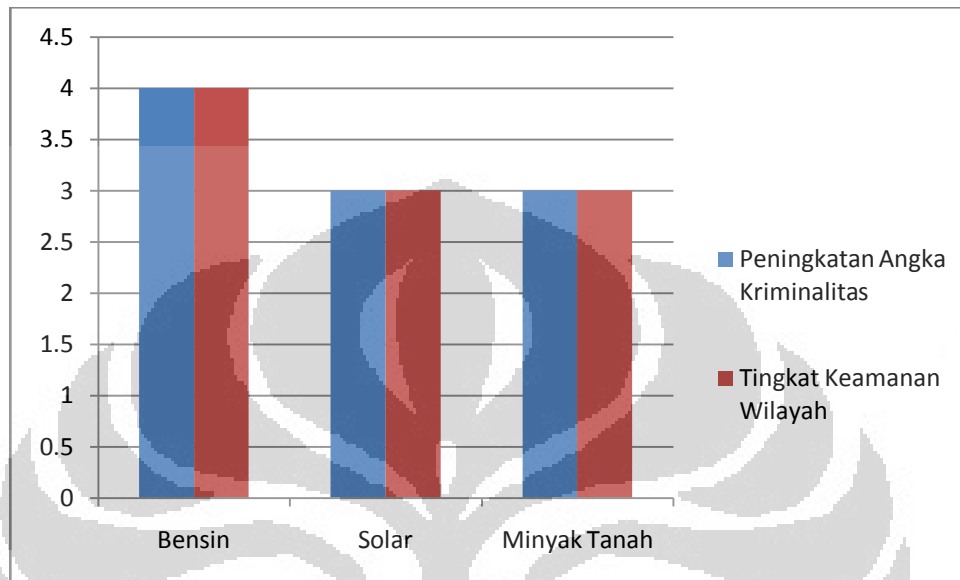
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 5.6.

Tabel 5.6. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	3	1	3	4
2	Tingkat keamanan	4	2	4	1	4	4

wilayah						
---------	--	--	--	--	--	--

Gambar 5.3. Diagram Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Terhadap Dampak
Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 5.6 terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,75, solar 2,25, dan minyak tanah 3,75. Rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,92. Nilai 2,92 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan jika terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pengaruh keamanan wilayah dan kriminalitas lebih condong disebabkan minyak tanah karena minyak tanah banyak digunakan dalam masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 5.7.

**Tabel 5.7. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak
Pertahanan Keamanan**

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	4	3	4	2	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	2	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	4	2	4	3	4	2
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	3	1	2
	Tingkat keamanan wilayah	4	1	4	3	4	1

Berdasarkan tabel 5.7 terlihat bahwa jika terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,83, solar 2,83, dan minyak tanah 3,21. Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,93. Nilai 2,96 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang Tidak ada catatan

yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan atas terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dalam mengisi kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 5.8

Tabel 5.8. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Sosialisasi	1. Sosialisasi	1. Sosialisasi
		2.Cegah penyelewengan	2.Cegah penyelewengan	2.Cegah penyelewengan
		3. Penanganan Distorsi	3. Penanganan Distorsi	3. Operasi pasar
2	Peningkatan angka kriminalitas	1. Penegakan hukum	1. Penegakan hukum	1. Penegakan hukum
		2.Cegah penyelewengan	2.Cegah penyelewengan	2.Cegah penyelewengan
		3.Pastikan keamanan posko BBM	3.Pastikan keamanan posko BBM	3.Pastikan keamanan posko BBM
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Penyuluhan	1. Penyuluhan	1. Penyuluhan
		2 Pencegahan hukum	2 Pencegahan hukum	2 Pencegahan hukum
		3. Penegakan hukum	3. Penegakan hukum	3. Penegakan hukum

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi menimbulkan dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang

perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah prioritas pertama adalah sosialisasi pengurangan subsidi BBM ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, prioritas kedua adalah mencegah terjadinya penyelewengan pada saat distribusi bensin, solar, dan minyak tanah. Prioritas ketiga untuk bensin dan solar adalah membatalkan pengurangan volume bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan prioritas ketiga pada minyak tanah adalah melakukan operasi pasar dengan menjual minyak tanah murah/bersubsidi.

5.1.3. Politik

Responden pada dampak politik adalah ahli dari pemerintah yang diwakili oleh Kepala Seksi Pembinaan PSM dan K2KS dan dari independen yang diwakili oleh Mahasiswa UNSRI. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan bilamana terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemkot Sumsel	Akademi	Pemkot Sumsel	Akademi	Pemkot Sumsel	Akademi
1	Gejolak Politik	3	3	4	3	4	2

Berdasarkan tabel 5.9. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejala politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,0, solar 3,5, dan minyak tanah 3,0.

Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 3,13. Nilai 3,16 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejala politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan bila menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan menimbulkan gejala politik karena kalangan elit politik akan menyuarakan aspirasi masyarakat jika distorsi tersebut berdampak pada masyarakat

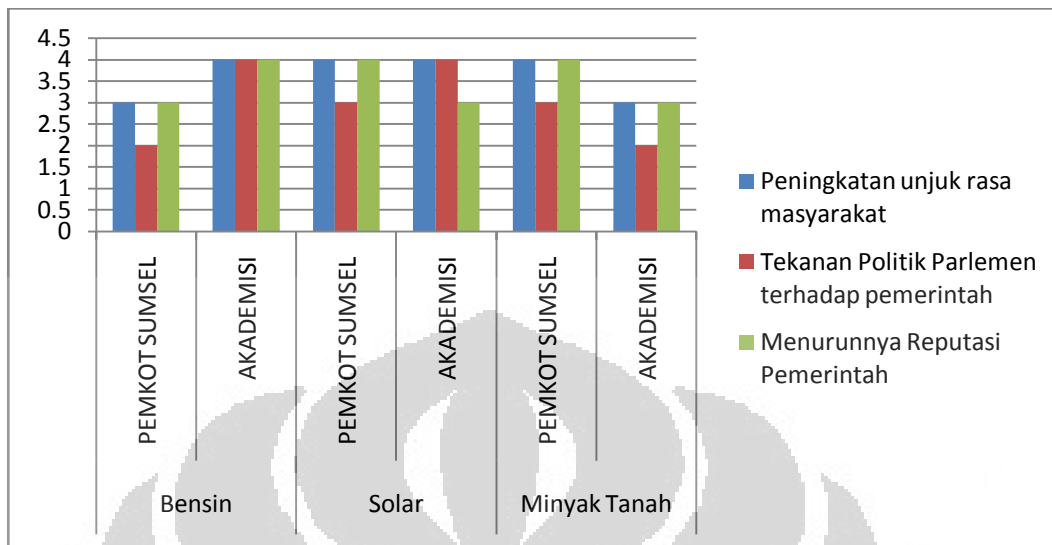
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 5.10.

Tabel 5.10. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemko	Akade	Pemko	Akade	Pemko	Akade
		t	misi	t	misi	t	misi
		Sumse	Sumse	Sumse	Sumse	Sumse	Sumse
		1	1	1	1	1	1
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	3	4	4	4	4	3
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	2	4	3	4	3	2
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	3	4	4	3	4	3

Gambar 5.4. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 5.10. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,33, solar 3,5, dan minyak tanah 3,13.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 3,33. Nilai 3,33 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan bilamana terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 5.11.

Tabel 5.11. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemko t Sumse 1	Akade misi	Pemko t Sumse 1	Akade misi	Pemko t Sumse 1	Akade misi
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	3	4	4	4	4	2
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	3	4	2	4	2
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	3	4	2	4	2
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	2	4	3	4	3	3
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	4	3	4	3	3
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	4	4	4	4	3
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	2	3	3	3	2	2
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	3	3	3	3	2

	pemerintah						
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	3	3	4	3	4	2

Berdasarkan tabel 3.11. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,22, solar 3,38, dan minyak tanah 2,88.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 3,13. Nilai 3,16 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 5.12.

Tabel 5.12. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	1. Penanganan	1. Penanganan	1. Penanganan
		2. Hemat BBM	2. Hemat BBM	2. Hemat BBM
		3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	3. Konversi ke gas

2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)
		2. Beri BLT	2. Beri BLT	2. Beri BLT
		3. Tingkatkan pelayanan	3. Tingkatkan pelayanan	3. Tingkatkan pelayanan
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)
		2. Beri BLT	2. Beri BLT	2. Beri BLT
		3. Tingkatkan pelayanan	3. Tingkatkan pelayanan	3. Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

5.1.4. Sosial

Responden pada dampak sosial adalah ahli dari pemerintah yang diwakili oleh Kepala Seksi Pembinaan PSM dan K2KS dan dari independen yang diwakili oleh Mahasiswa

UNSRI. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan bilamana terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 5.13.

Tabel 5.13. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemkot Sumse	Akademisi	Pemkot Sumse	Akademisi	Pemkot Sumse	Akademisi
1	Keresahan Masyarakat	5	3	4	3	5	4
2	Penolakan Masyarakat	5	3	4	3	5	4

Berdasarkan tabel 5.13, terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,0, solar 3,5, dan minyak tanah 4,5.

Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 4,0. Nilai 4,0 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan atas terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Masyarakat akan menolak terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi karena melihat kondisi ekonomi Indonesia yang masih krisis dan belum membaik

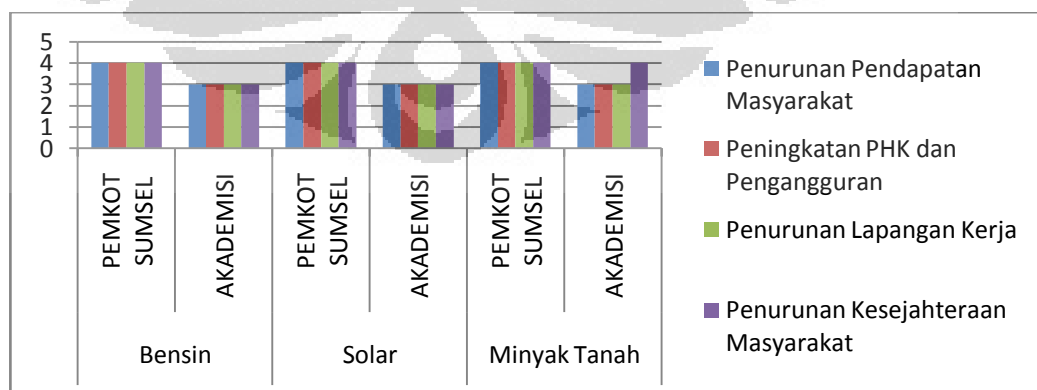
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 5.14.

Tabel 5.14. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemko t Sumse 1	Akade misi	Pemko t Sumse 1	Akade misi	Pemko t Sumse 1	Akade misi
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	3	4	3	4	3
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	3	4	3	4	3
3	Penurunan Lapangan Kerja	4	3	4	3	4	3
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	3	4	3	4	4

Gambar 5.5. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 5.14. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,5, solar 3,5 dan minyak tanah 3,62.

Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 3,54. Nilai 3,54 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan terhadap terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 5.15.

Tabel 5.15. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemkot Sumse 1	Akad emisi	Pemkot Sumse 1	Akad emisi	Pemkot Sumsel	Akad emisi
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	5	3	4	3	4	4
	Penolakan Masyarakat	5	3	4	3	4	4
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	2	4	2	4	3
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	2	4	2	4	2

Pengurangan Lapangan Kerja	4	2	4	2	4	2
Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	2	4	2	4	2

Tabel 5.15. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial (Lanjutan)

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemkot Sumse 1	Akad emisi	Pemkot Sums el	Akad emisi	Pemkot Sums el	Akad emisi
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	5	3	5	3	4	4
	Penolakan Masyarakat	5	3	5	3	4	4
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	2	4	2	4	3
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	2	4	2	4	2
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	2	4	2	4	2
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	5	2	5	2	4	2

Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	5	3	4	3	5	4
	Penolakan Masyarakat	4	3	4	3	4	3
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	3	4	3	4	3
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	3	4	3	4	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	3	4	3	4	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	3	4	3	4	3

Berdasarkan tabel 3.15. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,4, solar 3,36, dan minyak tanah 3,5.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 3,42. Nilai 3,42 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan atas terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Jika distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tetap terjadi, masyarakat kecil berpenghasilan rendah dan tidak tetap akan merasakannya karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 5.16.

Tabel 5.16. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)
		Hemat BBM	Hemat BBM	Hemat BBM
		Mencari BBM alternatif	Mencari BBM alternatif	Konversi ke gas
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)
		Memberi BLT	Memberi BLT	Memberi BLT
		Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)
		Memberi BLT	Memberi BLT	Memberi BLT
		Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan

4	Pengurangan Lapangan Kerja	Penanganan	Penanganan	Penanganan
		Hemat BBM	Hemat BBM	Hemat BBM
		Mencari BBM alternatif	Mencari BBM alternatif	Konversi ke gas
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)
		Memberi BLT	Memberi BLT	Memberi BLT
		Terapkan sistem kartu kendali	Terapkan sistem kartu kendali	Terapkan sistem kartu kendali

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

5.2. Propinsi Kalimantan Timur

5.2.1. Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di kota Samarinda. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan

yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Kalimantan Timur, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Samarinda. Kota Samarinda digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda merupakan ibu kota Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi Kalimantan Timur.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 5.17. di bawah

Tabel 5.17. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	5	4	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	5	3	5
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	5	3	5
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	4	3
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	1	2	1

Berdasarkan tabel 5.17. terlihat bahwa distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,8, solar 3,2, dan minyak tanah 3,5. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Secara umum di kota Samarinda, bensin adalah jenis BBM yang paling diminati oleh angkutan umum dan pengguna motor, sedangkan solar adalah jenis BBM yang paling diminati oleh bus. Kenaikan biaya transportasi yang perlu diperhatikan akibat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah pada angkutan umum, pengguna motor, dan bus.
- Untuk mencegah terjadinya pengurangan jumlah karyawan di industri, perlu dibuat manajemen khusus untuk industri sehingga PHK tidak semudah itu terjadi

b. Dampak

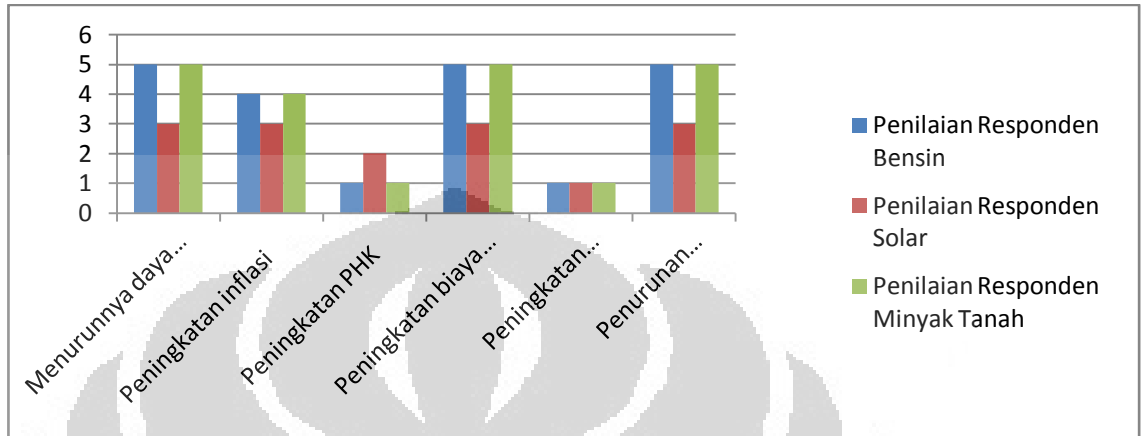
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 5.18.

Tabel 5.18. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	5	3	5
2	Peningkatan inflasi	4	3	4
3	Peningkatan PHK	1	2	1
4	Peningkatan biaya produksi industri	5	3	5
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	1	1	1

6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	5	3	5
---	-------------------------------	---	---	---

Gamabr 5.6. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 5.18. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dapat memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,5, solar 2,5, dan minyak tanah 3,5. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,17. Nilai 3,17 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan bilamana terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Secara tidak langsung kenaikan biaya transportasi menyebabkan semua harga barang naik sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 5.19.

Tabel 5.19. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	5	4	1	
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	5	3	5	
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	5	3	5	
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	4	3	
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	1	2	1	
	Penurunan daya beli masyarakat	5	3	5	
	Peningkatan inflasi	4	3	4	
	Peningkatan PHK	1	2	1	
	Peningkatan kemiskinan	1	1	1	
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	5	3	5	
	Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	3	4
		Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	2	4
Peningkatan pengeluaran masyarakat		4	2	4	
Peningkatan biaya produksi di industri		4	3	1	
Pengurangan jumlah karyawan di industri		1	1	2	
Penurunan daya beli masyarakat		2	1	2	
Peningkatan inflasi		2	1	1	
Peningkatan PHK		1	1	1	
Peningkatan kemiskinan		1	1	2	
Penurunan pertumbuhan		2	1	3	

	ekonomi			
--	---------	--	--	--

Tabel 5.19. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi (Lanjutan)

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Penyelewengan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	2	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	2	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	3	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	4	1	2
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	1	1	1
	Penurunan daya beli masyarakat	2	1	1
	Peningkatan inflasi	2	1	1
	Peningkatan PHK	1	1	1
	Peningkatan kemiskinan	1	1	1
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	2	2	2

Berdasarkan tabel 3.19. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,83, solar 1,97, dan minyak tanah 2,43. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 2,41. Nilai 2,41 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat adanya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Namun, ada beberapa catatan yang

diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang penting tidak mahal dan cukup
- Jika penggunaan BBM bersubsidi sudah dibatasi dan ditambah dengan adanya penyelewengan, maka akan berdampak pada kelangkaan BBM

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 5.20.

Tabel 5.20. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha
		Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil
		Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
2	Peningkatan inflasi	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha
		Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil
		Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
3	Peningkatan PHK	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha

	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil
	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah



Tabel 5.20. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi (Lanjutan)

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha
		Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil
		Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
5	Penurunan pertumbuhan	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha

	ekonomi	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil
		Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk kelima variabel adalah sama yaitu prioritas pertama menumbuhkan iklim usaha, prioritas kedua pertumbuhan sektor riil, dan prioritas ketiga adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah. Tindakan mitigasi berbeda dilakukan pada variabel peningkatan jumlah perusahaan likuidasi. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa peningkatan jumlah perusahaan likuidasi, maka tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah hanya satu yaitu penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

- Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi

- Probabilitas Sebelum Mitigasi

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 53%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 53%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 80%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 62,22%.

- Dampak Sebelum Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 67%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 67%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 80%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 71,11%.

- Probabilitas Sesudah Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 67%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 67%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 80%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 71,11%.

- Dampak Sesudah Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 40%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

5.2.2. Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner

untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 5.21.

Tabel 5.21. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	2	2	2

Berdasarkan tabel 5.21. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin, solar, dan minyak tanah. Nilai 2. berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah rendah. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan bilamana terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Probabilitas terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terhadap dampak pertahanan keamanan secara langsung tidak terlihat, dampak pertahanan keamanan muncul secara tidak langsung.
- b. Dampak

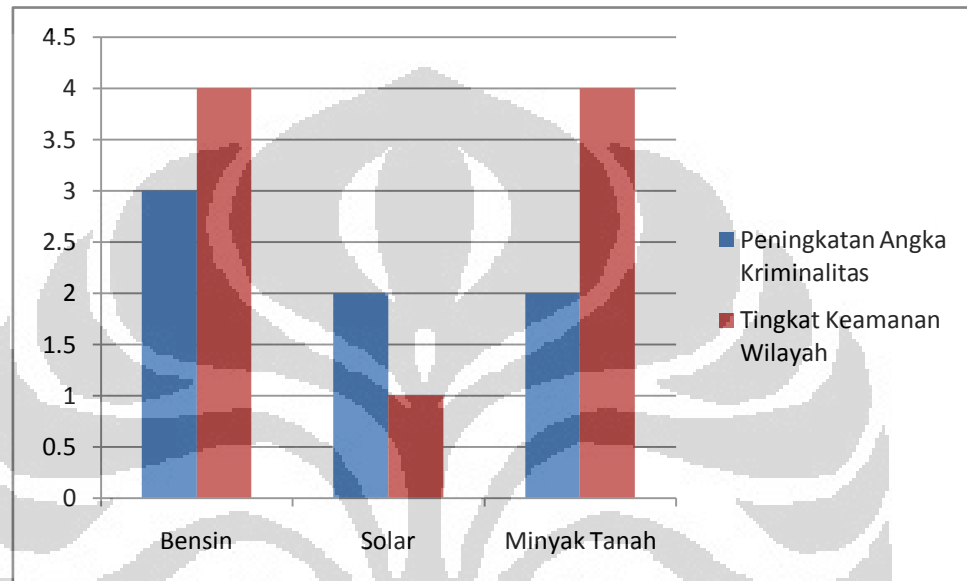
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 5.22.

Tabel 5.22. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

1	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	2
2	Tingkat keamanan wilayah	4	1	4

Gambar 5.7. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 5.22, terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,5, solar 1,5, dan minyak tanah 3. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,67. Nilai 2,67 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pada bensin, masalah peningkatan angka kriminalitas akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi diakibatkan karena permasalahan naiknya biaya angkutan umum.
- Pada minyak tanah, masalah peningkatan angka kriminalitas akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi diakibatkan karena permasalahan kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup.

- Tolok ukur naiknya harga minyak tanah dapat dilakukan benchmark pada kenaikan harga minyak tanah tahun 2004 – 2005.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 5.23.

Tabel 5.23. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	2	2	2
	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	2
	Tingkat keamanan wilayah	4	1	4
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	3	2	3
	Peningkatan angka kriminalitas	4	2	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	1	4
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	2	2	1
	Peningkatan angka kriminalitas	2	2	1
	Tingkat keamanan wilayah	1	1	1
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	1	1	1
	Peningkatan angka kriminalitas	1	1	1
	Tingkat keamanan wilayah	1	1	1

Berdasarkan tabel 5.23. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,33, solar 1,5, dan minyak tanah 2,08. Rata-rata total

sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 1,97. Nilai 1,97 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah rendah. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Naiknya kebutuhan masyarakat dipengaruhi oleh langka dan tingginya harga BBM
- Meningkatnya kemiskinan tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 5.23.1.

Tabel 5.23.1. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	Memastikan keamanan posko BBM	Memastikan keamanan posko BBM	Memastikan keamanan posko BBM
		Penanganan Segera	Penanganan Segera	Penanganan Segera
		Cegah penyelewengan	Cegah penyelewengan	Cegah penyelewengan
2	Peningkatan angka kriminalitas	Memastikan keamanan posko BBM	Memastikan keamanan posko BBM	Memastikan keamanan posko BBM
		Penanganan Segera	Penanganan Segera	Penanganan Segera
		Cegah penyelewengan	Cegah penyelewengan	Cegah penyelewengan
3	Penurunan tingkat keamanan	Perketat keamanan	Memastikan keamanan posko BBM	Memastikan keamanan posko BBM

	wilayah	Cegah penyelewengan	Cegah penyelewengan	Cegah penyelewengan
		Operasi pasar	Operasi pasar	Operasi pasar

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah sama, yaitu prioritas pertama adalah memastikan keamanan posko BBM, prioritas kedua penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, dan prioritas ketiga adalah mencegah penyelewengan distribusi bensin, solar, dan minyak tanah bersubsidi.

5.2.3. Politik

Responden pada dampak politik adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh Kasub Bid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Balai Kota Samarinda Hulu, sedangkan pihak independen diwakili oleh Koordinator Divisi Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Masyarakat, Universitas Mulawarman. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 5.24.

Tabel 5.24. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Gejolak Politik	5	3	4	3	5	3

Berdasarkan tabel 5.24. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.0, solar 3.5, dan minyak tanah 4.0. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 3.83.

Nilai 3.83 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejolak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Masyarakat Kalimantan Timur sangat konsumtif. Tahun 2008 menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap bensin untuk transportasi kendaraan roda dua meskipun sudah ada angkutan umum.
- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi untuk jenis bensin dan minyak tanah sangat berpengaruh besar terhadap gejolak politik karena perilaku masyarakat sulit ditebak jika dalam keadaan demikian.

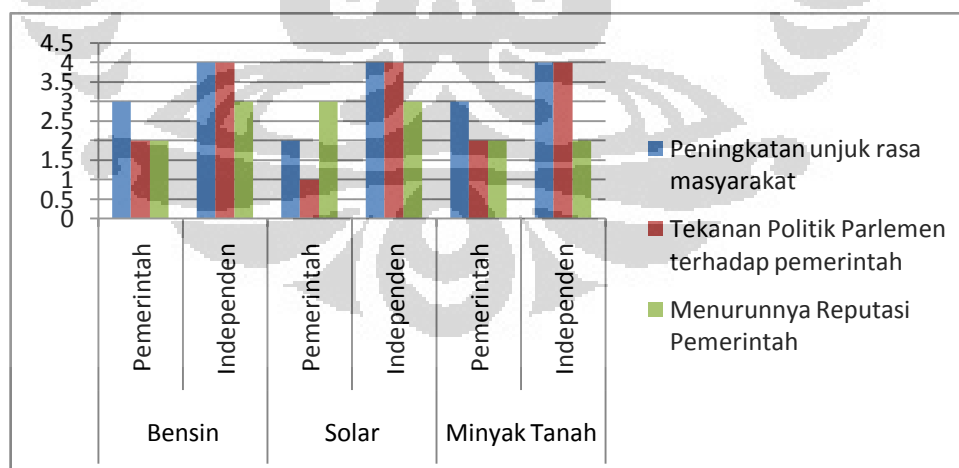
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 5.25.

Tabel 5.25. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	3	4	2	4	3	4
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	2	4	1	4	2	4
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	2	3	3	3	2	2

Gambar 5.8. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 5.25. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.0, solar 2.83, dan minyak tanah 2.83.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 2.88. Nilai 2.88 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat,

tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Sebenarnya keadaan Kalimantan Timur cukup kondusif, unjuk rasa umumnya hanya dari mahasiswa
- Dari segi tekanan elit politik tergantung tingkatan reaksi masyarakat baik dari segi keamanan maupun intensitas unjuk rasa
- Reputasi / popularitas pemerintah akan buruk di mata masyarakat awam yang hanya melihat kinerja pemerintah dari aspek turun atau naiknya harga BBM dan dari aspek sulit atau tidaknya mendapatkan BBM

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 5.26.

Tabel 5.26. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	3	4	2	4	3	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	2	4	2	4	2	4
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	2	3	3	3	2	3
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	3	4	2	4	3	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap	2	4	2	4	2	4

	pemerintah						
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	2	3	3	3	2	3
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	4	4	2	4	4	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	3	2	3	3	3
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	1	3	3	3	1	3

Berdasarkan tabel 5.26. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.0, solar 2.94, dan minyak tanah 3.0.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 2.98. Nilai 2.98 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 5.23.1.

Tabel 5.26.1. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	Penangan Segera	Penangan Segera	Penangan Segera
		Hemat BBM	Hemat BBM	Hemat BBM
		Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan,	Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan,	Konversi ke gas

		pinjaman lunak)	pinjaman lunak)	
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)
		Beri BLT	Beri BLT	Beri BLT
		Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)
		Beri BLT	Beri BLT	Beri BLT
		Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pemberian kompensasi dana bantuan sosial seperti beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, pinjaman lunak untuk UKM dinilai kurang mendesak karena yang dibutuhkan masyarakat Kalimantan Timur paling utama adalah kebutuhan pokok
- Adapun pengalihan hasil pengurangan subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin dinilai tidak mendidik dan memalakan masyarakat
- Volume BBM bisa dikurangi dengan catatan produksi BBM tetap dan pengawasan pendistribusian BBM lebih diperketat dengan melakukan operasi lapangan secara rutin
- Sebelum melakukan konversi dari minyak tanah ke gas, pemerintah sebaiknya membagikan tabung gas kepada masyarakat secara cuma-cuma, baru kemudian volume minyak tanah dikurangi

5.2.4. Sosial

Responden pada dampak sosial adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial, sedangkan pihak independen diwakili oleh Koordinator Divisi Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Masyarakat, Universitas Mulawarman. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 5.27.

Tabel 5.27. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Keresahan Masyarakat	4	4	3	4	4	4
2	Penolakan Masyarakat	5	3	4	3	5	4

Berdasarkan tabel 5.27. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.0, solar 3.5, dan minyak tanah 4.25. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 3.91. Nilai 3.91 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Keresahan masyarakat akan hilang atau berkurang apabila terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi ditanggulangi dengan langkah-langkah yang dapat meringankan beban hidup mereka seperti pemberian kompensasi bantuan sosial berupa BLT, bantuan pinjaman lunak untuk UKM dan sebagainya.

b. Dampak

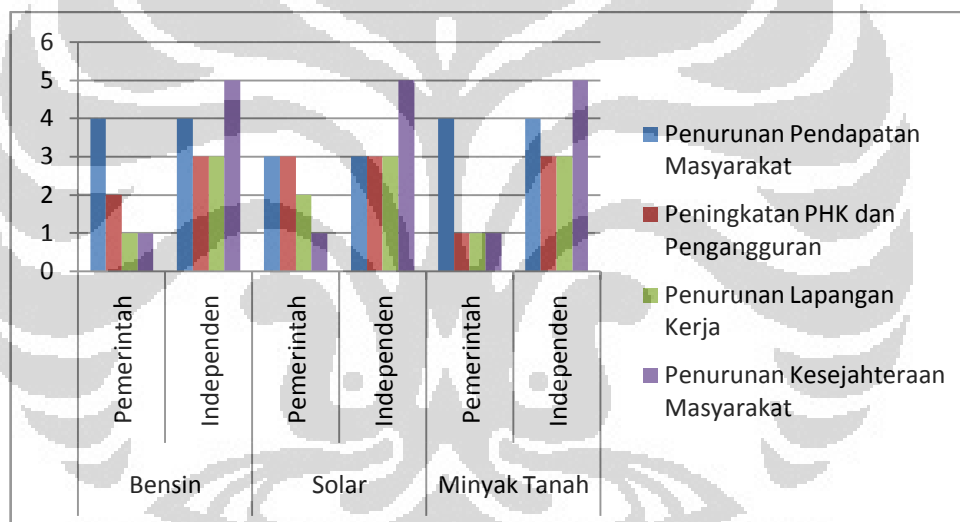
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 5.18.

Tabel 5.28. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen

1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	3	3	4	4
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	2	3	3	3	1	3
3	Penurunan Lapangan Kerja	1	3	2	3	1	3
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	1	5	1	5	1	5

Gambar 5.9. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 5.28. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 2.87, solar 2.87, dan minyak tanah 2.75. Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 2.83. Nilai 2.83 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Apabila penanganan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tidak disertai dengan pemberian kompensasi bantuan sosial, maka yang akan lebih merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke bawah

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 5.29.

Tabel 5.29. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	4	4	3	3	4	4
	Penolakan Masyarakat	5	3	4	3	5	4
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	3	3	4	3
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	2	3	3	3	1	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	1	3	2	3	1	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	1	5	1	5	1	5
	Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	3	4	2	3	3
Penolakan Masyarakat		3	4	2	3	4	4
Penurunan Pendapatan		1	3	1	3	1	3

Masyarakat						
Peningkatan PHK dan Pengangguran	1	3	1	3	1	3
Pengurangan Lapangan Kerja	1	3	1	3	1	3
Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	1	5	1	4	1	5

Tabel 5.29. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial (Lanjutan)

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	3	4	3	4	3	5
	Penolakan Masyarakat	2	4	2	4	2	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	1	4	1	4	1	5
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	1	3	1	4	1	3

Pengurangan Lapangan Kerja	2	3	1	4	2	3
Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	1	5	1	4	1	5

Berdasarkan tabel 5.29. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 2.88, solar 2.66, dan minyak tanah 2.97.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 2.83. Nilai 2.83 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 5.30.

Tabel 5.30. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)
		Hemat BBM	Hemat BBM	Hemat BBM

		Mencari BBM alternatif	Mencari BBM alternatif	Konversi ke gas
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)
		Memberi BLT	Memberi BLT	Memberi BLT
		Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)
		Memberi BLT	Memberi BLT	Memberi BLT
		Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan	Tingkatkan pelayanan
4	Pengurangan Lapangan Kerja	Penanganan Segera	Penanganan Segera	Penanganan Segera
		Hemat BBM	Hemat BBM	Hemat BBM
		Mencari BBM alternatif	Mencari BBM alternatif	Mencari BBM alternatif
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)
		Memberi BLT	Memberi BLT	Memberi BLT
		Terapkan sistem kartu kendali	Terapkan sistem kartu kendali	Terapkan sistem kartu kendali

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT /

beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

5.3. Propinsi Riau

5.3.1. Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi Riau, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di kota Batam. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Riau, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Batam. Kota Batam digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Kalimantan Timur, Batam merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi Riau.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 5.31.

Tabel 5.31. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya	4	4	

	transportasi			
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	2	2	2
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	5	5	5
4	Peningkatan biaya produksi industri	4	4	2
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	2

Berdasarkan tabel 5.31. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,6, solar 3,6, dan minyak tanah 2,2. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 3,5. Nilai 3,13 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam melakukan penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Responden setuju apabila volume BBM bersubsidi dikurangi atau dihilangkan karena subsidi hanya membuat banyak masalah, diantaranya membuat masyarakat kita menjadi malas, besarnya biaya pengawasan, menambah banyak permainan pengusaha BBM, dll.
- Kenaikan harga bahan pokok di Propinsi Riau hanya harga bahan pokok lokal saja apabila volume BBM bersubsidi dikurangi, sedangkan barang import harganya tetap.
- Apabila terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, masyarakat Propinsi Riau akan demonstrasi untuk meminta pemerintah menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi
- Industri di Propinsi Riau lebih banyak menggunakan BBM jenis bensin, solar, dan minyak tanah. Apabila ketiga jenis BBM ini mengalami kenaikan harga, maka tentunya akan mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya produksi.

- Industri-industri di Propinsi Riau, khususnya di kota Batam banyak yang menggunakan bensin dan solar dari Singapura karena harganya lebih murah daripada BBM tidak bersubsidi. Terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tidak mempengaruhi industri-industri di Propinsi Riau, khususnya di kota Batam

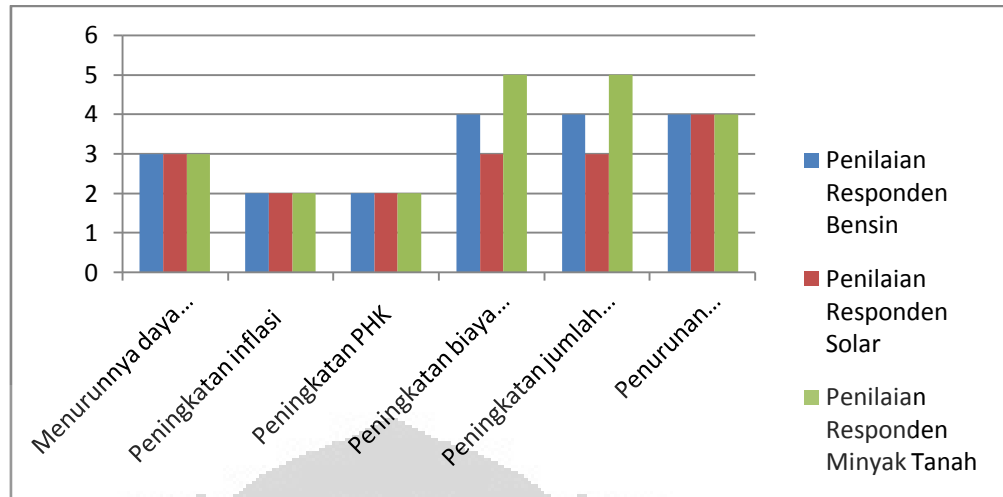
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 5.32.

Tabel 5.32. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	3	3	3
2	Peningkatan inflasi	2	2	2
3	Peningkatan PHK	2	2	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	4	3	5
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	4	3	5
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	4

Gambar 5.10. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 5.32. terlihat bahwa Terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,17, solar 2,83, dan minyak tanah 3,5. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,17. Nilai 3,17 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- BBM merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat. Berapapun keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, masyarakat pasti akan tetap membelinya.
- Inflasi akan menurun secara bertahap karena daya beli masyarakat akan menurun. Hal ini disebabkan uang yang beredar di masyarakat akan teralokasi sebagai pengganti dari subsidi tersebut
- Sebagian besar perusahaan-perusahaan di Propinsi Riau, khususnya Batam membeli BBM dari Singapura, maka terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tidak mengakibatkan terjadinya peningkatan PHK.

- Pengurangan volume bensin dan minyak tanah bersubsidi akan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan di masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya Batam menggunakan bensin dan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-harinya. Masyarakat lebih banyak berharap terhadap subsidi itu sendiri, khususnya subsidi minyak tanah.
- c. Sumber Risiko
- Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 5.33.

Tabel 5.33. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	4
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	2	3	4
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	5	3	4
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	2
	Penurunan daya beli masyarakat	4	3	3
	Peningkatan inflasi	3	3	3
	Peningkatan PHK	3	3	3

	Peningkatan kemiskinan	4	3	5
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	3	5
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	3	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	3	4
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	3	4
	Peningkatan biaya produksi di industri	4	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	3
	Penurunan daya beli masyarakat	4	3	4
	Peningkatan inflasi	3	3	3
	Peningkatan PHK	3	3	3
	Peningkatan kemiskinan	5	3	5
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	5	4	4
	Penyelewengan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4
Peningkatan harga kebutuhan pokok		4	3	5
Peningkatan pengeluaran masyarakat		4	3	3
Peningkatan biaya produksi di industri		4	4	3
Pengurangan jumlah karyawan di industri		3	3	4
Penurunan daya beli masyarakat		4	4	4
Peningkatan inflasi		3	3	3
Peningkatan PHK		3	3	3

	Peningkatan kemiskinan	4	4	5
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	4

Berdasarkan tabel 5.33. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,7, solar 3,3, dan minyak tanah 3,7. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 3,57. Nilai 3,57 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 5.34.

Tabel 5.34. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil
		Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha
		Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
2	Peningkatan inflasi	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil
		Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha

		Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
3	Peningkatan PHK	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil
		Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha
		Menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi

**Tabel 5.34. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi
(Lanjutan)**

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha
		Menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi
		Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha
		Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil	Pertumbuhan sektor riil

		Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Apabila pada saat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk kelima variabel adalah sama yaitu prioritas pertama menumbuhkan iklim usaha, prioritas kedua pertumbuhan sektor riil, dan prioritas ketiga adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah. Tindakan mitigasi berbeda dilakukan pada variabel peningkatan jumlah perusahaan likuidasi. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa peningkatan jumlah perusahaan likuidasi, maka tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah hanya satu yaitu penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

- Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi

- Probabilitas Sebelum Mitigasi

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 60%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 60%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 70%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 63%.

- Dampak Sebelum Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 80%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 80%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 100%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 87%.

- Probabilitas Sesudah Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 27%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 27%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 31%.

- Dampak Sesudah Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 27%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 27%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 31%.

5.3.2. Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan menanggulangi distorsi pada rantai pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

- a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 5.35.

**Tabel 5.35. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak
Pertahanan Keamanan**

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	3	2	4

Berdasarkan tabel 5.35 terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 3, solar 2, dan minyak tanah 4. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3. Nilai 3 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Tingkat keresahan masyarakat akan tinggi sekali bila yang dikurangi MTB (Minyak Tanah Bersubsidi). MTB merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan untuk BBM jenis solar, masyarakat tidak akan terlalu resah karena solar hanya digunakan untuk industri saja.

b. Dampak

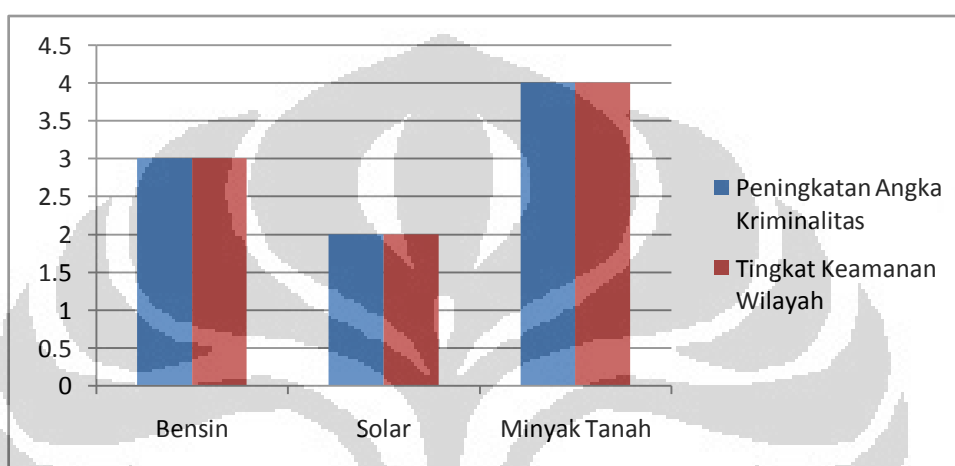
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 5.36.

**Tabel 5.36. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap
Dampak Pertahanan Keamanan**

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensi n	Solar	Minyak Tanah
1	Peningkatan angka	3	2	4

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensi n	Solar	Minyak Tanah
	keriminalitas			
2	Tingkat keamanan wilayah	3	2	4

Gambar 5.11. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 5.36. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 3, solar 2, dan minyak tanah 4. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3. Nilai 3 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam mengisi kuesioner dampak terhadap dampak pertahanan keamanan yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 5.37.

Tabel 5.37. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	3	2	4
	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	4
	Tingkat keamanan wilayah	3	2	4
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	3	2	4
	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	4
	Tingkat keamanan wilayah	3	2	4
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	2	2	2
	Peningkatan angka kriminalitas	2	2	2
	Tingkat keamanan wilayah	2	2	2
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	4	3	5
	Peningkatan angka kriminalitas	4	3	5
	Tingkat keamanan wilayah	4	3	5

Berdasarkan tabel 3.37. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 3, solar 2,25, dan minyak tanah 3,75. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3. Nilai 3 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden terhadap pengisian kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 5.38.

Tabel 3.38. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Memastikan keamanan posko BBM 2. Mencegah penyelewengan 3. Operasi pasar	1. Memastikan keamanan posko BBM 2. Mencegah penyelewengan 3. Operasi pasar	1. Memastikan keamanan posko BBM 2. Mencegah penyelewengan 3. Operasi pasar
2	Peningkatan angka kriminalitas	1. Memastikan keamanan posko BBM 2. Menindak tegas pelaku kriminal 3. Mencegah penyelewengan	1. Memastikan keamanan posko BBM 2. Menindak tegas pelaku kriminal 3. Mencegah penyelewengan	1. Memastikan keamanan posko BBM 2. Menindak tegas pelaku kriminal 3. Mencegah penyelewengan
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Memastikan keamanan posko BBM 2. Mencegah penyelewengan 3. Operasi pasar	1. Memastikan keamanan posko BBM 2. Mencegah penyelewengan 3. Operasi pasar	1. Memastikan keamanan posko BBM 2. Mencegah penyelewengan 3. Operasi pasar

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah sama, yaitu prioritas pertama adalah memastikan keamanan posko BBM, prioritas kedua mencegah penyelewengan

distribusi BBM bersubsidi, dan prioritas ketiga adalah melakukan operasi pasar dengan menjual BBM murah/bersubsidi.

5.3.3. Politik

Responden pada dampak politik adalah ahli yang diwakili oleh Kabid Hubungan Antar Lembaga dan Partai Politik, PemProv Kepulauan Riau dan Anggota DPRD Kota Batam. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 5.39.

Tabel 5.39. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PemPro v Riau	Anggota DPRD Batam	PemPro v Riau	Anggota DPRD Batam	PemPro v Riau	Anggota DPRD Batam
1	Gejolak Politik	2	4	2	4	4	4

Berdasarkan tabel 5.39. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,0, solar 3,0, dan minyak tanah 4,0.

Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 3,33. Nilai 3,33 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejolak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan menimbulkan gejolak politik karena kalangan elit politik akan menyuarakan aspirasi masyarakat jika distorsi tersebut berdampak pada masyarakat

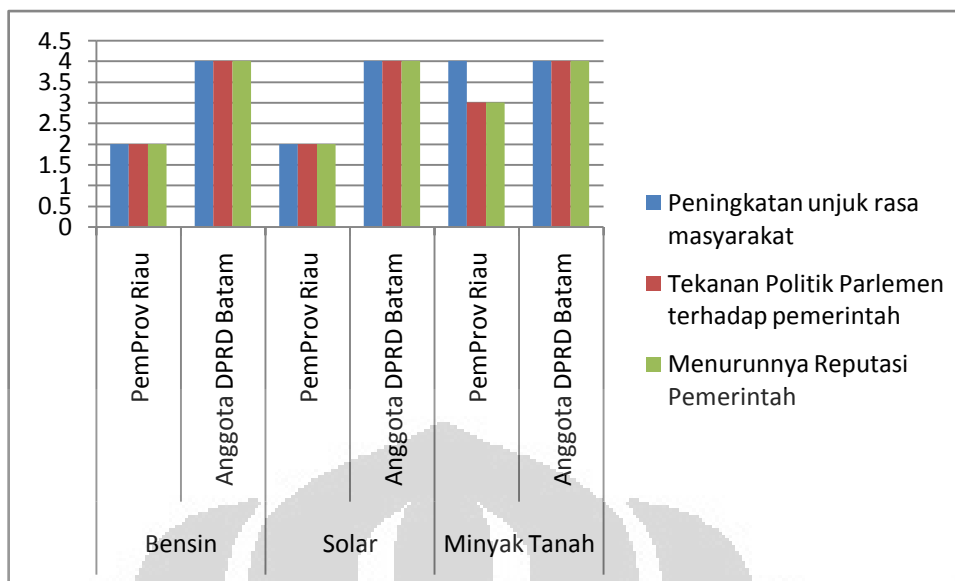
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 5.40.

Tabel 5.40. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PemPro v Riau	Anggot a DPRD Batam	PemPro v Riau	Anggot a DPRD Batam	PemPro v Riau	Anggot a DPRD Batam
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	2	4	2	4	4	4
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	2	4	2	4	3	4
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	2	4	2	4	3	4

Gambar 3.12 Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.40. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,0, solar 3,0, dan minyak tanah 3,63.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 3,22. Nilai 3,22 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Masyarakat pasti akan meminta Pemerintah menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi karena subsidi saat ini dirasa masih sangat kurang

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 5.41.

Tabel 5.41. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

		PemProv Riau	Anggota DPRD Batam	PemProv Riau	Anggota DPRD Batam	PemProv Riau	Anggota DPRD Batam
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	3	4	3	4	3	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	2	4	2	4	3	4
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	2	4	2	4	3	4
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	3	5	3	5	3	5
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	2	4	3	4	2	4
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	2	5	3	5	2	5
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	2	5	2	5	3	5
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	2	5	2	5	3	5
	Menurunnya Reputasi	2	5	2	5	3	5

	Pemerintah					
--	------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 5.41. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,38, solar 3,5, dan minyak tanah 3,63.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 3,63. Nilai 3,66 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.42.

Tabel 3.42. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	1. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Memberi BLT 3. Terapkan sistem kartu kendali	1. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Memberi BLT 3. Terapkan sistem kartu kendali	1. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Memberi BLT 3. Terapkan sistem kartu kendali
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Penanganan Segera 2. Hemat BBM 3. Tingkatkan pelayanan	1. Penanganan Segera 2. Hemat BBM 3. Tingkatkan pelayanan	1. Penanganan Segera 2. Hemat BBM 3. Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas,

mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

5.3.4. Sosial

Responden pada dampak sosial adalah ahli yang diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Batam, dan Kepala Bidang ESDM Pemerintah Kota Batam. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.43.

Tabel 3.43. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T 1	PEMKOT 2	PEMKO T 1	PEMKOT 2	PEMKO T 1	PEMKOT 2
1	Keresahan Masyarakat	4	5	3	4	5	5
2	Penolakan Masyarakat	5	5	4	4	5	5

Berdasarkan tabel 3.43. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,75, solar 3,75, dan minyak tanah 5,0. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 4,5. Nilai 4,5 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Masyarakat Batam khususnya yang berada di pesisir dan pulau-pulau akan resah jika volume minyak tanah bersubsidi sulit diperoleh karena kebanyakan mereka masih bergantung / menggunakan minyak tanah

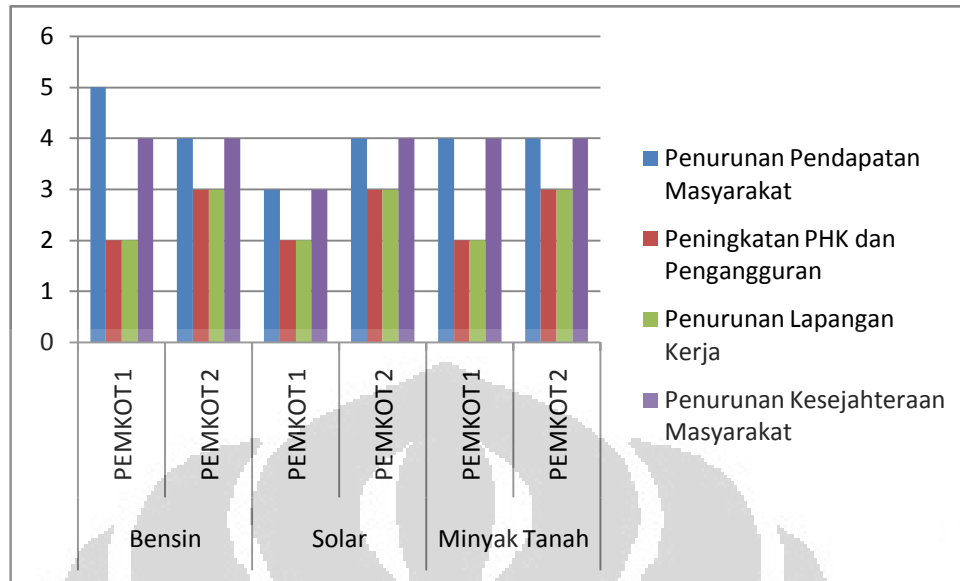
b. Dampak Sosial

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.44.

Tabel 3.44. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T 1	PEMKO T 2	PEMKO T 1	PEMKO T 2	PEMKO T 1	PEMKO T 2
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	5	4	3	4	4	4
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	2	3	2	3	2	3
3	Penurunan Lapangan Kerja	2	3	2	3	2	3
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	4	3	4	4	4

Gambar 3.44. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.44. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,37, solar 3,0, dan minyak tanah 3,25. Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 3,25. Nilai 3,25 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada rantai pasok BBM bersubsidi dirasa tidak berdampak signifikan terhadap turunnya pendapatan masyarakat karena umumnya solar hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar / industri-industri untuk menjalankan mesin-mesin produksi mereka
- Namun distorsi pada rantai pasok bensin dan minyak tanah bersubsidi akan berdampak besar terhadap penurunan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar mereka masih menggunakan bensin dan minyak tanah untuk berusaha / bekerja. Sehingga subsidi untuk bensin dan minyak tanah tetap diperlukan

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.45.

Tabel 3.45. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T 1	PEMKO T 2	PEMKO T 1	PEMKO T 2	PEMKO T 1	PEMKO T 2
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	4	5	3	4	5	5
	Penolakan Masyarakat	5	5	4	4	5	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	5	4	3	4	4	4
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	2	3	2	3	2	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	2	3	2	3	2	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	4	1	4	4	4
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	5	4	5	5	5
	Penolakan Masyarakat	5	5	4	5	5	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	3	4	4	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T 1	PEMKO T 2	PEMKO T 1	PEMKO T 2	PEMKO T 1	PEMKO T 2
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	3	2	3	2	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	3	2	3	2	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	4	3	4	3	4
Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	5	5	4	4	5	5
	Penolakan Masyarakat	5	5	4	4	5	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	3	4	4	5
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	4	3	5	3	4
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	4	3	4	3	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	4	4	4	4

Berdasarkan tabel 3.45. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,0, solar 3,47, dan minyak tanah 3,91.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 3,79. Nilai 3,79 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam penanggulangan terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Jika distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah jenis solar, maka masyarakat Batam tidak begitu resah karena yang menggunakan solar sebagian besar adalah perusahaan dan industri besar. Dan perusahaan atau industri di kota Batam tidak membeli BBM yang bersubsidi
- Jika penyelewengan atas BBM bersubsidi dilakukan oleh pemerintah atau pejabat terkait, maka masyarakat akan memberontak karena berarti subsidi BBM tidak dapat dirasakan oleh masyarakat

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.46

Tabel 3.43. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemat BBM 2. Mencari BBM alternatif 3. Tingkatkan pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 2. Hemat BBM 3. Mencari BBM alternatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemat BBM 2. Konversi ke gas 3. Mencari BBM alternatif
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemat BBM 2. Mencari BBM alternatif 3. Tingkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemat BBM 2. Mencari BBM alternatif 3. Tingkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemat BBM 2. Tingkatkan pelayanan 3. Batalkan

		pelayanan	pelayanan	
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	1. Penanggulangan 2. Hemat BBM 3. Tingkatkan pelayanan	1. Penanggulangan 2. Hemat BBM 3. Mencari BBM alternatif	1. Tingkatkan pelayanan 2. Hemat BBM 3. Mencari BBM alternatif
4	Pengurangan Lapangan Kerja	1. Hemat BBM 2. Tingkatkan pelayanan 3. Mencari BBM alternatif	6. Hemat BBM 7. Tingkatkan pelayanan 8. Mencari BBM alternatif	1. Hemat BBM 2. Tingkatkan pelayanan 3. Mencari BBM alternatif
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	9. Penanggulangan 10. Tingkatkan kualitas 11. Hemat BBM	1. Penanggulangan 2. Tingkatkan kualitas 3. Hemat BBM	1. Penanggulangan 2. Tingkatkan kualitas 3. Hemat BBM

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.4 Propinsi Lampung

3.1.4.1 Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi Lampung, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di kota Bandar Lampung. Pihak pemerintah dan

independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam penanggulangan terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Lampung, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Lampung, Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi Lampung.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.47.

Tabel 3.47. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	3	3	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	4	2
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	3	2
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	2	2	1

Berdasarkan tabel 3.47. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,2, solar 3,2, dan minyak tanah 1,3. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 2,67. Nilai 2,67 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan

pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner probabilitas terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

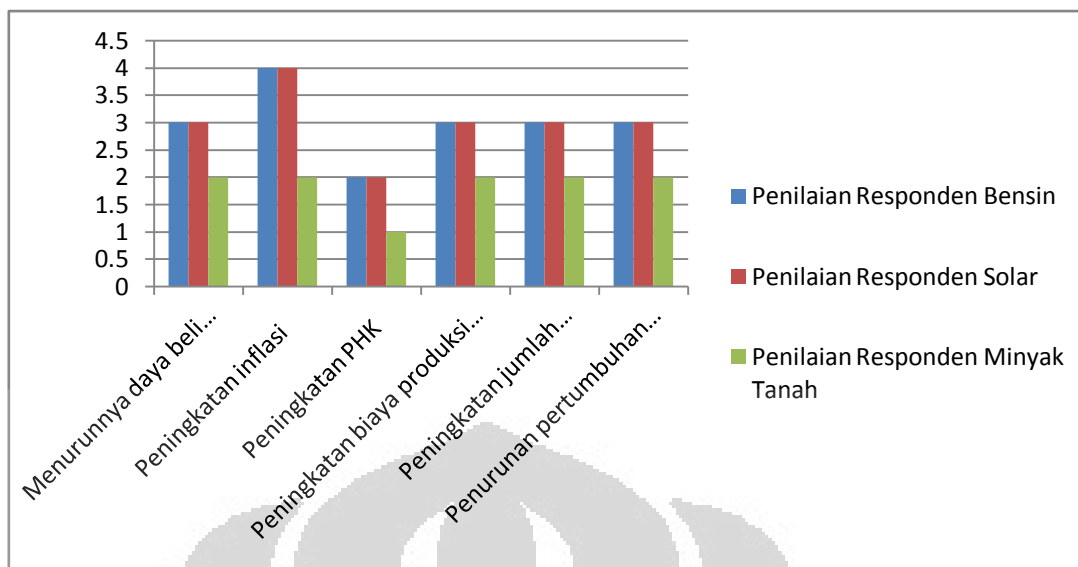
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.48.

Tabel 3.48. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	3	3	2
2	Peningkatan inflasi	4	4	2
3	Peningkatan PHK	2	2	1
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	3	2
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	3	3	2
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	2

Gambar 3.48. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 3.48. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3, solar 3, dan minyak tanah 1,83. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 2,61. Nilai 2,61 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner dampak terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.49.

Tabel 3.49. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	3	3	2
	Peningkatan	3	3	2

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	harga kebutuhan pokok			
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	3	3	2
	Peningkatan biaya produksi di industri	2	2	1
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	2	2	1
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	2
	Peningkatan inflasi	3	3	2
	Peningkatan PHK	2	3	2
	Peningkatan kemiskinan	2	3	2
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	2	3	2
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	3	3	2
	Peningkatan harga kebutuhan	3	3	2

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pokok			
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	3	2	2
	Peningkatan biaya produksi di industri	2	2	1
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	2	3	1
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	2
	Peningkatan inflasi	3	2	2
	Peningkatan PHK	2	2	1
	Peningkatan kemiskinan	2	2	1
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	2	2	1
Penyeleweangan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	2	2	1
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	2	2	1
	Peningkatan	2	2	1

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pengeluaran masyarakat			
	Peningkatan biaya produksi di industri	2	2	1
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	2	2	1
	Penurunan daya beli masyarakat	2	2	1
	Peningkatan inflasi	2	2	1
	Peningkatan PHK	2	2	1
	Peningkatan kemiskinan	2	2	1
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	2	2	1

Berdasarkan tabel 3.49. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,33, solar 2,4, dan minyak tanah 1,43. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 2,03. Nilai 2,06 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.50.

Tabel 3.50. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Pertumbuhan sektor riil	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Pertumbuhan sektor riil	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Pertumbuhan sektor riil
2	Peningkatan inflasi	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Pertumbuhan sektor riil	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Pertumbuhan sektor riil	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Pertumbuhan sektor riil
3	Peningkatan PHK	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	1. Tidak melakukan tindakan	1. Tidak melakukan tindakan	1. Tidak melakukan tindakan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	1. Tidak melakukan tindakan 2. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 3. Menanggulangi Distorsi BBM bersubsidi jenis Bensin	1. Tidak melakukan tindakan 2. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 3. Menanggulangi Distorsi BBM bersubsidi jenis Minyak Solar	1. Tidak melakukan tindakan 2. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 3. Menanggulangi Distorsi BBM bersubsidi jenis Minyak Tanah
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Pertumbuhan sektor riil	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Pertumbuhan sektor riil	1. Tidak melakukan tindakan 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Pertumbuhan sektor riil

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya pada penurunan daya beli masyarakat. Apabila pada saat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dapat menimbulkan dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah adalah sama yaitu prioritas pertama tidak melakukan tindakan, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas

ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

- **Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi**

- **Probabilitas Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 80%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 80%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 100%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 87%.

- **Dampak Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 40%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

- **Probabilitas Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 33%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 33%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 30%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 32%.

- **Dampak Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 27%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 27%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 20%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 24%.

3.1.4.2 Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menanggulangi terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM

bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.51.

Tabel 3.51. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	5	5	3

Berdasarkan tabel 3.51. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 5, solar 5, dan minyak tanah 3. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 4,33. Nilai 4,33 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Bensin dan solar sangat berpengaruh bila terjadi distorsi karena belum ada bahan bakar pengganti
- Kendaraan yang usianya lama perlu diganti dengan yang usianya baru karena kendaraan usia lama boros bahan bakar.

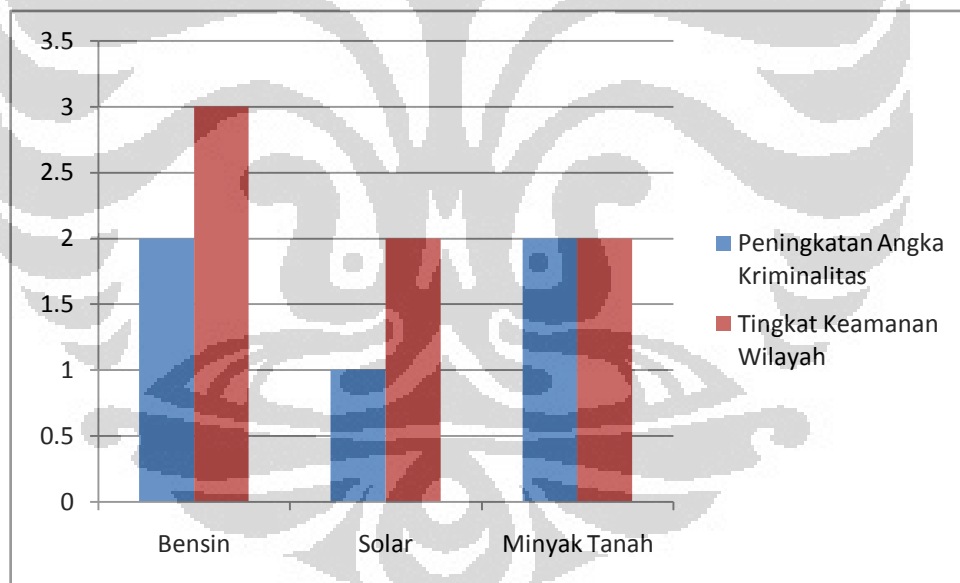
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.52.

Tabel 3.52. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Peningkatan angka kriminalitas	2	1	2
2	Tingkat keamanan wilayah	3	2	2

Gambar 3.52. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 3.52. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,5, solar 1,5, dan minyak tanah 2. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2. Nilai 2 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam mengisi kuesioner.

dampak terhadap dampak pertahanan keamanan yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.53.

Tabel 3.53. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	2	3	2
	Peningkatan angka kriminalitas	2	3	2
	Tingkat keamanan wilayah	2	3	2
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	2	2	2
	Peningkatan angka kriminalitas	2	2	2
	Tingkat keamanan wilayah	2	2	2

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	2	2	2
	Peningkatan angka kriminalitas	2	2	2
	Tingkat keamanan wilayah	2	2	2
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	2	2	2
	Peningkatan angka kriminalitas	2	2	2
	Tingkat keamanan wilayah	2	2	2

Berdasarkan tabel 3.53. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2, solar 2,25, dan minyak tanah 2. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,08. Nilai 2,08 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden terhadap pengisian kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.54.

Tabel 3.54. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi

terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi pasar 2. Mencegah penyelewengan 3. Memastikan keamanan posko BBM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penyelewengan 2. Memastikan keamanan posko BBM 3. Operasi pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan keamanan posko BBM 2. Mencegah penyelewengan 3. Operasi pasar
2	Peningkatan angka kriminalitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penyelewengan 2. Memastikan keamanan posko BBM 3. Membatalkan pengurangan volume bensin bersubsidi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penyelewengan 2. Memastikan keamanan posko BBM 3. Operasi pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penyelewengan 2. Memastikan keamanan posko BBM 3. Operasi pasar
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penyelewengan 2. Memastikan keamanan posko BBM 3. Operasi pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah penyelewengan • Memastikan keamanan posko BBM • Operasi pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan keamanan posko BBM 2. Mencegah penyelewengan 3. Operasi pasar

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dapat menimbulkan dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin prioritas pertama adalah melakukan operasi pasar dengan menjual BBM murah/bersubsidi, prioritas kedua mencegah penyelewengan distribusi BBM bersubsidi, dan prioritas ketiga adalah memastikan keamanan posko BBM. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk solar prioritas pertama adalah mencegah

penyelewengan distribusi BBM bersubsidi, prioritas kedua adalah memastikan keamanan posko BBM, dan prioritas ketiga adalah melakukan operasi pasar dengan menjual BBM murah/bersubsidi. Sedangkan tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk minyak tanah prioritas pertama adalah memastikan keamanan posko BBM, prioritas kedua adalah mencegah penyelewengan distribusi BBM bersubsidi, dan prioritas ketiga adalah melakukan operasi pasar dengan menjual BBM murah/bersubsidi.

3.1.4.3 Politik

Responden pada dampak politik adalah ahli dari akademisi yang diwakili oleh Kasubag Umum Pemerintah Kota Lampung dan ahli dari akademisi yang diwakili oleh dosen pasca sarjana UNILA. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.55.

Tabel 3.55. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PemProv Lampun g	Akademi si	PemProv Lampun g	Akademi si	PemProv Lampun g	Akademi si
1	Gejolak Politik	4	3	4	3	2	4

Berdasarkan tabel 3.55. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,5, solar 3,5, dan minyak tanah 3,0.

Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 3,33. Nilai 3,33 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejala politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan menimbulkan gejala politik karena kalangan elit politik akan menyuarakan aspirasi masyarakat jika distorsi tersebut berdampak pada masyarakat

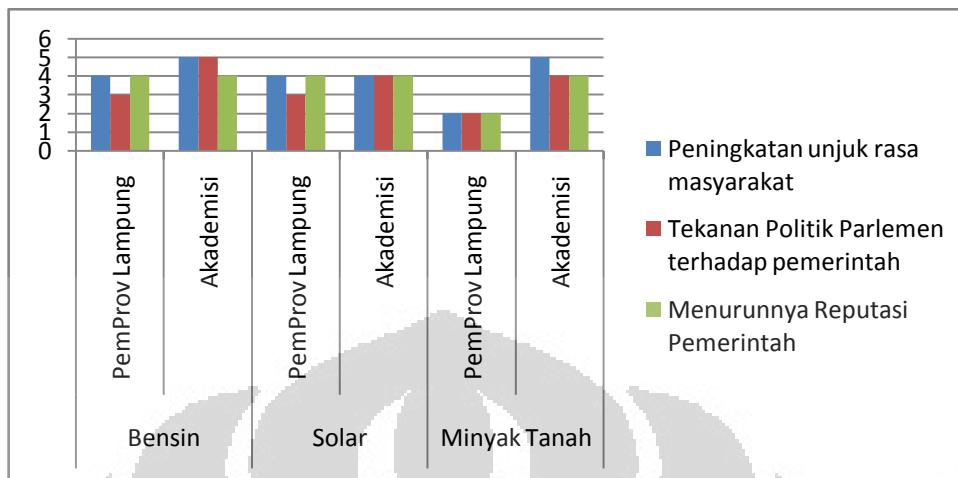
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.53.

Tabel 3.53. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PemProv Lampun g	Akademi si	PemProv Lampun g	Akademi si	PemProv Lampun g	Akademi si
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	4	5	4	4	2	5
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	5	3	4	2	4
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	4	4	4	2	4

Gambar 3.53. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.53. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,16, solar 3,83, dan minyak tanah 3,13.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 3,71. Nilai 3,71 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.57.

Tabel 3.57. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PemProv Lampung	Akademisi	PemProv Lampung	Akademisi	PemProv Lampung	Akademi si
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	4	5	4	4	3	5
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	5	3	4	3	4
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	4	4	4	3	4
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	4	5	4	4	3	5
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	4	3	4	3	5
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	4	4	4	3	4
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	3	5	2	4	3	4
	Tekanan Politik Parlemen	3	4	2	4	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PemProv Lampung	Akademisi	PemProv Lampung	Akademisi	PemProv Lampung	Akademi si
	terhadap pemerintah						
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	3	5	2	5	3	5

Berdasarkan tabel 3.47 terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,0, solar 3,61, dan minyak tanah 3,63.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 3,75. Nilai 3,75 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.58.

Tabel 3.58. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Memberi BLT 3. Hemat BBM	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Memberi BLT 3. Hemat BBM	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Memberi BLT 3. Hemat BBM

2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Batalkan 2. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 3. Memberi BLT	1. Batalkan 2. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 3. Memberi BLT	1. Batalkan 2. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 3. Memberi BLT
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.4.4 Sosial

Responden pada dampak sosial adalah ahli dari akademisi yang diwakili oleh Lektor Kepala Universitas Lampung dan ahli dari Kabag Kemasyarakatan Pemerintah Kota Lampung. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.59.

Tabel 3.59. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T LAMPU NG	AKADE MISI	PEMKO T LAMPU NG	AKADE MISI	PEMKO T LAMPU NG	AKADE MISI
1	Keresahan Masyarakat	3	4	4	4	3	4
2	Penolakan Masyarakat	3	4	3	4	3	4

Berdasarkan tabel 3.59. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,5, solar 3,75, dan minyak tanah 3,5.

Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 3,58. Nilai 3,58 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Masyarakat akan meminta Pemerintah untuk segera menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi karena melihat kondisi ekonomi Indonesia yang masih krisis dan belum membaik

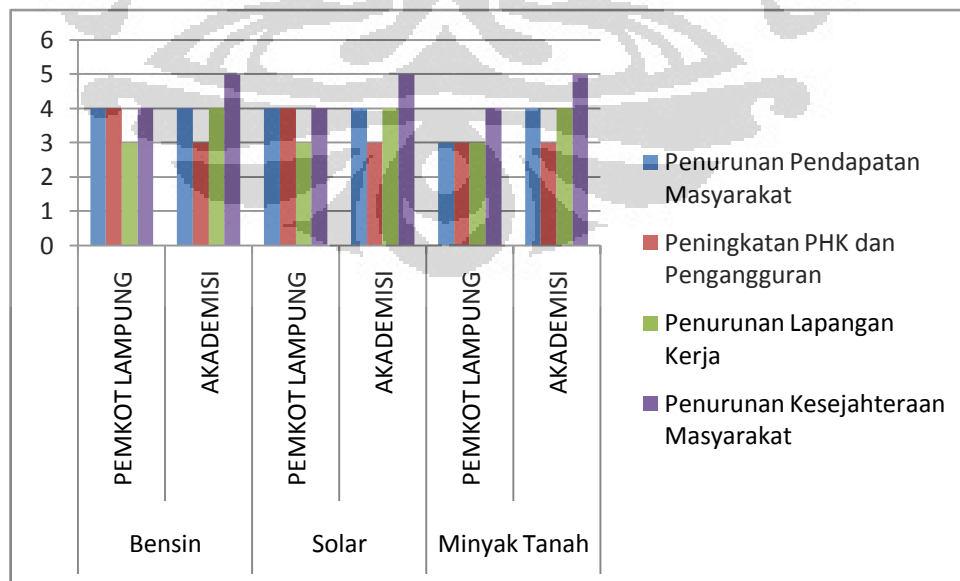
b. *Dampak Sosial*

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.50.

Tabel 3.60. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T LAMPUN G	AKADE MISI	PEMKO T LAMPUN G	AKADE MISI	PEMKO T LAMPUN G	AKADE MISI
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	4	4	3	4
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	3	4	3	3	3
3	Penurunan Lapangan Kerja	3	4	3	4	3	4
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	4	5	4	5

Gambar 3.60. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.60. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,87, solar 3,87, dan minyak tanah 3,62.

Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 3,78. Nilai 3,78 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.61.

Tabel 3.61. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T LAMPU NG	AKADE MISI	PEMKO T LAMPU NG	AKADE MISI	PEMKO T LAMPU NG	AKADE MISI
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	3	4	3	4	3	4
	Penolakan Masyarakat	4	4	3	4	3	4
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	3	4	4	4	3	4
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	3	3	3	3	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	4	4	4	3	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T LAMPU NG	AKADE MISI	PEMKO T LAMPU NG	AKADE MISI	PEMKO T LAMPU NG	AKADE MISI
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	4	5	3	5
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	2	4	3	4	4	5
	Penolakan Masyarakat	3	5	3	5	4	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	2	3	2	4	2	4
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	3	2	3	2	4
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	4	2	4	2	4
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	3	4	2	4	2	4
Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	5	3	5	4	5
	Penolakan Masyarakat	4	5	2	5	2	5

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T LAMPUNG	AKADE MISI	PEMKO T LAMPUNG	AKADE MISI	PEMKO T LAMPUNG	AKADE MISI
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	2	4	2	4
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	3	2	4	2	4
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	4	2	4	2	4
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	2	5	4	5

Berdasarkan tabel 3.61. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,75, solar 3,41, dan minyak tanah 3,52.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 3,53. Nilai 3,56 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Jika distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tidak segera ditanggulangi, masyarakat kecil berpenghasilan rendah dan tidak tetap akan merasakan dampaknya karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.62.

Tabel 3.62. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	4. Penanggulangan 5. Mencari BBM alternatif 6. Tingkatkan pelayanan	7. Penanggulangan 1. Mencari BBM alternatif 2. Tingkatkan pelayanan	8. Penanggulangan 1. Mencari BBM alternatif 2. Hemat BBM
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	9. Penanggulangan 1. Mencari BBM alternatif 2. Tingkatkan pelayanan	4. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 5. Memberi BLT 6. Tingkatkan pelayanan	10. Penanggulangan 4. Konversi ke gas 5. Mencari BBM alternatif
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 5. Memberi BLT 6. Terapkan sistem kartu kendali	1. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 2. Mencari BBM alternatif 3. Hemat BBM	4. Mencari BBM alternatif 5. Konversi ke gas 6. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)
4	Pengurangan Lapangan Kerja	11. Penanggulangan 4. Hemat BBM	12. Penanggulangan 7. Hemat BBM	13. Penanggulangan 9. Hemat BBM

		5. Mencari BBM alternatif	8. Mencari BBM alternatif	10. Konversi ke gas
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	12. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 13. Memberi BLT 14. Terapkan sistem kartu kendali	11. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 12. Memberi BLT 13. Terapkan sistem kartu kendali	e. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) f. Memberi BLT g. Terapkan sistem kartu kendali

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

2.1.5 Propinsi Maluku

3,1.5.1 Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi Maluku, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di kota Ambon. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak,

sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Maluku, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Ambon. Kota Ambon digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Maluku, Ambon merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi Maluku.

a. *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.63.

Tabel 3.63. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	2	2	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	3	2	3
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	3	2	3
4	Peningkatan biaya produksi industri	4	4	4
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	4	4	4

Berdasarkan tabel 3.63. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,2, solar 2,8, dan minyak tanah 2,8. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 2,93. Nilai 2,93 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan

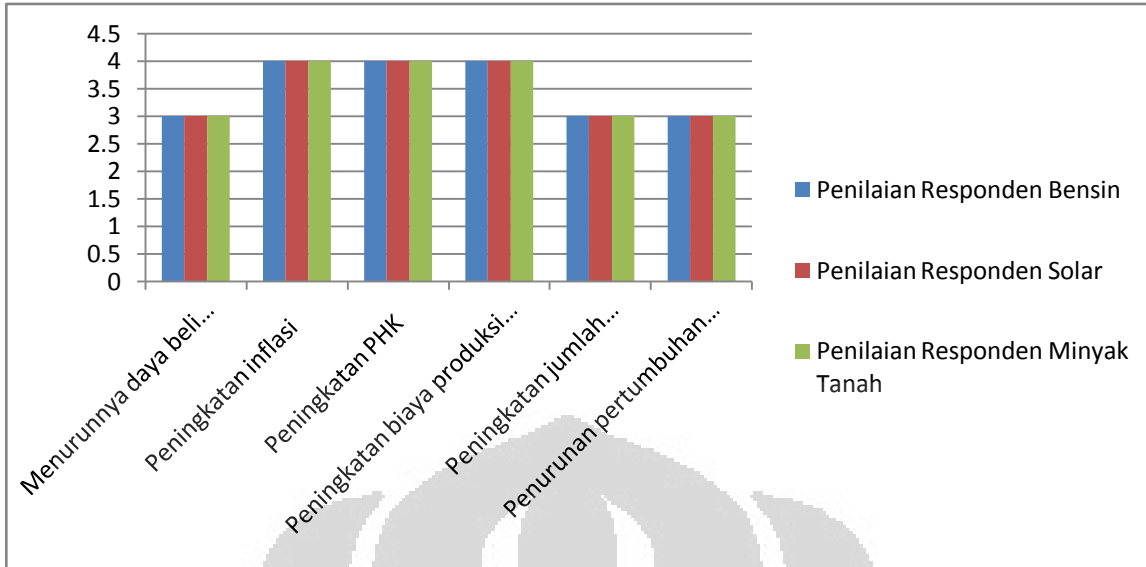
pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner probabilitas terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.64.

Tabel 3.64. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	3	3	3
2	Peningkatan inflasi	4	4	4
3	Peningkatan PHK	4	4	4
4	Peningkatan biaya produksi industri	4	4	4
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	3	3	3
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	3



Gambar 3.64. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

Berdasarkan tabel 3.64. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,5, solar 3,5, dan minyak tanah 3,5. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner dampak terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.65.

Tabel 3.65. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya	2	2	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	transportasi			
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	2	2	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	3	2	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	4	2	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	2	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	2	3
	Peningkatan inflasi	3	2	3
	Peningkatan PHK	3	2	3
	Peningkatan kemiskinan	4	2	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	2	3
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	3	2	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	3	2	3
	Peningkatan pengeluaran	3	2	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	masyarakat			
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	2	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	2	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	2	3
	Peningkatan inflasi	3	2	3
	Peningkatan PHK	3	2	3
	Peningkatan kemiskinan	3	2	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	2	3
Penyelewengan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	2	2	2
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	2	2	2
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	2	2	2
	Peningkatan biaya produksi di industri	2	2	2
	Pengurangan jumlah karyawan	2	2	2

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	di industri			
	Penurunan daya beli masyarakat	2	2	2
	Peningkatan inflasi	2	2	2
	Peningkatan PHK	2	2	2
	Peningkatan kemiskinan	2	2	2
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	2	2	2

- Berdasarkan tabel 3.65. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,67, solar 2, dan minyak tanah 2,67. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 2,44. Nilai 2,44 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.63.

Tabel 3.63. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	Tidak melakukan tindakan	Tidak melakukan tindakan	Tidak melakukan tindakan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
2	Peningkatan inflasi	Menumbuhkan iklim usaha	Tidak melakukan tindakan	Operasi pasar
3	Peningkatan PHK	Tidak melakukan tindakan	Tidak melakukan tindakan	Tidak melakukan tindakan
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	Tidak melakukan tindakan	Tidak melakukan tindakan	Sosialisasi bahan pengganti minyak tanah
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Tidak melakukan tindakan	Tidak melakukan tindakan	Tidak melakukan tindakan
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Tidak melakukan tindakan	Tidak melakukan tindakan	Tidak melakukan tindakan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya pada penurunan daya beli masyarakat. Apabila pada saat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dapat menimbulkan dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah adalah sama yaitu tidak melakukan tindakan.

- **Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi**

- **Probabilitas Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 80%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 80%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 80%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 80%.

- **Dampak Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 93%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 93%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 100%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 96%.

- **Probabilitas Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 27%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 27%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 20%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 24%.

o Dampak Sesudah Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 27%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 27%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 20%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 24%.

1.3.5.1. Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh. kepolisian, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.67.

Tabel 3.67. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	5	3	5

Berdasarkan tabel 3.67. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 5, solar 3, dan minyak tanah 5. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 4,33. Nilai 4,33 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden pada saat mengisi kuesioner probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

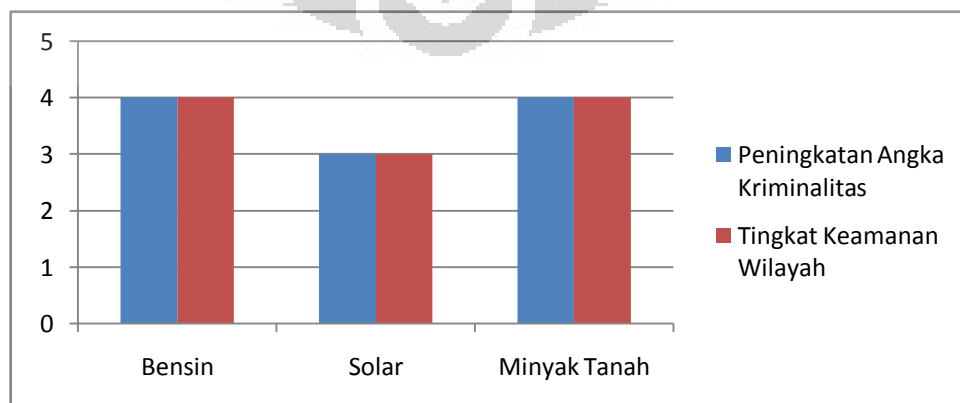
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.68.

Tabel 3.68. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Peningkatan angka kriminalitas	4	3	4
2	Tingkat keamanan wilayah	4	3	4

Gambar 3.68. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 3.68. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 3, dan minyak tanah 4. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3,67. Nilai 3,67 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam mengisi kuesioner dampak terhadap dampak pertahanan keamanan yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.69.

Tabel 3.69. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	5	4	5
	Peningkatan angka kriminalitas	5	4	5
	Tingkat keamanan wilayah	5	4	5
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	5	5	5
	Peningkatan angka kriminalitas	5	4	5
	Tingkat	5	4	5

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	keamanan wilayah			
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	5	5	5
	Peningkatan angka kriminalitas	5	5	5
	Tingkat keamanan wilayah	5	5	5
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	5	4	5
	Peningkatan angka kriminalitas	5	4	5
	Tingkat keamanan wilayah	5	4	5

Berdasarkan tabel 3.69. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 5, solar 4,33, dan minyak tanah 5. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 4,78. Nilai 4,78 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden terhadap pengisian kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.70.

**Tabel 3.70. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi
terhadap Dampak Pertahanan Keamanan**

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Membatalkan pengurangan volume bensin bersubsidi 2. Mencegah penyelewengan penggunaan BBM 3. Operasi pasar	Membatalkan pengurangan volume bensin bersubsidi Mencegah penyelewengan penggunaan BBM Operasi pasar	1. Membatalkan pengurangan volume bensin bersubsidi 2. Memastikan keamanan posko BBM
2	Peningkatan angka kriminalitas	1. Membatalkan pengurangan volume bensin bersubsidi 2. Mencegah penyelewengan penggunaan BBM 3. Operasi pasar	1. Membatalkan pengurangan volume bensin bersubsidi 2. Mencegah penyelewengan penggunaan BBM 3. Operasi pasar	1. Membatalkan pengurangan volume bensin bersubsidi 2. Memastikan keamanan posko BBM
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Membatalkan pengurangan volume bensin bersubsidi 2. Mencegah penyelewengan penggunaan BBM 3. Memastikan keamanan posko BBM	1. Membatalkan pengurangan volume bensin bersubsidi 2. Memastikan keamanan posko BBM 3. Mencegah penyelewengan penggunaan BBM	1. Membatalkan pengurangan volume bensin bersubsidi 2. Mencegah penyelewengan penggunaan BBM 3. Memastikan keamanan posko BBM

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dapat menimbulkan dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin dan solar prioritas pertama adalah penanggulangan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, prioritas kedua mencegah penyelewengan distribusi BBM bersubsidi, dan prioritas ketiga adalah melakukan operasi pasar dengan menjual BBM murah/bersubsidi. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk minyak tanah prioritas pertama adalah segera menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dan prioritas kedua adalah memastikan keamanan posko BBM.

1.3.5.2. Politik

Responden pada dampak politik adalah ahli dari akademisi yang diwakili oleh Pemerintah Kota Maluku Tengah dan pakar sosial dari akademisi. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan menanggulangi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.71.

Tabel 3.71. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO	AKADE	PEMKO	AKADE	PEMKO	AKADE

		T MALUK U	MISI	T MALUK U	MISI	T MALUK U	MISI
1	Gejolak Politik	4	4	4	3	3	5

Berdasarkan tabel 3.71. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,0, solar 3,5, dan minyak tanah 4,0.

Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 3,83. Nilai 3,83 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejolak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan menimbulkan gejolak politik karena kalangan elit politik akan menyuarakan aspirasi masyarakat jika distorsi tersebut berdampak pada masyarakat

b. Dampak

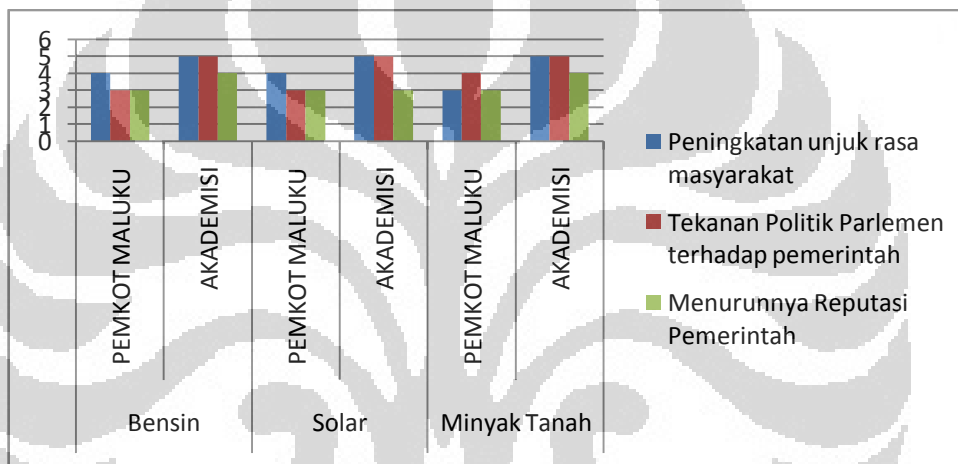
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.72.

Tabel 3.72. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	4	5	4	5	3	5
2	Tekanan Politik	3	5	3	5	4	5

	Parlemen terhadap pemerintah						
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	3	4	3	3	3	4

Gambar 3.72. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.72. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,0, solar 3,83, dan minyak tanah 4,0.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 3,94. Nilai 3,94 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup

- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.73.

Tabel 3.73. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	2	4	2	3	3	5
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	4	3	3	2	5
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	3	4	3	3	3	5
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	2	5	2	5	3	5
	Tekanan Politik Parlemen terhadap	3	5	3	5	3	5

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI
	pemerintah						
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	3	5	3	5	3	5
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	4	5	2	5	4	5
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	5	3	5	3	5
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	3	5	3	5	3	5

Berdasarkan tabel 3.73. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,77, solar 3,5, dan minyak tanah 4,0.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 3,75. Nilai 3,75 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.74.

Tabel 3.74. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasiterhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Basiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Basiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Konversi ke gas
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Basiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Basiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Basiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Basiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Basiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Basiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

1.3.5.3. Sosial

Responden pada dampak sosial adalah pakar sosial dari Pemerintah Kota Maluku Tengah dan pakar sosial dari akademisi. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.75.

Tabel 3.75. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI
1	Keresahan Masyarakat	5	1	4	2	5	1
2	Penolakan Masyarakat	4	3	3	3	4	4

Berdasarkan tabel 3.75. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,25, solar 3,0, dan minyak tanah 3,5.

Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 3,25. Nilai 3,25 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Masyarakat akan menolak distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi karena melihat kondisi ekonomi Indonesia yang masih krisis dan belum membaik

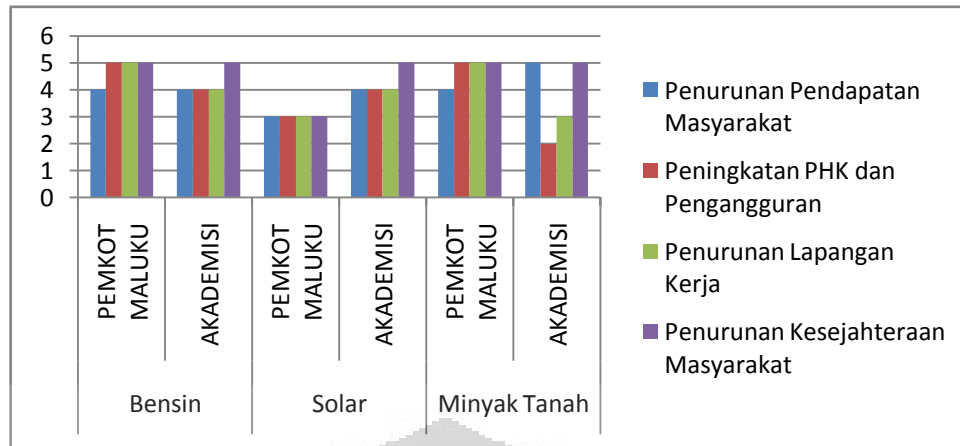
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.73.

Tabel 3.73. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	3	4	4	5
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	5	4	3	4	5	2
3	Penurunan Lapangan Kerja	5	4	3	4	5	3
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	5	5	3	5	5	5

Gambar 3.73. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.73. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,5, solar 3,62, dan minyak tanah 4,25.

Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 4,12. Nilai 4,12 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.77.

Tabel 3.77. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T MALUKU U	AKADE MISI	PEMKO T MALUKU U	AKADE MISI	PEMKO T MALUKU U	AKADE MISI
		Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	5	4	4	4
	Penolakan Masyarakat	5	3	4	3	5	5
	Penurunan Pendapatan	5	5	3	4	5	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI
	Masyarakat						
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	5	4	4	3	5	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	5	4	4	4	5	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	5	5	3	4	5	5
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	5	4	4	4	5	5
	Penolakan Masyarakat	5	5	4	4	5	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	5	5	4	3	5	5
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	5	4	4	4	5	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	5	4	4	3	5	4
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	3	4	5	5
Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	5	5	4	4	5	5
	Penolakan	5	5	4	4	5	5

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI	PEMKO T MALUK U	AKADE MISI
	Masyarakat						
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	5	4	4	4	5	4
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	5	3	4	5	5	4
	Pengurangan Lapangan Kerja	5	4	3	5	5	4
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	3	5	5	5

Berdasarkan tabel 3.77. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,61, solar 3,83, dan minyak tanah 3,13.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 3,83. Nilai 3,86 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Jika distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tetap terjadi , masyarakat kecil berpenghasilan rendah dan tidak tetap akan merasakan dampaknya karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi

- Jika distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tetap terjadi, maka hendaknya dilakukan penanganan dengan segera.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.78.

Tabel 3.78. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	1. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 2. Mencari BBM alternatif 3. Memberi BLT	4. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 5. Mencari BBM alternatif 6. Memberi BLT	7. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 8. Mencari BBM alternatif 9. Memberi BLT
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	10. Batalkan 11. Mencari BBM alternatif 12. Tingkatkan pelayanan	13. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 14. Memberi BLT 15. Tingkatkan pelayanan	16. Batalkan 17. Konversi ke gas 18. Mencari BBM alternatif
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	19. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	22. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 23. Mencari BBM	25. Mencari BBM alternatif 26. Konversi ke gas 27. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa,

		20. Memberi BLT 21. Terapkan sistem kartu kendali	alternatif 24. Hemat BBM	Kesehatan, Pinjaman lunak)
4	Pengurangan Lapangan Kerja	28. Batalkan 29. Hemat BBM 30. Mencari BBM alternatif	31. Batalkan 32. Hemat BBM 33. Mencari BBM alternatif	34. Batalkan 35. Hemat BBM 36. Konversi ke gas
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	37. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 38. Memberi BLT 39. Terapkan sistem kartu kendali	40. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 41. Memberi BLT 42. Terapkan sistem kartu kendali	43. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 44. Memberi BLT 45. Terapkan sistem kartu kendali

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.6 Propinsi Jawa Tengah

3.1.6.1 Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi Jawa Tengah, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat) di kota Banyumas. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Jawa Tengah, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Banyumas. Kota Banyumas digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Jawa Tengah, Banyumas merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi Jawa Tengah.

a. *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.70

Tabel 3.70. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	5	5	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	5	5	4
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	5
4	Peningkatan biaya produksi industri	5	5	5
5	Pengurangan jumlah karyawan di	3	3	3

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	industri			

Berdasarkan tabel 3.70. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,4, solar 4,4, dan minyak tanah 4,25. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 4,35. Nilai 4,35 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner probabilitas terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

b. Dampak

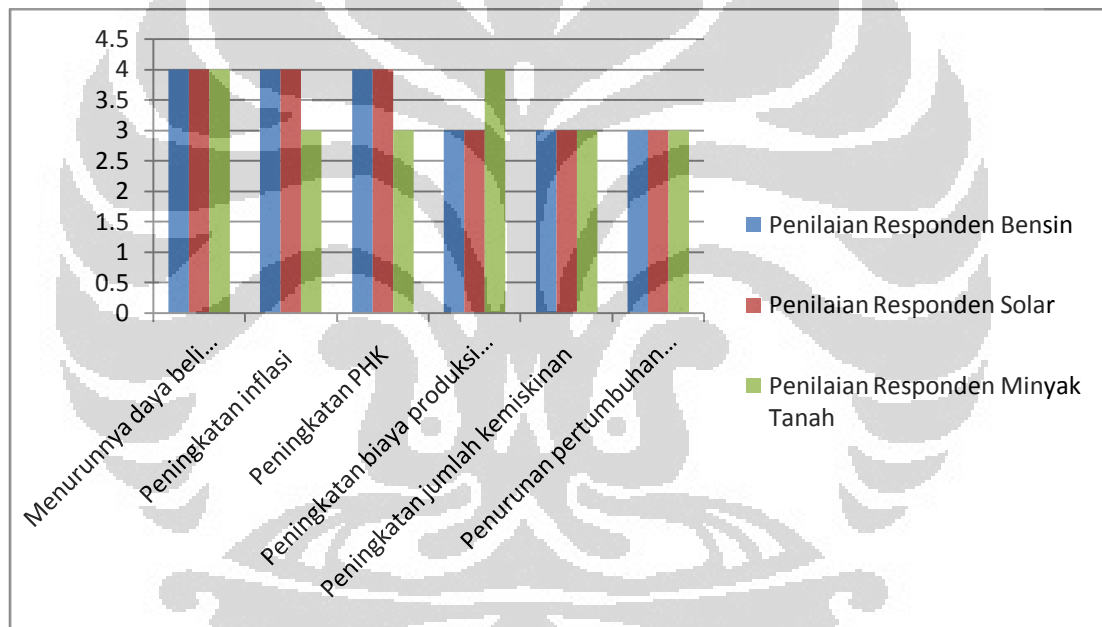
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.80.

Tabel 3.80. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	4	4	4
2	Peningkatan inflasi	4	4	3
3	Peningkatan PHK	4	4	3
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	3	4

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	3	3	3
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	3

Gambar 3.80. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 3.80. terlihat bahwa distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,5, solar 3,5, dan minyak tanah 3,3. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,4. Nilai 3,4 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat distorsi pada

Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner dampak terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.81.

abel 3.81. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	5	5	1
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	5	3	4
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	5	4	5
	Peningkatan biaya produksi di industri	5	5	5
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	4	4
	Peningkatan inflasi	4	3	3
	Peningkatan PHK	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	Peningkatan kemiskinan	3	3	5
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	3
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	5	5	2
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	3	2
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	3	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	5	3	4
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	4
	Penurunan daya beli masyarakat	4	3	4
	Peningkatan inflasi	3	3	4
	Peningkatan PHK	3	3	4
	Peningkatan kemiskinan	3	3	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	3
Penyelewengan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	3		2
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	3		3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	3	3	4
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	3	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	3	3	3
	Peningkatan PHK	3	3	3
	Peningkatan kemiskinan	3	3	3
	Penurunan pertumbuhan	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	ekonomi			

Berdasarkan tabel 3.81. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,53, solar 3,27, dan minyak tanah 3,33. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 3,38. Nilai 3,38 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.82

Tabel 3.82. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	Menumbuhkan iklim usaha	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
2	Peningkatan inflasi	Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
3	Peningkatan PHK	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
5	Penurunan	Meningkatkan	Menumbuhkan	Meningkatkan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pertumbuhan ekonomi	pertumbuhan sektor riil	iklim usaha	pertumbuhan sektor riil
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Menumbuhkan iklim usaha	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya pada penurunan daya beli masyarakat. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin adalah menumbuhkan iklim usaha, sedangkan untuk solar dan minyak tanah adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

- **Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi**

- **Probabilitas Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 60%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 60%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 80%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 67%.

- **Dampak Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 93%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 93%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 80%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 89%.

- **Probabilitas Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 20%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 20%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 20%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 20%.

- **Dampak Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 20%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 20%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 20%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 20%.

3.1.6.2 Pertahanan dan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan untuk menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.83.

Tabel 3.83. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Keresahan masyarakat	3	5	2	4	3	4

Berdasarkan tabel 3.83. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 3, dan minyak tanah 3,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat

terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Ketergantungan masyarakat terhadap bensin dan minyak tanah lebih besar dibandingkan dengan solar karena mayoritas masyarakat Indonesia berada di interval menengah ke bawah.

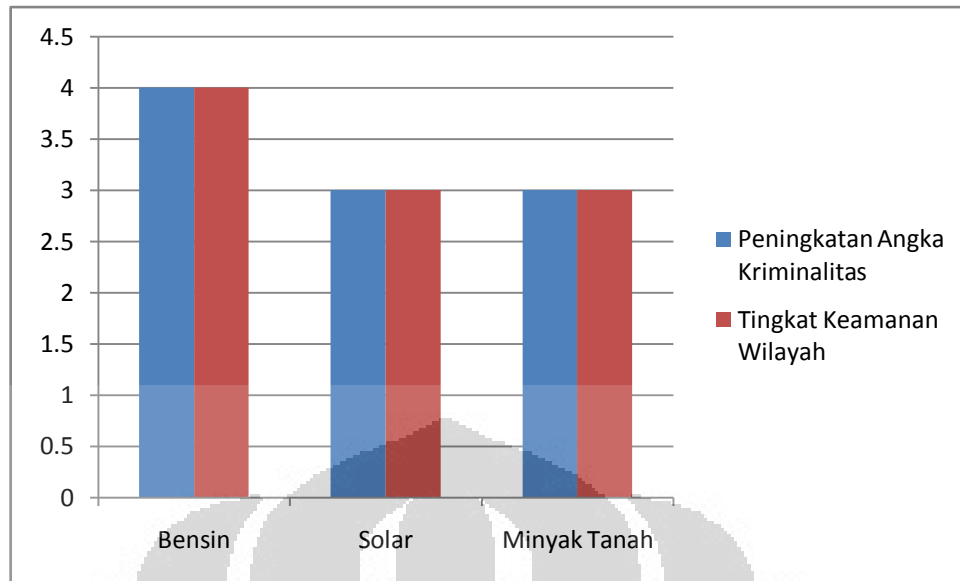
b. *Dampak*

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.84.

Tabel 3.84. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	3	1	3	4
2	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4

Gambar 3.84. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 3.84. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,75, solar 2,25, dan minyak tanah 3,75. Rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,92. Nilai 2,92 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pengaruh keamanan wilayah dan kriminalitas lebih condong disebabkan minyak tanah karena minyak tanah banyak digunakan dalam masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.85.

**Tabel 3.85. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko
terhadap Dampak Pertahanan Keamanan**

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	4	3	4	2	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	2	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	4	2	4	3	4	2

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	3	1	2
	Tingkat keamanan wilayah	4	1	4	3	4	1

Berdasarkan tabel 3.85. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,83, solar 2,83, dan minyak tanah 3,21. Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,93. Nilai 2,96 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dalam mengisi kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.83.

Tabel 3.83. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Operasi pasar

2	Peningkatan angka kriminalitas	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah prioritas pertama adalah sosialisasi pengurangan subsidi BBM ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, prioritas kedua adalah mencegah terjadinya penyelewengan pada saat distribusi bensin, solar, dan minyak tanah. Prioritas ketiga untuk bensin dan solar adalah membatalkan pengurangan volume bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan prioritas ketiga pada minyak tanah adalah melakukan operasi pasar dengan menjual minyak tanah murah/bersubsidi.

3.1.6.3 Politik

Hasil kuesioner dampak politik diperoleh dari responden yang berasal dari BPS dan Akademisi. Kedua responden perlu diambil agar survei dapat memberikan hasil yang obyektif dan proporsional sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam menentukan kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei

dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.87.

Tabel 3.87. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		BPS	Akademi si	BPS	Akademi si	BPS	Akademi si
1	Gejolak Politik	4	3	4	3	2	3

Berdasarkan tabel 3.87. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,5, solar 3,5, dan minyak tanah 2,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 3,13.

Nilai 3,16 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejolak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

b. Dampak

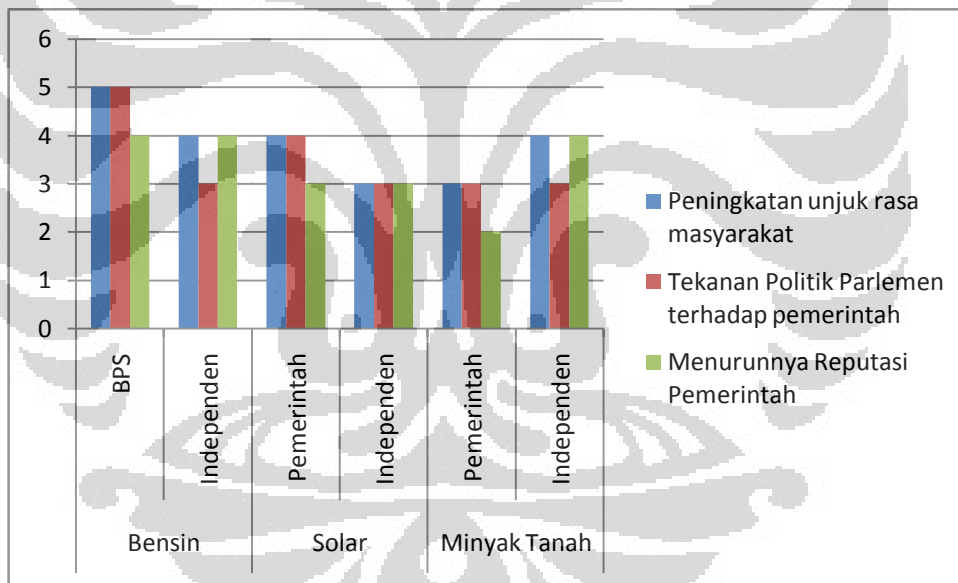
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.88.

Tabel 3.88. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		BPS	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan unjuk rasa	5	4	4	3	3	4

	masyarakat						
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	5	3	4	3	3	3
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	4	3	3	2	4

Gambar 3.78. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.78 terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,16, solar 3,33, dan minyak tanah 3,13.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 3,55. Nilai 3,55 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.89.

Tabel 3.89. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		BPS	Akademi si	BPS	Akademi si	BPS	Akademi si
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	4	4	4	4	2	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	4	3	4	3	3	3
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	2	4	2	2	2
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	4	3	4	4	3	4
	Tekanan Politik	4	3	4	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		BPS	Akademi si	BPS	Akademi si	BPS	Akademi si
	Parlemen terhadap pemerintah						
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	4	4	4	3	4
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	4	4	4	4	3	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	4	3	4	3	3	3
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	4	4	4	3	4

Berdasarkan tabel 3.89. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,66, solar 3,72, dan minyak tanah 3,11.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 3,49. Nilai 3,49 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.90.

Tabel 3.90. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Konversi ke gas
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM),

menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.6.4 Sosial

Hasil kuesioner dampak sosial diperoleh dari responden yang berasal dari BPS dan Akademisi. Kedua responden perlu diambil agar survei dapat memberikan hasil yang obyektif dan proporsional sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam menentukan kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.91.

Tabel 3.91. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		BPS	Akademisi	BPS	Akademisi	BPS	Akademisi
1	Keresahan Masyarakat	3	4	3	3	2	2
2	Penolakan Masyarakat	5	4	3	2	4	2

Berdasarkan tabel 3.91. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 2,75, dan minyak tanah 2,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 3,0. Nilai 3,0 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akan hilang atau berkurang apabila dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi disertai dengan langkah-langkah yang dapat meringankan beban hidup mereka seperti pemberian kompensasi bantuan sosial berupa BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM.

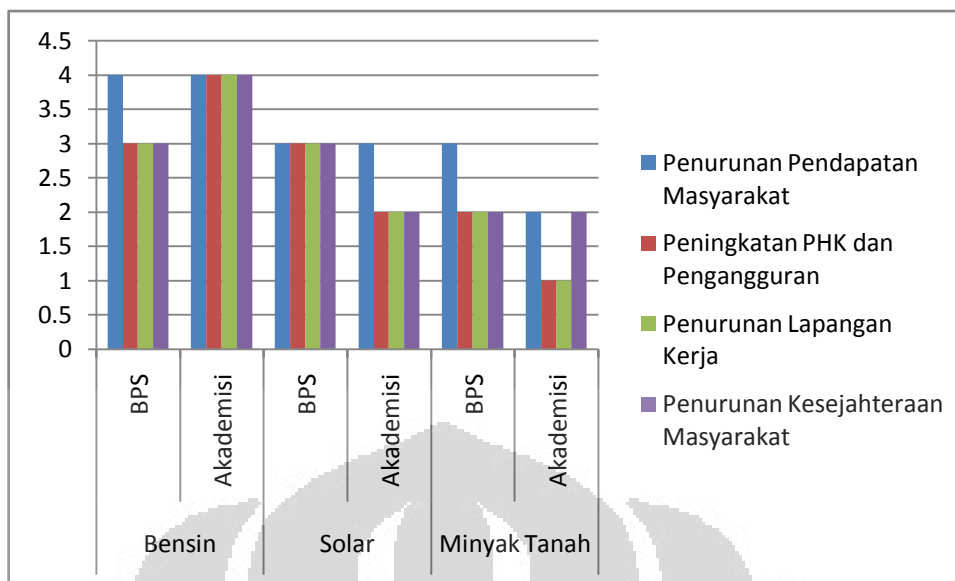
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.82.

Tabel 3.82. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		BPS	Akademi si	BPS	Akademi si	BPS	Akademi si
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	3	3	3	2
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	4	3	2	2	1
3	Penurunan Lapangan Kerja	3	4	3	2	2	1
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	3	4	3	2	2	2

Gambar 3.92. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.92. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,62, solar 2,62, dan minyak tanah 1,87. Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 2,70. Nilai 2,70 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Apabila dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tidak disertai dengan pemberian kompensasi bantuan sosial, maka yang akan lebih merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke bawah

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.93.

Tabel 3.93. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

		BPS	Akademi si	BPS	Akademi si	BPS	Akademi si
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	4	4	3	3	3	2
	Penolakan Masyarakat	5	4	4	2	3	2
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	3	4	3	3	2	2
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	4	4	2	2	1
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	4	3	2	2	1
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	3	4	3	2	2	2
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	3	4	3	3	3	2
	Penolakan Masyarakat	4	4	4	2	3	2
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	3	4	3	3	2	2
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	4	3	2	2	1
	Pengurangan Lapangan	3	4	3	2	2	1

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		BPS	Akademi si	BPS	Akademi si	BPS	Akademi si
	Kerja						
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	3	4	3	2	2	2
Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	5	4	5	3	5
	Penolakan Masyarakat	5	5	5	5	3	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	3	3	3	2	2	3
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	3	3	2	2	2
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	3	3	2	2	2
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	3	4	3	2	2	2

Berdasarkan tabel 3.93. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,66, solar 2,94, dan minyak tanah 2,25.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 2,25. Nilai 2,25 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah rendah.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Propinsi Jawa Tengah telah melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg sehingga minyak tanah bersubsidi secara bertahap dikurangi. Dengan demikian dampak sosial akan berkurang juga.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.94

Tabel 3.94. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	14. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 15. Hemat BBM 16. Mencari BBM alternatif	4. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 5. Hemat BBM 6. Mencari BBM alternatif	4. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 5. Hemat BBM 6. Konversi ke gas
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 5. Memberi BLT 6. Tingkatkan pelayanan	7. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 8. Memberi BLT 9. Tingkatkan pelayanan	6. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 7. Memberi BLT 8. Tingkatkan pelayanan
3	Peningkatan PHK	7. Memberi	4. Memberi	7. Memberi

	dan Pengangguran	kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 8. Memberi BLT 9. Tingkatkan pelayanan	kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 5. Memberi BLT 6. Tingkatkan pelayanan	kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 8. Memberi BLT 9. Tingkatkan pelayanan
4	Pengurangan Lapangan Kerja	6. Batalkan 7. Hemat BBM 8. Mencari BBM alternatif	10. Batalkan 11. Hemat BBM 12. Mencari BBM alternatif	13. Batalkan 14. Hemat BBM 15. Konversi ke gas
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	15. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 16. Memberi BLT 17. Terapkan sistem kartu kendali	16. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 17. Memberi BLT 18. Terapkan sistem kartu kendali	e. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) f. Memberi BLT g. Terapkan sistem kartu kendali

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.7 Propinsi Jawa Timur

3.1.7.1 Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di kota Kediri. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Jawa Timur, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Kediri. Kota Kediri digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Jawa Timur, Kediri merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi Jawa Timur.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.95

Tabel 3.95. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	4	4	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	3	3
3	Peningkatan pengeluaran	4	3	2

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	masyarakat			
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	4	2
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	2

Berdasarkan tabel 3.95. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,6, solar 3,6, dan minyak tanah 2,25. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 3,15. Nilai 3,15 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner probabilitas terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

b. Dampak

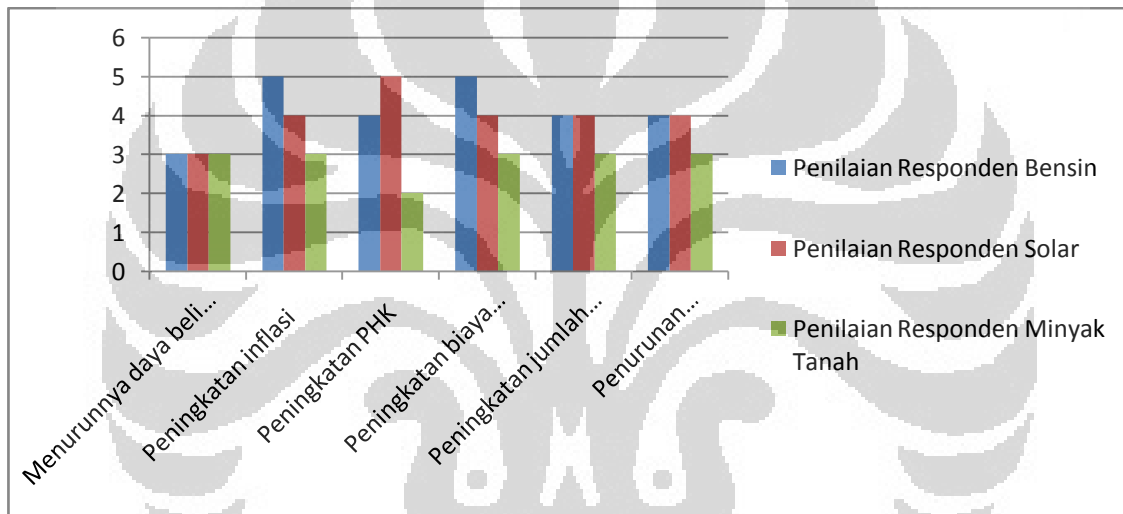
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.93.

Tabel 3.93. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	3	3	3
2	Peningkatan inflasi	5	4	3
3	Peningkatan PHK	4	5	2
4	Peningkatan biaya	5	4	3

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	produksi industri			
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	4	4	3
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3

Gambar 3.93. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 3.93. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,17, solar 4, dan minyak tanah 2,83. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,67. Nilai 3,67 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner dampak terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.97.

Tabel 3.97. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	2
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	4	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	4	5	3
	Peningkatan PHK	3	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	5	4	3
	Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4
Peningkatan harga kebutuhan		4	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pokok			
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	4	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	4	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	4	4	3
	Peningkatan inflasi	4	4	3
	Peningkatan PHK	4	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3
Penyelewengan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	3	3	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	3	3	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	3	3	3
	Peningkatan biaya produksi di	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	industri			
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	3	3	3
	Peningkatan PHK	3	3	3
	Peningkatan kemiskinan	3	3	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	3

Berdasarkan tabel 3.97. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,57, solar 3,67, dan minyak tanah 2,97. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 3,4. Nilai 3,4 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.98

Tabel 3.98. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	1. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	1. Menumbuhkan iklim usaha 2. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 3. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
2	Peningkatan inflasi	1. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 2. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 3. Menumbuhkan iklim usaha	1. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	1. Menumbuhkan iklim usaha 2. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 3. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
3	Peningkatan PHK	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	1. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	1. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Menumbuhkan iklim usaha Membatalkan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha	1. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 2. Menumbuhkan iklim usaha 3. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya pada penurunan daya beli masyarakat. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk

bensin prioritas pertama adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah. Tindakan mitigasi untuk solar prioritas pertama adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Sedangkan untuk minyak tanah prioritas pertama adalah menumbuhkan iklim usaha, prioritas kedua adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

- **Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi**

- **Probabilitas Sebelum Mitigasi**

- Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 87%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 87%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 100%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 91%.

- **Dampak Sebelum Mitigasi**

- Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 87%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 87%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 100%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 91%.

- **Probabilitas Sesudah Mitigasi**

- Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 60%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 53%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 51%.

- **Dampak Sesudah Mitigasi**

- Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 60%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 53%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada

3.1.7.2 Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat

yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.99.

Tabel 3.99. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Keresahan masyarakat	3	5	2	4	3	4

Berdasarkan tabel 3.99. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 3, dan minyak tanah 3,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Ketergantungan masyarakat terhadap bensin dan minyak tanah lebih besar dibandingkan dengan solar karena mayoritas masyarakat Indonesia berada di interval menengah ke bawah.

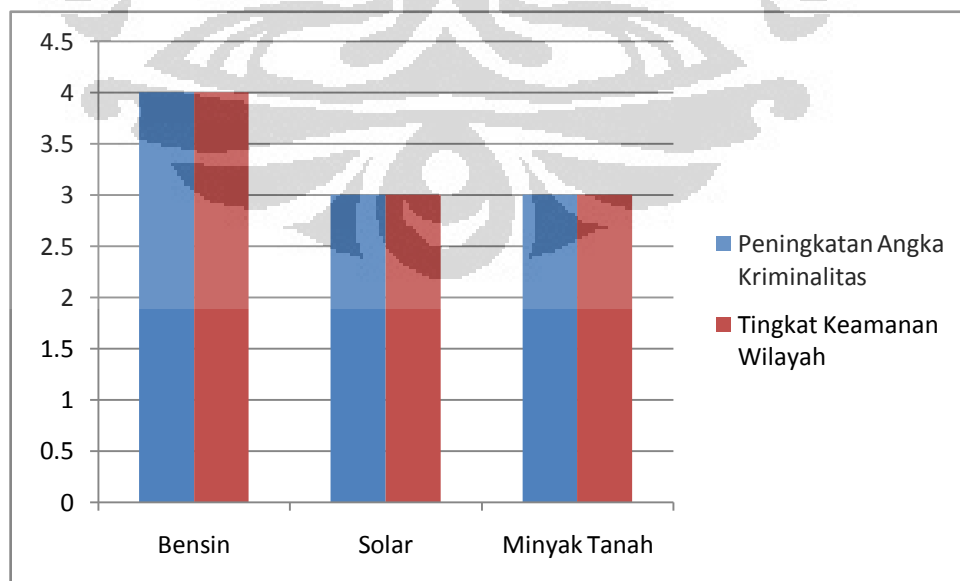
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.100.

Tabel 3.100. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	3	1	3	4
2	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4

Gambar 3.100. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 3.100. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,75, solar 2,25, dan minyak tanah 3,75. Rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,92. Nilai 2,92 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pengaruh keamanan wilayah dan kriminalitas lebih condong disebabkan minyak tanah karena minyak tanah banyak digunakan dalam masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.101.

Tabel 3.101. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kebutuhan	Keresahan masyarakat	4	3	4	2	4	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
masyarakat	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	2	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	4	2	4	3	4	2
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	3	1	2
	Tingkat keamanan wilayah	4	1	4	3	4	1

Berdasarkan tabel 3.101. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,83, solar 2,83, dan minyak tanah 3,21. Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,93. Nilai 2,96 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan

akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dalam mengisi kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.102.

Tabel 3.102. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Operasi pasar
2	Peningkatan angka kriminalitas	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah prioritas pertama adalah sosialisasi pengurangan subsidi BBM ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, prioritas kedua

adalah mencegah terjadinya penyelewengan pada saat distribusi bensin, solar, dan minyak tanah. Prioritas ketiga untuk bensin dan solar adalah membatalkan pengurangan volume bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan prioritas ketiga pada minyak tanah adalah melakukan operasi pasar dengan menjual minyak tanah murah/bersubsidi.

3.1.7.3 Politik

Responden pada dampak politik adalah ahli dari pemerintah yang diwakili oleh Kabid PKS BAKESBANGPOLLINMAS dan dari independen yang diwakili oleh Dosen Fak. Hukum, Universitas Brawijaya. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.103.

Tabel 3.103. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI
1	Gejolak Politik	3	4	1	4	1	3

Berdasarkan tabel 3.103. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.5, solar 2.5, dan minyak tanah 2.0. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 2.63.

Nilai 2.66 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejolak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan menimbulkan gejolak politik karena kalangan elit politik akan menyuarakan aspirasi masyarakat jika pengurangan tersebut berdampak pada masyarakat

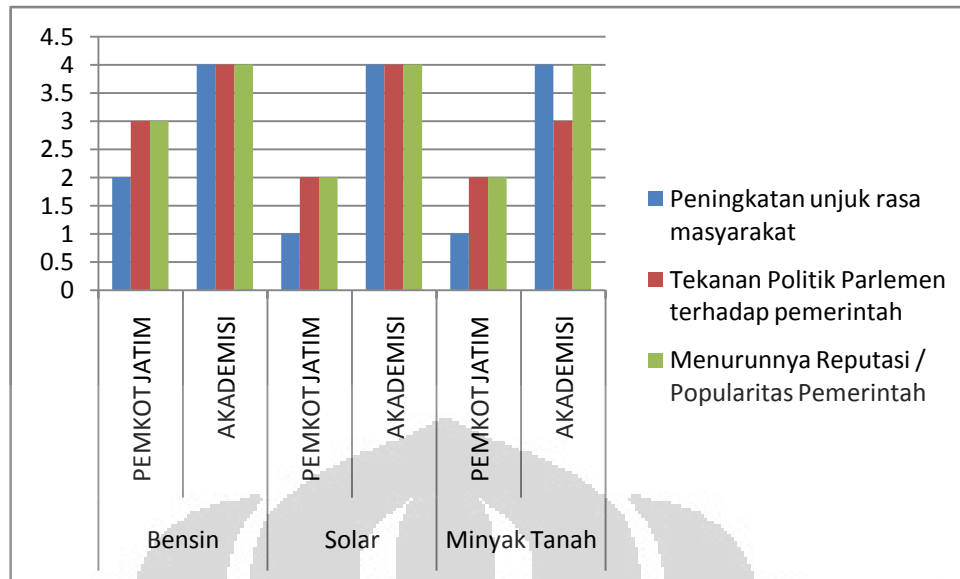
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.93.

Tabel 3.104. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKOT JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	2	4	1	4	1	4
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	4	2	4	2	3
3	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	3	4	2	4	2	4

Gambar 3.104. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.104. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.33, solar 2.83, dan minyak tanah 2.63.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 2.94. Nilai 2.94 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.105.

**Tabel 3.105. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko
terhadap Dampak Politik**

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	2	4	1	3	1	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	4	2	3	2	4
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	3	4	2	3	2	4
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	2	4	1	4	1	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	4	2	3	1	4
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	2	4	2	4	1	4
Kemiskinan / Turunnya	Unjuk rasa masyarakat	2	2	1	2	1	2

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI
kesejahteraan masyarakat	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	2	4	2	4	1	4
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	2	4	2	4	1	4

Berdasarkan tabel 3.105. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.05, solar 2.5, dan minyak tanah 2.5.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 2.68. Nilai 2.68 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah rendah.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.103.

Tabel 3.103. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Konversi ke gas

		Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan
3	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.7.4 Sosial

Responden pada dampak sosial adalah ahli dari pemerintah yang diwakili oleh Kasi Bantuan dan Perlindungan Masyarakat dan dari independen yang diwakili oleh Dosen Sosiologi Universitas Islam Kediri. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan terjadinya duntuk menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.107.

Tabel 3.107. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI
1	Keresahan Masyarakat	4	5	3	3	4	4
2	Penolakan Masyarakat	4	5	3	4	3	5

Berdasarkan tabel 3.107. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.5, solar 3.25, dan minyak tanah 4.0. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 3,91. Nilai 3,91 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Masyarakat akan menolak terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi karena melihat kondisi ekonomi Indonesia yang masih krisis dan belum membaik

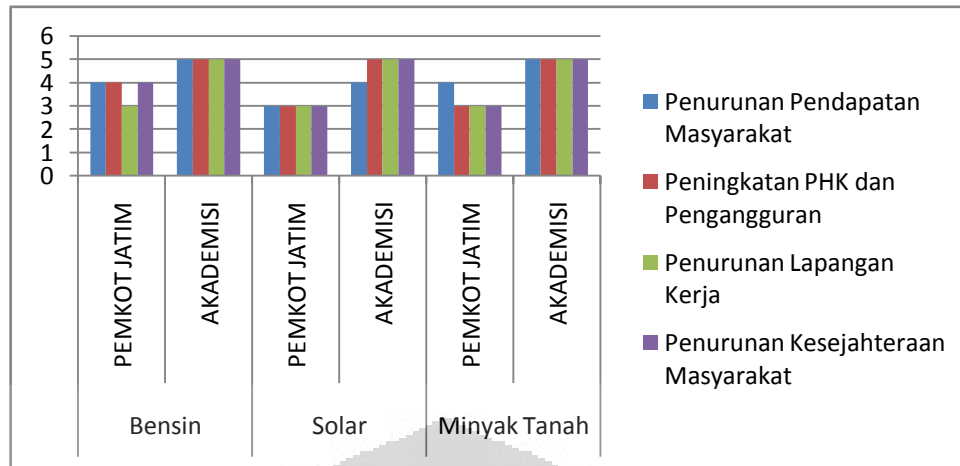
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.108.

Tabel 3.108. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	5	3	4	4	5
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	5	3	5	3	5
3	Penurunan Lapangan Kerja	3	5	3	5	3	5
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	3	5	3	5

Gambar 3.108. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.108. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.37, solar 3.87, dan minyak tanah 4.12. Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 4.12. Nilai 4.12 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.109.

Tabel 3.109. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	4	5	3	5	4	3
	Penolakan Masyarakat	5	5	3	5	4	3
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	5	3	5	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	5	3	5	3	4
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	5	3	5	3	4
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	3	5	3	4
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	5	3	5	4	5
	Penolakan Masyarakat	4	5	3	5	4	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	5	3	5	3	5
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	5	3	5	3	5
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	5	3	5	3	5
	Penurunan Kesejahteraan	4	5	3	5	3	5

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI	PEMKO T JATIM	AKADE MISI
	Masyarakat						
Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	5	3	5	4	5
	Penolakan Masyarakat	4	5	3	5	4	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	5	3	5	3	5
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	5	3	5	3	5
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	5	3	5	3	5
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	3	5	3	5

Berdasarkan tabel 3.109. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.5, solar 4.0, dan minyak tanah 3.91.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 4.13. Nilai 4.13 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Propinsi Jawa Timur telah melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg sehingga minyak tanah bersubsidi secara bertahap dikurangi. Dengan demikian dampak sosial akan berkurang juga.
- Jika distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tetap terjadi, masyarakat kecil berpenghasilan rendah dan tidak tetap akan merasakannya karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi
- Jika tetap terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, maka hendaknya dilakukan secara segera penanganannya.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.110.

Tabel 3.110. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	9. Batalkan 10. Hemat BBM 11. Mencari BBM alternatif	7. Batalkan 8. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 9. Mencari BBM alternatif	7. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 8. Hemat BBM 9. Konversi ke gas
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 5. Memberi BLT 6. Tingkatkan pelayanan	7. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 8. Memberi BLT 9. Tingkatkan pelayanan	9. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 10. Memberi BLT 11. Tingkatkan pelayanan

3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	10. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 11. Memberi BLT 12. Tingkatkan pelayanan	7. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 8. Memberi BLT 9. Tingkatkan pelayanan	10. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 11. Memberi BLT 12. Tingkatkan pelayanan
4	Pengurangan Lapangan Kerja	12. Batalkan 13. Hemat BBM 14. Mencari BBM alternatif	10. Batalkan 11. Hemat BBM 12. Mencari BBM alternatif	13. Batalkan 14. Hemat BBM 15. Konversi ke gas
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	18. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 19. Memberi BLT 20. Terapkan sistem kartu kendali	16. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 17. Memberi BLT 18. Terapkan sistem kartu kendali	e. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) f. Memberi BLT g. Terapkan sistem kartu kendali

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.8 Provinsi Jawa Barat

3.1.8.1 Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi Jawa Barat, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Jawa Barat. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Jawa Barat, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Bandung. Kota Bandung digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Jawa Barat, Bandung merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi Jawa Barat.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.103

Tabel 3.111. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	4	4	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	3	3
3	Peningkatan pengeluaran	4	3	2

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	masyarakat			
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	4	2
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	2

Berdasarkan tabel 3.111. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,6, solar 3,6, dan minyak tanah 2,25. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 3,15. Nilai 3,15 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner probabilitas terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

b. Dampak

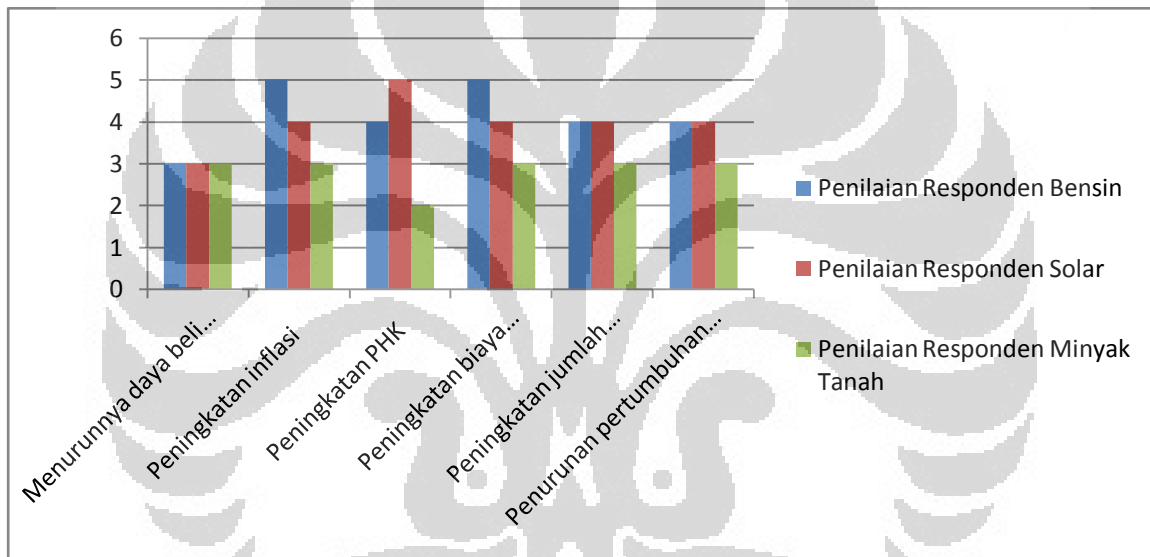
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.112.

Tabel 3.112. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	3	3	3
2	Peningkatan inflasi	5	4	3
3	Peningkatan PHK	4	5	2
4	Peningkatan biaya	5	4	3

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	produksi industri			
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	4	4	3
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3

Gambar 3.112. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 3.112. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,17, solar 4, dan minyak tanah 2,83. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,67. Nilai 3,67 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner dampak terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.113.

Tabel 3.113. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	2
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	4	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	4	5	3
	Peningkatan PHK	3	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan	5	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pertumbuhan ekonomi			
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	4	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	4	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	4	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	4	4	3
	Peningkatan inflasi	4	4	3
	Peningkatan PHK	4	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Penyelewengan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	3	3	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	3	3	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	3	3	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	3	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	3	3	3
	Peningkatan PHK	3	3	3
	Peningkatan kemiskinan	3	3	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	3

Berdasarkan tabel 3.113. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,57, solar 3,67, dan minyak tanah 2,97. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 3,4. Nilai 3,4 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.114.

Tabel 3.114. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	4. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 5. Menumbuhkan iklim usaha 6. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	4. Menumbuhkan iklim usaha 5. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 6. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
2	Peningkatan inflasi	4. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 5. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 6. Menumbuhkan	4. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 5. Menumbuhkan iklim usaha 6. Mempermudah pencairan anggaran	4. Menumbuhkan iklim usaha 5. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 6. Meningkatkan pertumbuhan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		n iklim usaha	pemerintah	sektor riil
3	Peningkatan PHK	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	4. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 5. Menumbuhkan iklim usaha 6. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	4. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 5. Menumbuhkan iklim usaha 6. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Membatalkan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Meningkatkan	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	4. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 5. Menumbuhkan iklim usaha 6. Mempermudah pencairan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		pertumbuhan sektor riil	Menumbuhkan iklim usaha	anggaran pemerintah
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya pada penurunan daya beli masyarakat. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin prioritas pertama adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah. Tindakan mitigasi untuk solar prioritas pertama adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Sedangkan untuk minyak tanah prioritas pertama adalah menumbuhkan iklim usaha, prioritas kedua adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

Kompilasi dan Pengolahan Data Ekonomi

3.2 Probabilitas Sebelum Mitigasi

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 80%. Hasil pengolahan

data untuk solar adalah 80%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 80%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 80%.

3.3 Dampak Sebelum Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 80%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 80%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 80%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 80%.

3.4 Probabilitas Sesudah Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 53%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

3.5 Dampak Sesudah Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 53%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

6.3.8.2. Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.115.

Tabel 3.115. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Keresahan masyarakat	3	5	2	4	3	4

Berdasarkan tabel 3.115. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 3, dan minyak tanah 3,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Ketergantungan masyarakat terhadap bensin dan minyak tanah lebih besar dibandingkan dengan solar karena mayoritas masyarakat Indonesia berada di interval menengah ke bawah.

b. Dampak

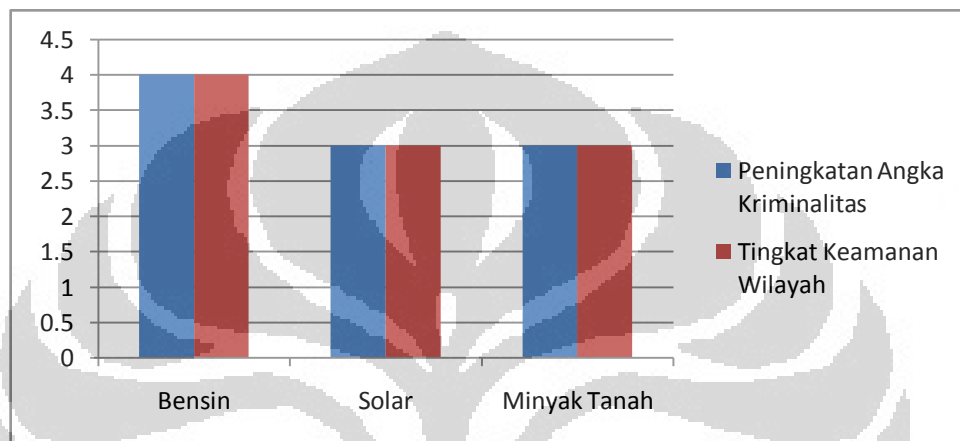
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.113.

Tabel 3.113. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan angka	3	2	3	1	3	4

	kriminalitas						
2	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4

Gambar 3.113. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 3.113. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,75, solar 2,25, dan minyak tanah 3,75. Rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,92. Nilai 2,92 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pengaruh keamanan wilayah dan kriminalitas lebih condong disebabkan minyak tanah karena minyak tanah banyak digunakan dalam masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.117.

Tabel 3.117. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko

terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	4	3	4	2	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	2	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	4	2	4	3	4	2
	Peningkatan	1	3	1	3	1	2

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
	angka kriminalitas						
	Tingkat keamanan wilayah	4	1	4	3	4	1

Berdasarkan tabel 3.117. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,83, solar 2,83, dan minyak tanah 3,21. Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,93. Nilai 2,96 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dalam mengisi kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.118

Tabel 3.118. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Operasi pasar
2	Peningkatan angka	1. Penegakan hukum	1. Penegakan	1. Penegakan hukum

	kriminalitas	2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah prioritas pertama adalah sosialisasi pengurangan subsidi BBM ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, prioritas kedua adalah mencegah terjadinya penyelewengan pada saat distribusi bensin, solar, dan minyak tanah. Prioritas ketiga untuk bensin dan solar adalah membatalkan pengurangan volume bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan prioritas ketiga pada minyak tanah adalah melakukan operasi pasar dengan menjual minyak tanah murah/bersubsidi.

6.8.3.3. Politik

Hasil kuesioner dampak politik diperoleh dari responden yang berasal dari Pemerintah dan Akademisi. Kedua responden perlu diambil agar survei dapat memberikan hasil yang obyektif dan proporsional sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam menentukan kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas,

dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.119.

Tabel 3.119. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Linmas	Akademi si	Linmas	Akademi si	Linmas	Akademi si
1	Gejolak Politik	4	4	4	4	4	4

Berdasarkan tabel 3.119. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.0, solar 4.0, dan minyak tanah 4.0.

Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 4.0. Nilai 4.0 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejolak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

b. Dampak

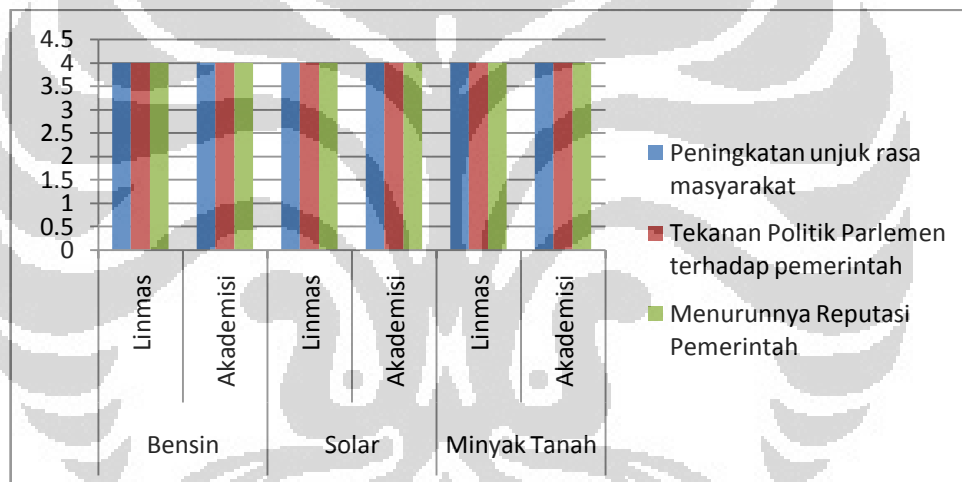
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.120.

Tabel 3.120. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Linmas	Akademi si	Linmas	Akademi si	Linmas	Akademi si
1	Peningkatan	4	4	4	4	4	4

	unjuk rasa masyarakat						
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	4	4	4	4	4	4
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	4	4	4	4	4

Gambar 3.120. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.120. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.0, solar 4.0, dan minyak tanah 4.0.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 4.0. Nilai 4.0 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

C. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.121.

Tabel 3.121. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Linmas	Akademi si	Linmas	Akademi si	Linmas	Akademi si
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	4	4	4	4	4	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	4	4	4	4	4	4
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	4	4	4	4	4
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	4	4	4	4	4	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	4	4	4	4	4	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Linmas	Akademi si	Linmas	Akademi si	Linmas	Akademi si
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	4	4	4	4	4
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	4	4	4	4	4	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	4	4	4	4	4	4
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	4	4	4	4	4	4

Berdasarkan tabel 3.121. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.0, solar 4.0, dan minyak tanah 4.0.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 4.0. Nilai 4.0 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

D. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.122.

Tabel 3.122. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

1	Unjuk rasa masyarakat	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Konversi ke gas
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas,

mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

6.8.3.4. Sosial

Hasil kuesioner dampak sosial diperoleh dari responden yang berasal dari Kantor Dinas Sosial dan Akademisi. Kedua responden perlu diambil agar survei dapat memberikan hasil yang obyektif dan proporsional sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam menentukan kebijakan untuk menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.123.

Tabel 3.123. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinsos	Akademisi	Dinsos	Akademisi	Dinsos	Akademisi
1	Keresahan Masyarakat	4	3	4	3	4	4
2	Penolakan Masyarakat	4	3	4	3	4	4

Berdasarkan tabel 3.123. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.5, solar 3.5, dan minyak tanah 4.0. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 3,63. Nilai 3.66 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akan hilang atau berkurang apabila dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi disertai dengan langkah-langkah yang dapat meringankan beban hidup mereka seperti pemberian kompensasi bantuan sosial berupa BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM.

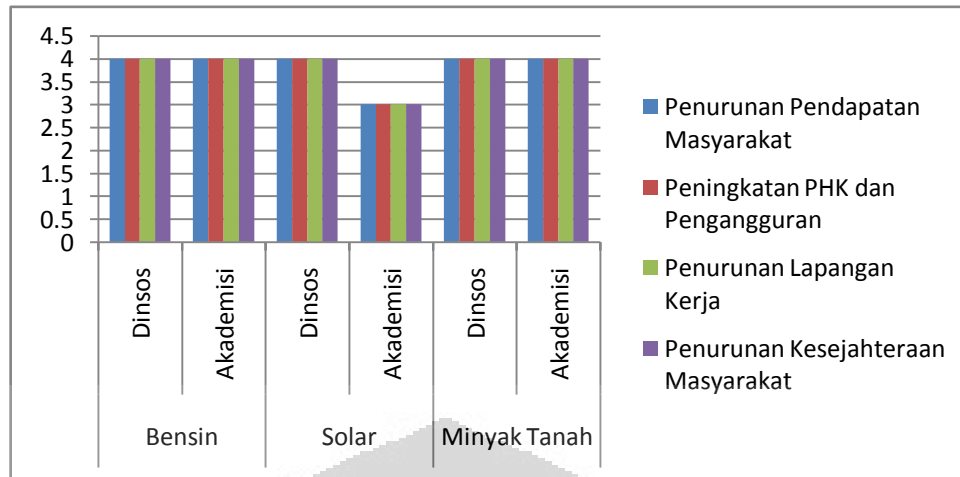
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.124.

Tabel 3.124. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	4	3	4	4
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	4	4	3	4	4
3	Penurunan Lapangan Kerja	4	4	4	3	4	4
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	4	4	3	4	4

Gambar 3.124. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.124. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.0, solar 3.5, dan minyak tanah 4.0. Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 3.83. Nilai 3.83 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Apabila untuk menghadapi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tidak disertai dengan pemberian kompensasi bantuan sosial, maka yang akan lebih merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke bawah

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.125.

Tabel 3.125. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber	Variabel	Penilaian Responden
--------	----------	---------------------

Risiko		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Penolakan Masyarakat	4	4	4	3	4	4
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	4	3	4	4
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	4	4	3	4	4
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	4	4	3	4	4
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	4	4	3	4	4
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Penolakan Masyarakat	4	4	4	3	4	4
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	4	3	4	4
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	4	4	3	4	4
	Pengurangan	4	4	4	3	4	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si
	Lapangan Kerja						
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	4	4	3	4	4
Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Penolakan Masyarakat	4	4	4	3	4	4
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	4	3	4	4
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	4	4	3	4	4
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	4	4	3	4	4
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	4	4	3	4	4

Berdasarkan tabel 3.117 terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.91, solar 3.5, dan minyak tanah 4.0.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 3.80. Nilai 3.80 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Propinsi Jawa Tengah telah melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg sehingga minyak tanah bersubsidi secara bertahap dikurangi. Dengan demikian dampak sosial akan berkurang juga.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.123.

Tabel 3.123. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	17. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 18. Hemat BBM 19. Mencari BBM alternatif	10. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 11. Hemat BBM 12. Mencari BBM alternatif	10. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 11. Hemat BBM 12. Konversi ke gas
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4. Memberi kompensasi Bansos	7. Memberi kompensasi Bansos	12. Memberi kompensasi Bansos

		(Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 5. Memberi BLT 6. Tingkatkan pelayanan	(Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 8. Memberi BLT 9. Tingkatkan pelayanan	(Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 13. Memberi BLT 14. Tingkatkan pelayanan
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	13. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 14. Memberi BLT 15. Tingkatkan pelayanan	10. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 11. Memberi BLT 12. Tingkatkan pelayanan	13. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 14. Memberi BLT 15. Tingkatkan pelayanan
4	Pengurangan Lapangan Kerja	15. Batalkan 16. Hemat BBM 17. Mencari BBM alternatif	10. Batalkan 11. Hemat BBM 12. Mencari BBM alternatif	13. Batalkan 14. Hemat BBM 15. Konversi ke gas
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	21. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 22. Memberi BLT 23. Terapkan sistem kartu kendali	16. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 17. Memberi BLT 18. Terapkan	e. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) f. Memberi BLT g. Terapkan sistem kartu kendali

			sistem kartu kendali	
--	--	--	----------------------	--

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

2.1.9 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

2.1.9.1 Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi DIY, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di DIY. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi DIY, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Sleman. Kota Sleman digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi DIY, Bandung merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi DIY.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.127.

Tabel 3.127. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	4	4	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	3	3
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	3	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	4	2
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	2

Berdasarkan tabel 3.127. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,6, solar 3,6, dan minyak tanah 2,25. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 3,15. Nilai 3,15 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner probabilitas terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

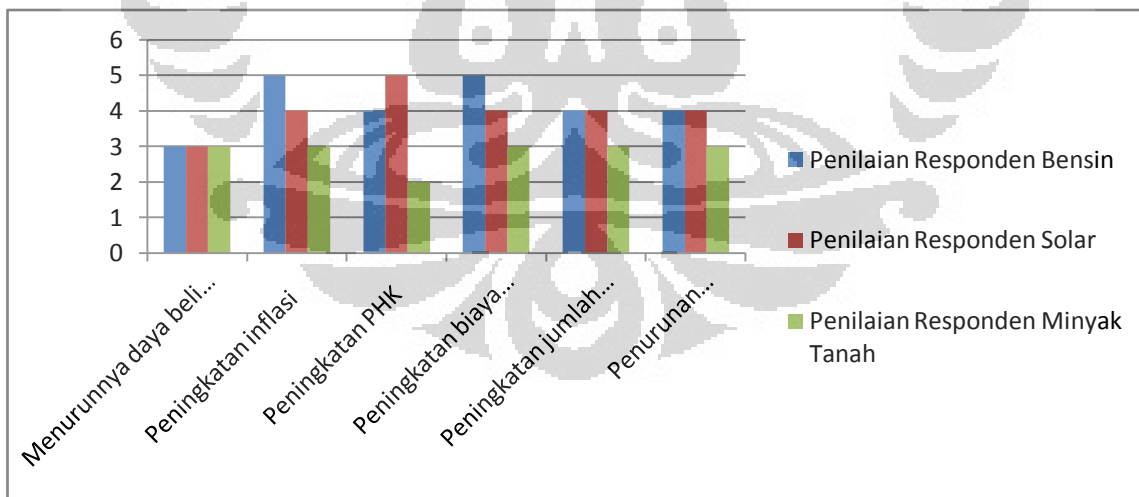
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.127.1.

Tabel 3.127.1. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	3	3	3
2	Peningkatan inflasi	5	4	3
3	Peningkatan PHK	4	5	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	5	4	3
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	4	4	3
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3

Gambar 3.127.1. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 3.127.1. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,17, solar 4, dan minyak tanah 2,83. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,67. Nilai 3,67 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa

menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner dampak terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.128.

Tabel 3.128. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	2
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	4	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	3
	Penurunan daya beli	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	masyarakat			
	Peningkatan inflasi	4	5	3
	Peningkatan PHK	3	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	5	4	3
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	4	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	4	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	4	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	4	4	3
	Peningkatan	4	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	inflasi			
	Peningkatan PHK	4	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3
Penyeleweangan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	3	3	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	3	3	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	3	3	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	3	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	3	3	3
	Peningkatan	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	PHK			
	Peningkatan kemiskinan	3	3	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	3

Berdasarkan tabel 3.128. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,57, solar 3,67, dan minyak tanah 2,97. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 3,4. Nilai 3,4 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.129.

Tabel 3.129. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	3. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	7. Menumbuhkan iklim usaha
		4. Menumbuhkan iklim usaha	Menumbuhkan iklim usaha	8. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
		5. Mempermudah pencairan anggaran	Meningkatkan pertumbuhan	9. Meningkatkan pertumbuhan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		pemerintah	sektor riil	sektor riil
2	Peningkatan inflasi	10. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 11. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 12. Menumbuhkan iklim usaha	7. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 8. Menumbuhkan iklim usaha 9. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	13. Menumbuhkan iklim usaha 14. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 15. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
3	Peningkatan PHK	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	16. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 17. Menumbuhkan iklim usaha 18. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	7. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 8. Menumbuhkan iklim usaha 9. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Membatalkan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha	7. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 8. Menumbuhkan iklim usaha 9. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya pada penurunan daya beli masyarakat. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin prioritas pertama adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah. Tindakan mitigasi untuk solar prioritas pertama adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Sedangkan untuk minyak tanah prioritas pertama adalah menumbuhkan iklim usaha, prioritas kedua

adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi

- **Probabilitas Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 80%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 67%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 60%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 69%.

- **Dampak Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 60%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 60%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 60%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 60%.

- **Probabilitas Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 40%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

- **Dampak Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 40%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

6.3.9.2. Dampak Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan

dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

- *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.130.

Tabel 3.130. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Keresahan masyarakat	3	5	2	4	3	4

Berdasarkan tabel 3.130. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 3, dan minyak tanah 3,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Ketergantungan masyarakat terhadap bensin dan minyak tanah lebih besar dibandingkan dengan solar karena mayoritas masyarakat Indonesia berada di interval menengah ke bawah.

- *Dampak*

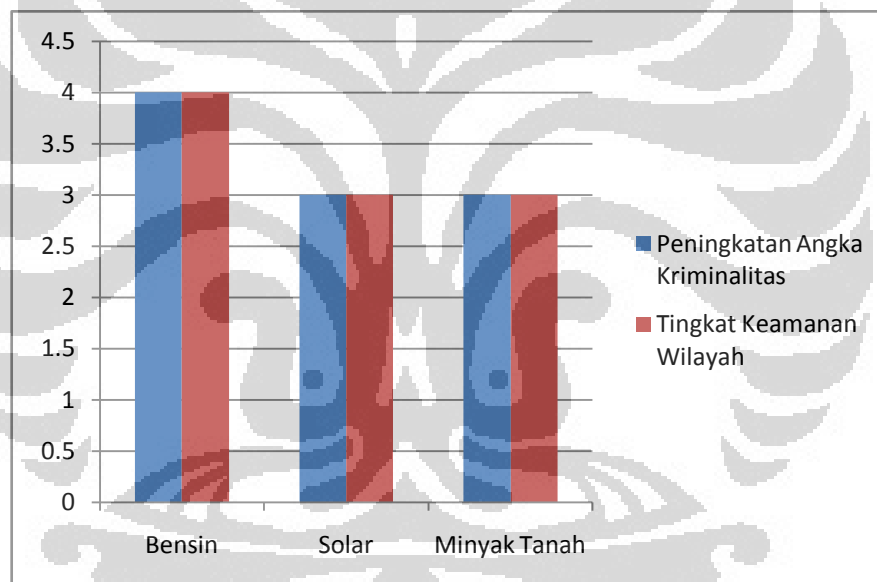
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.131.

Tabel 3.131. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden
----	----------	---------------------

		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	3	1	3	4
2	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4

Gambar 3.131. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 3.131. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,75, solar 2,25, dan minyak tanah 3,75. Rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,92. Nilai 2,92 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pengaruh keamanan wilayah dan kriminalitas lebih condong disebabkan minyak tanah karena minyak tanah banyak digunakan dalam masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya.

C. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.132.

Tabel 3.132. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	4	3	4	2	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	2	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	4	2	4	3	4	2
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	3	1	2
	Tingkat keamanan wilayah	4	1	4	3	4	1

Berdasarkan tabel 3.132. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,83, solar 2,83, dan minyak tanah 3,21. Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,93. Nilai 2,96 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dalam mengisi kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.133

Tabel 3.133. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Operasi pasar
2	Peningkatan angka kriminalitas	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak pertahanan keamanan berupa keresahan

masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah prioritas pertama adalah sosialisasi pengurangan subsidi BBM ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, prioritas kedua adalah mencegah terjadinya penyelewengan pada saat distribusi bensin, solar, dan minyak tanah. Prioritas ketiga untuk bensin dan solar adalah membatalkan pengurangan volume bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan prioritas ketiga pada minyak tanah adalah melakukan operasi pasar dengan menjual minyak tanah murah/bersubsidi.

6.9.3. Politik

Hasil kuesioner dampak politik diperoleh dari responden yang berasal dari Pemerintah dan Akademisi. Kedua responden perlu diambil agar survei dapat memberikan hasil yang obyektif dan proporsional sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam menentukan kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

b. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.134.

Tabel 3.134. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PNS	Akademi si	PNS	Akademi si	PNS	Akademi si
1	Gejolak Politik	5	4	5	3	5	3

Berdasarkan tabel 3.134. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk

bensin 4.5, solar 4.0, dan minyak tanah 4.0. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 4.13. Nilai 4.16 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejolak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

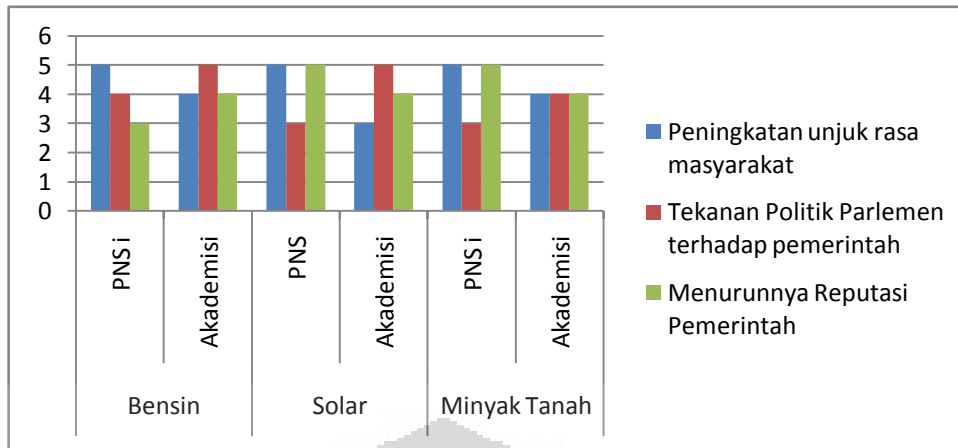
c. *Dampak*

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.135.

Tabel 3.135. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PNS i	Akademi si	PNS	Akademi si	PNS i	Akademi si
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	5	4	5	3	5	4
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	4	5	3	5	3	4
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	3	4	5	4	5	4

Gambar 3.135. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.135. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.16, solar 4.16, dan minyak tanah 4.13.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 4.13. Nilai 4.16 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

C. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.133.

Tabel 3.133. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

		PNS	Akademi si	PNS	Akademi si	PNS	Akademi si
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	5	5	5	5	5	5
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	5	3	5	3	5
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	5	5	5	5	5	5
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	5	5	5	5	5	5
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	5	3	5	3	5
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	5	5	5	5	5	5
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	5	4	5	4	5	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	4	3	4	3	4
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	5	4	5	4	5	4

Berdasarkan tabel 3.133. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.5, solar 4.5, dan minyak tanah 4.5.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 4.5. Nilai 4.5 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

D. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.137.

Tabel 3.137. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Konversi ke gas
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan

3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan
---	--------------------------------	---	---	---

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

6.3.9.3. Sosial

Hasil kuesioner dampak sosial diperoleh dari responden yang berasal dari Kantor Dinas Sosial dan Akademisi. Kedua responden perlu diambil agar survei dapat memberikan hasil yang obyektif dan proporsional sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam menentukan kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

1. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.138.

Tabel 3.138. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

		Dinsos	Akademisi	Dinsos	Akademisi	Dinsos	Akademisi
1	Keresahan Masyarakat	4	4	4	3	5	3
2	Penolakan Masyarakat	5	4	5	3	4	3

Berdasarkan tabel 3.138. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.25, solar 3.75, dan minyak tanah 3.75. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 3,91. Nilai 3,91 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akan hilang atau berkurang apabila untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi disertai dengan langkah-langkah yang dapat meringankan beban hidup mereka seperti pemberian kompensasi bantuan sosial berupa BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM.

b. Dampak

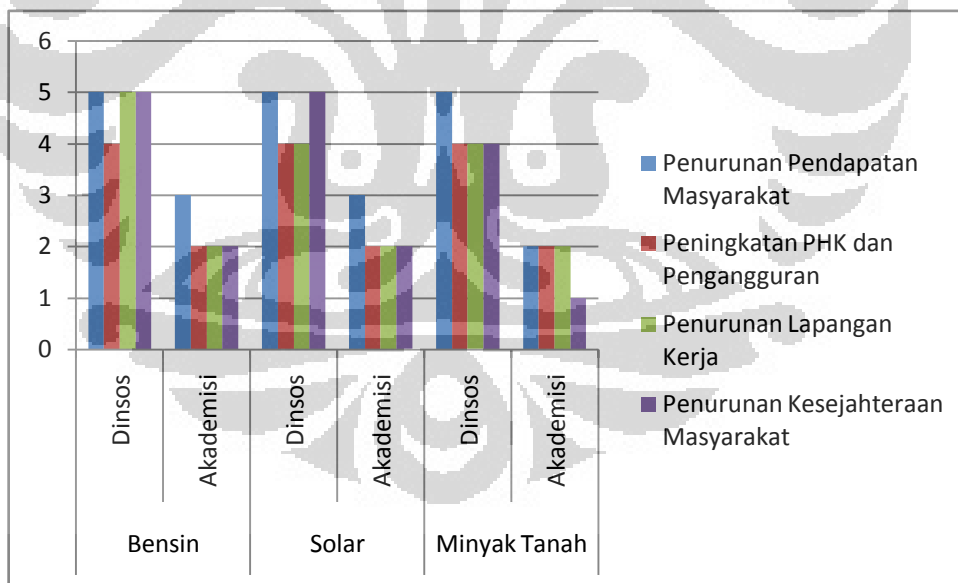
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.139.

Tabel 3.139. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	5	3	5	3	5	2

2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	2	4	2	4	2
3	Penurunan Lapangan Kerja	5	2	4	2	4	2
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	5	2	5	2	4	1

Gambar 3.139. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.139 terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.5, solar 3.37, dan minyak tanah 3.0. Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 3.29. Nilai 3.29 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan

menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Apabila untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tidak disertai dengan pemberian kompensasi bantuan sosial, maka yang akan lebih merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke bawah

C. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.140.

Tabel 3.140. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	5	3	5	3	5	3
	Penolakan Masyarakat	5	2	5	3	5	3
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	2	4	2	4	2
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	2	4	2	4	2
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	2	4	2	4	2
	Penurunan	5	2	5	2	5	2

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si
	Kesejahteraan Masyarakat						
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	5	3	5	2	5	2
	Penolakan Masyarakat	5	3	5	2	5	2
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	5	2	4	2	5	2
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	2	4	2	4	2
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	2	5	2	4	2
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	5	2	5	2	5	2
Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	5	3	5	3	5	3
	Penolakan Masyarakat	4	3	5	3	5	3
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	3	4	2	4	2
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	3	4	2	4	2

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si	Dinsos	Akademi si
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	3	4	2	4	2
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	5	3	4	2	5	2

Berdasarkan tabel 3.140. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,5, solar 3.16, dan minyak tanah 3.38.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 3.34. Nilai 3.34 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Propinsi DIY telah melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg sehingga minyak tanah bersubsidi secara bertahap dikurangi. Dengan demikian dampak sosial akan berkurang juga.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.141.

Tabel 3.141. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

1	Keresahan Masyarakat	20. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 21. Hemat BBM 22. Mencari BBM alternatif	13. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 14. Hemat BBM 15. Mencari BBM alternatif	13. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 14. Hemat BBM 15. Konversi ke gas
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	19. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 20. Memberi BLT 21. Tingkatkan pelayanan	22. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 23. Memberi BLT 24. Tingkatkan pelayanan	15. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 16. Memberi BLT 17. Tingkatkan pelayanan
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	16. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 17. Memberi BLT 18. Tingkatkan pelayanan	13. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 14. Memberi BLT 15. Tingkatkan pelayanan	16. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 17. Memberi BLT 18. Tingkatkan pelayanan
4	Pengurangan Lapangan Kerja	18. Batalkan 19. Hemat BBM 20. Mencari BBM	25. Batalkan 26. Hemat BBM 27. Mencari BBM	28. Batalkan 29. Hemat BBM 30. Konversi ke gas

		alternatif	alternatif	
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	24. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 25. Memberi BLT 26. Terapkan sistem kartu kendali	31. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 32. Memberi BLT 33. Terapkan sistem kartu kendali	2. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 3. Memberi BLT 4. Terapkan sistem kartu kendali

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.10 Sumatera Utara

3.1.10.1 Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi Sumatera Utara, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Sumatera Utara. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadinya distorsi pada

Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Sumatera Utara, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Medan. Kota Medan digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Sumatera Utara, Medan merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi Sumatera Utara.

e. *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.142.

Tabel 3.142. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	4	4	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	3	3
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	3	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	4	2
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	2

Berdasarkan tabel 3.142. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,6, solar 3,6, dan minyak tanah 2,25. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 3,15. Nilai 3,15 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan

pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner probabilitas terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

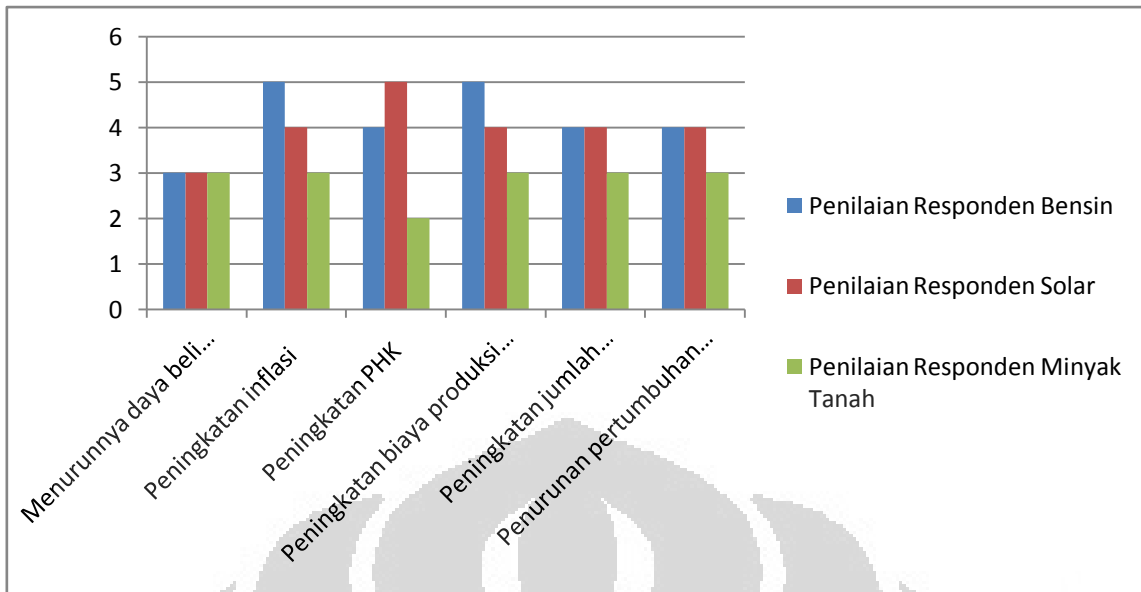
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.143.

Tabel 3.143. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	3	3	3
2	Peningkatan inflasi	5	4	3
3	Peningkatan PHK	4	5	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	5	4	3
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	4	4	3
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3

Gambar 3.143. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 3.143. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,17, solar 4, dan minyak tanah 2,83. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,67. Nilai 3,67 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner dampak terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

C. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.144.

Tabel 3.144. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	2
	Peningkatan	4	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	harga kebutuhan pokok			
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	4	5	3
	Peningkatan PHK	3	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	5	4	3
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	3
	Peningkatan harga kebutuhan	4	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pokok			
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	4	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	4	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	4	4	3
	Peningkatan inflasi	4	4	3
	Peningkatan PHK	4	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3
Penyelewaan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	3	3	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	3	3	3
	Peningkatan	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pengeluaran masyarakat			
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	3	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	3	3	3
	Peningkatan PHK	3	3	3
	Peningkatan kemiskinan	3	3	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	3

Berdasarkan tabel 3.144. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,57, solar 3,67, dan minyak tanah 2,97. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 3,4. Nilai 3,4 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi

yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

D. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.145.

Tabel 3.145. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	6. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 7. Menumbuhkan iklim usaha 8. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	19. Menumbuhkan iklim usaha 20. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 21. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
2	Peningkatan inflasi	22. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 23. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 24. Menumbuhkan iklim usaha	10. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 11. Menumbuhkan iklim usaha 12. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	6. Menumbuhkan iklim usaha 7. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 8. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
3	Peningkatan PHK	Meningkatkan	9. Meningkatkan	Meningkatkan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		<p>pertumbuhan sektor riil</p> <p>Menumbuhkan iklim usaha</p> <p>Mempermudah pencairan anggaran pemerintah</p>	<p>pertumbuhan sektor riil</p> <p>10. Menumbuhkan iklim usaha</p> <p>11. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah</p>	<p>pertumbuhan sektor riil</p> <p>Menumbuhkan iklim usaha</p> <p>Mempermudah pencairan anggaran pemerintah</p>
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	<p>10. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil</p> <p>11. Menumbuhkan iklim usaha</p> <p>12. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah</p>	<p>Meningkatkan pertumbuhan sektor riil</p> <p>Menumbuhkan iklim usaha</p> <p>Menangani distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi</p>	<p>Menumbuhkan iklim usaha</p> <p>Meningkatkan pertumbuhan sektor riil</p> <p>Mempermudah pencairan anggaran pemerintah</p>
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	<p>Menumbuhkan iklim usaha</p> <p>Mempermudah pencairan anggaran pemerintah</p> <p>Meningkatkan pertumbuhan sektor riil</p>	<p>Meningkatkan pertumbuhan sektor riil</p> <p>Mempermudah pencairan anggaran pemerintah</p> <p>Menumbuhkan iklim usaha</p>	<p>6. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil</p> <p>7. Menumbuhkan iklim usaha</p> <p>8. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah</p>
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Meningkatkan pertumbuhan	Meningkatkan pertumbuhan	Meningkatkan pertumbuhan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		sektor riil	sektor riil	sektor riil
		Menumbuhkan	Menumbuhkan	Mempermudah
		iklim usaha	iklim usaha	pencairan
		Mempermudah	Mempermudah	anggaran
		pencairan	pencairan	pemerintah
		anggaran	anggaran	Menumbuhkan
		pemerintah	pemerintah	iklim usaha

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya pada penurunan daya beli masyarakat. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin prioritas pertama adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah. Tindakan mitigasi untuk solar prioritas pertama adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Sedangkan untuk minyak tanah prioritas pertama adalah menumbuhkan iklim usaha, prioritas kedua adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi

- Probabilitas Sebelum Mitigasi

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 40%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

- Dampak Sebelum Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data

untuk solar adalah 40%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

- **Probabilitas Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 20%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 20%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 20%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 20%.

- **Dampak Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 20%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 20%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 20%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 20%.

6.3.9.4. Dampak Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

e. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.107.

Tabel 3.143. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerint	Independ	Pemerint	Independ	Pemerint	Independ

		ah	en	ah	en	ah	en
1	Keresahan masyarakat	3	5	2	4	3	4

Berdasarkan tabel 3.143. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 3, dan minyak tanah 3,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Ketergantungan masyarakat terhadap bensin dan minyak tanah lebih besar dibandingkan dengan solar karena mayoritas masyarakat Indonesia berada di interval menengah ke bawah.

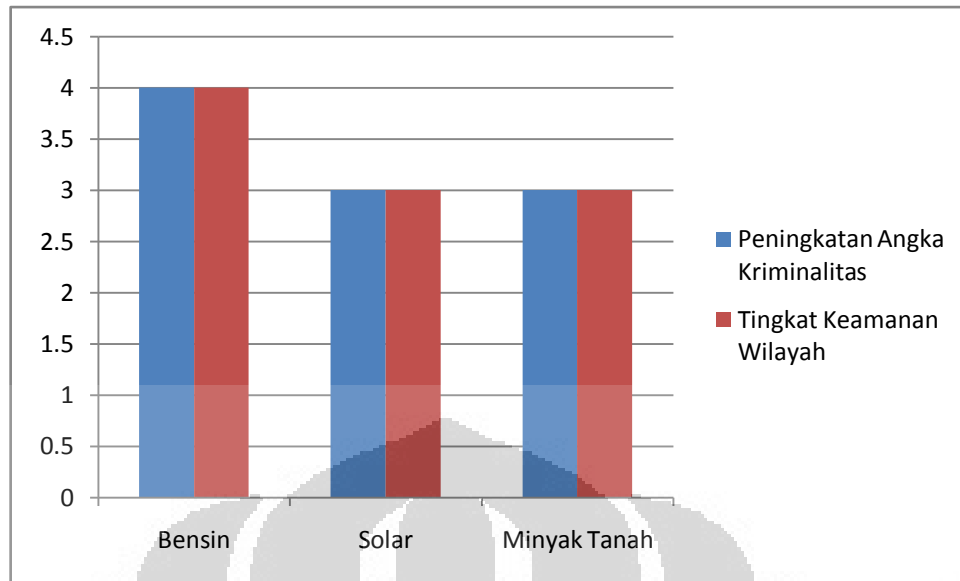
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.147.

Tabel 3.147. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	3	1	3	4
2	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4

Gambar 3.108. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 3.108. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,75, solar 2,25, dan minyak tanah 3,75. Rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,92. Nilai 2,92 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pengaruh keamanan wilayah dan kriminalitas lebih condong disebabkan minyak tanah karena minyak tanah banyak digunakan dalam masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.148.

Tabel 3.148. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	4	3	4	2	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	2	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	4	2	4	3	4	2
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	3	1	2
	Tingkat	4	1	4	3	4	1

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
	keamanan wilayah						

Berdasarkan tabel 3.148. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,83, solar 2,83, dan minyak tanah 3,21. Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,93. Nilai 2,96 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dalam mengisi kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.149.

Tabel 3.149. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Operasi pasar
2	Peningkatan angka kriminalitas	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan

		3. Pastikan keamanan posko BBM	3. Pastikan keamanan posko BBM	3. Pastikan keamanan posko BBM
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah prioritas pertama adalah sosialisasi pengurangan subsidi BBM ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, prioritas kedua adalah mencegah terjadinya penyelewengan pada saat distribusi bensin, solar, dan minyak tanah. Prioritas ketiga untuk bensin dan solar adalah membatalkan pengurangan volume bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan prioritas ketiga pada minyak tanah adalah melakukan operasi pasar dengan menjual minyak tanah murah/bersubsidi.

6.3.9.5. Politik

Responden pada dampak politik adalah ahli dari pemerintah yang diwakili oleh Kabid PKS BAKESBANGPOLLINMAS dan dari independen yang diwakili oleh LSM. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.150.

Tabel 3.150. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI
1	Gejolak Politik	4	4	1	4	3	4

Berdasarkan tabel 3.150. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.0, solar 2.5, dan minyak tanah 3.5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 3.33. Nilai 3.33 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejolak politik akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- e. Terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan menimbulkan gejolak politik karena kalangan elit politik akan menyuarakan aspirasi masyarakat jika pengurangan tersebut berdampak pada masyarakat

b. Dampak

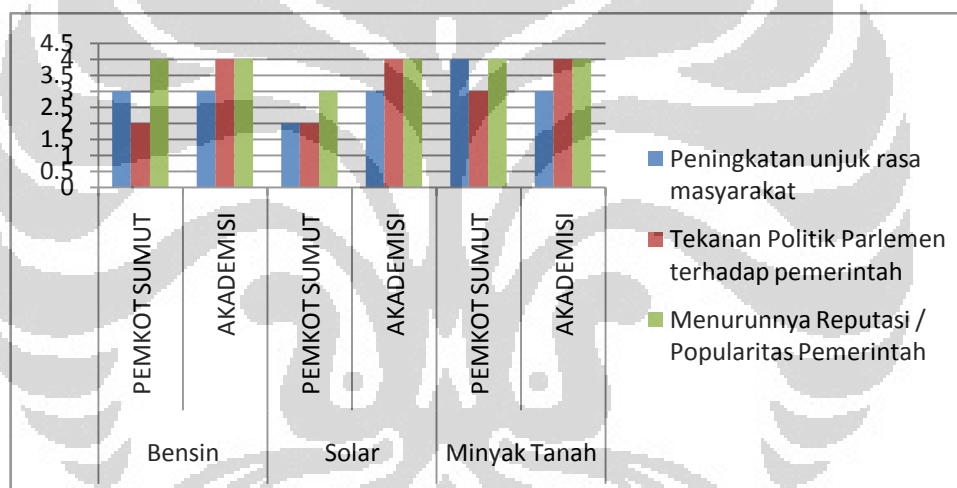
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.151.

Tabel 3.151. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO	AKADE	PEMKO	AKADE	PEMKO	AKADE

		T SUMUT	MISI	T SUMUT	MISI	T SUMUT	MISI
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	3	3	2	3	4	3
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	2	4	2	4	3	4
3	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	4	4	3	4	4	4

Gambar 3.151. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.151. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.33, solar 3.0, dan minyak tanah 3.63.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah . Nilai berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.152.

Tabel 3.152. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	3	3	3	3	3	3
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	4	3	4	3	4
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	4	4	3	4	5	4
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	4	3	4	3	4	3
	Tekanan Politik	4	4	4	4	4	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI
	Parlemen terhadap pemerintah						
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	5	4	5	4	5	4
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	2	3	2	3	2	3
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	2	4	2	4	2	4
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	2	4	2	4	2	4

Berdasarkan tabel 3.152. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.44, solar 3.38, dan minyak tanah 3.5.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 3.44. Nilai 3.44 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.153.

Tabel 3.153. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasiterhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Konversi ke gas
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan
3	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan

		pelayanan		
--	--	-----------	--	--

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

6.3.10.3. Sosial

Responden pada dampak sosial adalah ahli dari pemerintah yang diwakili oleh Kasubbag Tata Usaha dan dari independen yang diwakili oleh mahasiswa. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

- *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.154.

Tabel 3.154. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI
1	Keresahan Masyarakat	5	4	5	3	5	4
2	Penolakan Masyarakat	5	3	5	3	5	4

Berdasarkan tabel 3.154. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.25, solar 4.0, dan minyak tanah 4.5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 4.25. Nilai 4.25 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Masyarakat akan menolak terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi karena melihat kondisi ekonomi Indonesia yang masih krisis dan belum membaik

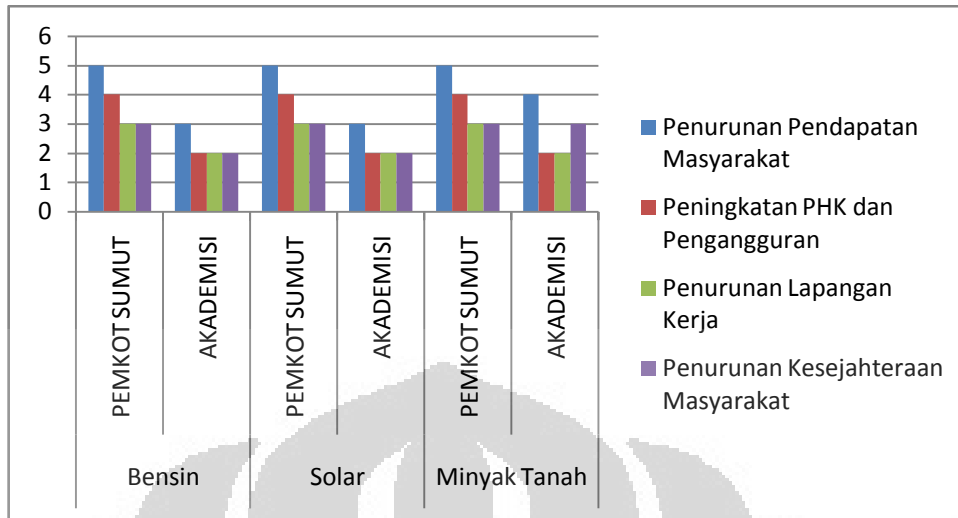
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.155.

Tabel 3.155. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	5	3	5	3	5	4
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	2	4	2	4	2
3	Penurunan Lapangan Kerja	3	2	3	2	3	2
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	3	2	3	2	3	3

Gambar 3.155. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.155. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.0, solar 3.0, dan minyak tanah 3.25. Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 3.08. Nilai 3.08 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.153.

Tabel 3.153. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	5	3	5	2	5	4
	Penolakan Masyarakat	5	3	5	2	5	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	3	2	3	1	3	3
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	2	3	1	3	2
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	2	3	1	3	2
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	3	2	3	1	3	3
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	3	3	2	3	3
	Penolakan Masyarakat	3	3	3	2	3	3
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	3	2	3	2	3	3
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	2	3	2	3	2
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	2	3	2	3	2
	Penurunan	3	2	3	2	3	2

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI	PEMKO T SUMUT	AKADE MISI
	Kesejahteraan Masyarakat						
Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	4	5	4	5	3
	Penolakan Masyarakat	4	4	4	4	5	3
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	3	3	4	3	2
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	2	3	3	3	2
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	2	3	2	3	2
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	3	3	3	4	3	3

Berdasarkan tabel 3.153. terlihat bahwa terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.0, solar 2.83, dan minyak tanah 3.05.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 2.93. Nilai 2.96 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Propinsi Sumatera Utara telah melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg sehingga minyak tanah bersubsidi secara bertahap dikurangi. Dengan demikian dampak sosial akan berkurang juga.
- Jika distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tetap terjadi, masyarakat kecil berpenghasilan rendah dan tidak tetap akan merasakannya karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi
- Jika tetap terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, maka hendaknya dilakukan penanganan secara segera.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.157.

Tabel 3.157. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	21. Batalkan 22. Hemat BBM 23. Mencari BBM alternatif	16. Batalkan 17. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 18. Mencari BBM alternatif	16. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 17. Hemat BBM 18. Konversi ke gas
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	12. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan,	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan,	18. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)

		Pinjaman lunak) 13. Memberi BLT 14. Tingkatkan pelayanan	Pinjaman lunak) Memberi BLT Tingkatkan pelayanan	19. Memberi BLT 20. Tingkatkan pelayanan
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	19. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 20. Memberi BLT 21. Tingkatkan pelayanan	16. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 17. Memberi BLT 18. Tingkatkan pelayanan	19. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 20. Memberi BLT 21. Tingkatkan pelayanan
4	Pengurangan Lapangan Kerja	24. Batalkan 25. Hemat BBM 26. Mencari BBM alternatif	18. Batalkan 19. Hemat BBM 20. Mencari BBM alternatif	21. Batalkan 22. Hemat BBM 23. Konversi ke gas
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	27. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 28. Memberi BLT 29. Terapkan sistem	e. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) f. Memberi BLT	h. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) i. Memberi BLT

		kartu kendali	g. Terapkan sistem kartu kendali	j. Terapkan sistem kartu kendali
--	--	---------------	----------------------------------	----------------------------------

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.11 Provinsi Sulawesi Utara

3.1.11.1 Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Sulawesi Utara. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Sulawesi Utara, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Manado. Kota Manado digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Sulawesi Utara, Manado merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi Sulawesi Utara.

C. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.158.

Tabel 3.158. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	4	4	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	3	3
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	3	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	4	2
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	2

Berdasarkan tabel 3.158. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,6, solar 3,6, dan minyak tanah 2,25. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 3,15. Nilai 3,15 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner probabilitas terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan.

oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

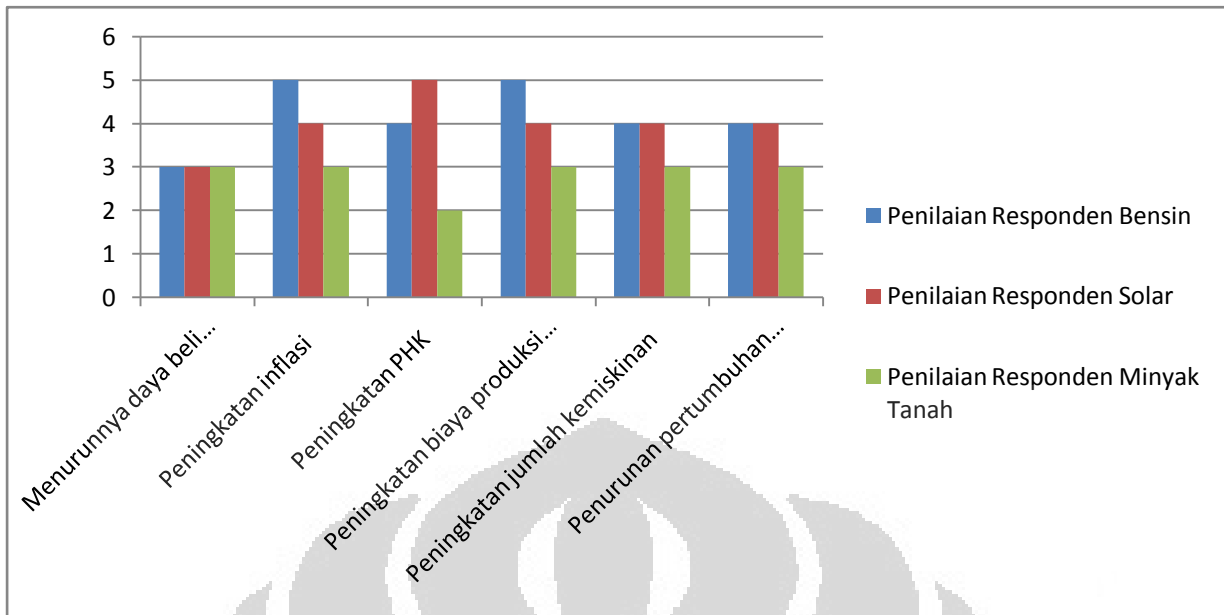
D. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.159.

Tabel 3.159. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	3	3	3
2	Peningkatan inflasi	5	4	3
3	Peningkatan PHK	4	5	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	5	4	3
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	4	4	3
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3

Gambar 3.159. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 3.159. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,17, solar 4, dan minyak tanah 2,83. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,67. Nilai 3,67 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner dampak terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

E. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.160.

Tabel 3.160. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber	Variabel	Penilaian Responden
--------	----------	---------------------

Risiko		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	2
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	4	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	4	5	3
	Peningkatan PHK	3	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	5	4	3
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	3
	Peningkatan	4	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	harga kebutuhan pokok			
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	4	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	4	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	4	4	3
	Peningkatan inflasi	4	4	3
	Peningkatan PHK	4	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3
Penyelewengan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	3	3	3
	Peningkatan harga kebutuhan	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pokok			
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	3	3	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	3	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	3	3	3
	Peningkatan PHK	3	3	3
	Peningkatan kemiskinan	3	3	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	3

Berdasarkan tabel 3.160. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,57, solar 3,67, dan minyak tanah 2,97. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 3,4. Nilai 3,4 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi yang perlu

diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

F. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.161.

Tabel 3.161. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	9. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 10. Menumbuhkan iklim usaha 11. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	25. Menumbuhkan iklim usaha 26. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 27. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
2	Peningkatan inflasi	28. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 29. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 30. Menumbuhkan iklim usaha	13. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 14. Menumbuhkan iklim usaha 15. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	6. Menumbuhkan iklim usaha 7. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 8. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
3	Peningkatan PHK	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	9. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	10. Menumbuhkan iklim usaha 11. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	12. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 13. Menumbuhkan iklim usaha 14. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Menangani distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha	15. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 16. Menumbuhkan iklim usaha 17. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya pada penurunan daya beli masyarakat. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin prioritas pertama adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah. Tindakan mitigasi untuk solar prioritas pertama adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Sedangkan untuk minyak tanah prioritas pertama adalah menumbuhkan iklim usaha, prioritas kedua adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi

- **Probabilitas Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 100%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 80%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 100%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 93%.

- **Dampak Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 87%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 87%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 90%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 88%.

- **Probabilitas Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 60%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 60%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 60%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 60%.

- **Dampak Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 40%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

3.1.11.2 Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

- *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.162.

Tabel 3.162. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Keresahan	3	5	2	4	3	4

masyarakat							
------------	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 3.162 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 3, dan minyak tanah 3,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Ketergantungan masyarakat terhadap bensin dan minyak tanah lebih besar dibandingkan dengan solar karena mayoritas masyarakat Indonesia berada di interval menengah ke bawah.

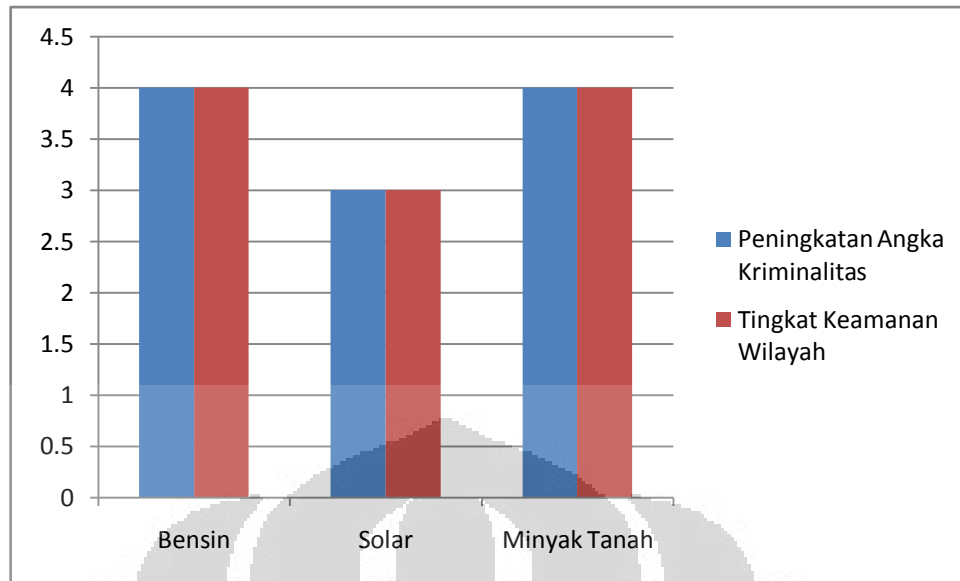
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.163.

Tabel 3.163. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	3	1	3	4
2	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4

Gambar 3.163. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 3.163. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,75, solar 2,25, dan minyak tanah 3,75. Rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,92. Nilai 2,92 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada

Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pengaruh keamanan wilayah dan kriminalitas lebih condong disebabkan minyak tanah karena minyak tanah banyak digunakan dalam masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.163.

Tabel 3.163. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	4	3	4	2	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	2	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	4	2	4	3	4	2
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	3	1	2
	Tingkat	4	1	4	3	4	1

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
	keamanan wilayah						

Berdasarkan tabel 3.163. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,83, solar 2,83, dan minyak tanah 3,21. Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,93. Nilai 2,96 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dalam mengisi kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.164.

Tabel 3.164. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Operasi pasar
2	Peningkatan angka kriminalitas	1. Penegakan hukum 2. Cegah	1. Penegakan hukum 2. Cegah	1. Penegakan hukum 2. Cegah

		penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah prioritas pertama adalah sosialisasi pengurangan subsidi BBM ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, prioritas kedua adalah mencegah terjadinya penyelewengan pada saat distribusi bensin, solar, dan minyak tanah. Prioritas ketiga untuk bensin dan solar adalah membatalkan pengurangan volume bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan prioritas ketiga pada minyak tanah adalah melakukan operasi pasar dengan menjual minyak tanah murah/bersubsidi.

3.1.11.3 Politik

Hasil kuesioner dampak politik diperoleh dari responden yang berasal dari Poldagri dan Akademisi. Kedua responden perlu diambil agar survei dapat memberikan hasil yang obyektif dan proporsional sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam menentukan kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

- *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.165.

Tabel 3.165. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Poldagri	Akademi	Poldagri	Akademi	Poldagri	Akademi
1	Gejolak Politik	5	3	3	2	5	3

Berdasarkan tabel 3.165 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.0, solar 2.5, dan minyak tanah 4.0. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 3.5. Nilai 3.5 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejolak politik akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

- *Dampak*

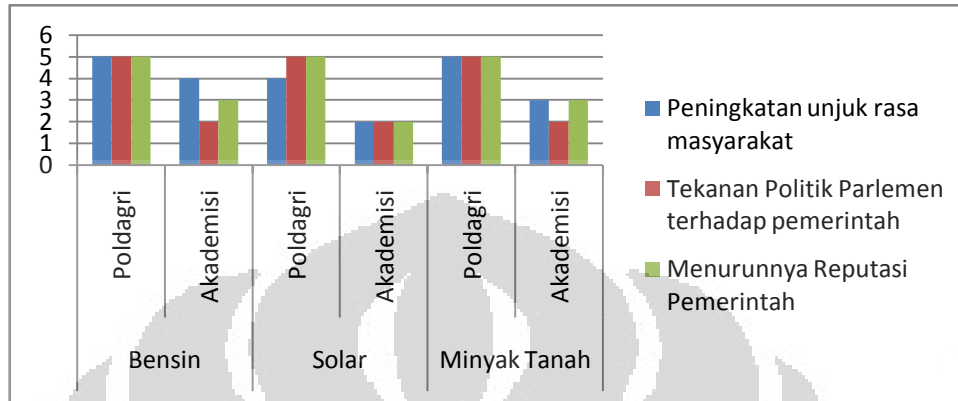
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.163.

Tabel 3.163. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Poldagri	Akademi	Poldagri	Akademi	Poldagri	Akademi
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	5	4	4	2	5	3
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	5	2	5	2	5	2
3	Menurunnya	5	3	5	2	5	3

	Reputasi Pemerintah						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

Gambar 3.163. Grafik . Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.163. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.0, solar 3.33, dan minyak tanah 3.83.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 3.72. Nilai 3.72 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

b. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.167.

**Tabel 3.167. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko
terhadap Dampak Politik**

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Poldagri	Akademi si	Poldagri	Akademi si	Poldagri	Akademi si
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	5	3	5	2	5	3
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	5	3	5	2	5	3
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	5	3	5	2	5	3
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	5	3	5	2	5	3
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	4	3	5	2	5	3
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	5	3	5	2	5	3
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	5	3	5	2	5	3
	Tekanan Politik Parlemen terhadap	5	3	5	2	5	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Poldagri	Akademi si	Poldagri	Akademi si	Poldagri	Akademi si
	pemerintah						
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	5	3	5	2	5	3

Berdasarkan tabel 3.167 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.94, solar 3.5, dan minyak tanah 4.0.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 3.81. Nilai 3.81 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

e. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.168

Tabel 3.168. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Konversi ke gas

2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.11.4 Sosial

Hasil kuesioner dampak sosial diperoleh dari responden yang berasal dari Kantor Dinas Sosial dan Akademisi. Kedua responden perlu diambil agar survei dapat memberikan hasil yang obyektif dan proporsional sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam menentukan kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial.

Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.169.

Tabel 3.169. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinsos	Akademisi	Dinsos	Akademisi	Dinsos	Akademisi
1	Keresahan Masyarakat	3	4	3	1	3	4
2	Penolakan Masyarakat	4	4	3	1	4	4

Berdasarkan tabel 3.169 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.75, solar 2.0, dan minyak tanah 3.75. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 3,13. Nilai 3.16 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akan hilang atau berkurang apabila terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi disertai dengan langkah-langkah yang dapat meringankan beban hidup mereka seperti pemberian kompensasi bantuan sosial berupa BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM.

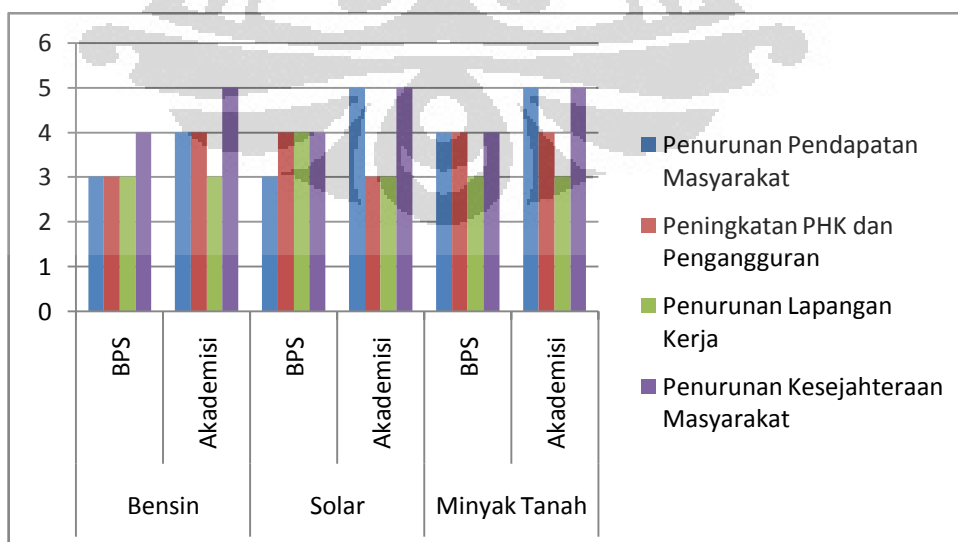
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.170.

Tabel 3.170. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		BPS	Akademi si	BPS	Akademi si	BPS	Akademi si
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	3	4	3	5	4	5
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	4	4	3	4	4
3	Penurunan Lapangan Kerja	3	3	4	3	3	3
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	4	5	4	5

Gambar 3.170. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.170 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,62, solar 3.87, dan minyak tanah 4.0. Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 3.83. Nilai 3.83 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Apabila penanganan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tidak disertai dengan pemberian kompensasi bantuan sosial, maka yang akan lebih merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke bawah

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.171.

Tabel 3.171. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		BPS	Akademi si	BPS	Akademi si	BPS	Akademi si
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	3	4	3	1	4	4
	Penolakan Masyarakat	4	4	3	1	4	4
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	3	4	3	5	4	5
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	4	3	3	4	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		BPS	Akademi si	BPS	Akademi si	BPS	Akademi si
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	3	3	3	4	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	3	5	4	5
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	3	3	3	3	4	3
	Penolakan Masyarakat	3	1	3	5	4	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	3	5	3	4	4	4
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	4	3	2	4	2
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	3	3	2	3	2
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	3	4	3	5	4	5
	Penyeleweangan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	3	3	3	5	4
Penolakan Masyarakat		3	4	3	5	4	5

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		BPS	Akademi si	BPS	Akademi si	BPS	Akademi si
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	3	5	3	5	4	4
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	3	4	3	3	4	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	4	3	4	4	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	3	5	4	5	4	5

Berdasarkan tabel 3.171 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.36, solar 3.36, dan minyak tanah 3.91.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 3.54. Nilai 3.54 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.172.

Tabel 3.172. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

1	Keresahan Masyarakat	23. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 24. Hemat BBM 25. Mencari BBM alternatif	19. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 20. Hemat BBM 21. Mencari BBM alternatif	19. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 20. Hemat BBM 21. Konversi ke gas
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) Memberi BLT Tingkatkan pelayanan	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) Memberi BLT Tingkatkan pelayanan	21. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 22. Memberi BLT 23. Tingkatkan pelayanan
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	22. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 23. Memberi BLT 24. Tingkatkan pelayanan	19. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 20. Memberi BLT 21. Tingkatkan pelayanan	22. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 23. Memberi BLT 24. Tingkatkan pelayanan
4	Pengurangan Lapangan Kerja	27. Batalkan 28. Hemat BBM 29. Mencari BBM	Batalkan Hemat BBM Mencari BBM	Batalkan Hemat BBM Konversi ke gas

		alternatif	alternatif	
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	30. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 31. Memberi BLT 32. Terapkan sistem kartu kendali	e. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) f. Memberi BLT g. Terapkan sistem kartu kendali	h. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) i. Memberi BLT j. Terapkan sistem kartu kendali

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.12 Provinsi Papua Barat

3.1.12.1 Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi Papua Barat, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Papua Barat. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadi distorsi pada

Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Papua Barat, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Bandung. Kota Manokwari digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Papua Barat, Manokwari merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi Papua Barat.

a. *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.173

Tabel 3.173. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	4	4	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	3	3
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	3	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	4	2
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	2

Berdasarkan tabel 3.173. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,6, solar 3,6, dan minyak tanah 2,25. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 3,15. Nilai 3,15 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan

pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner probabilitas terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

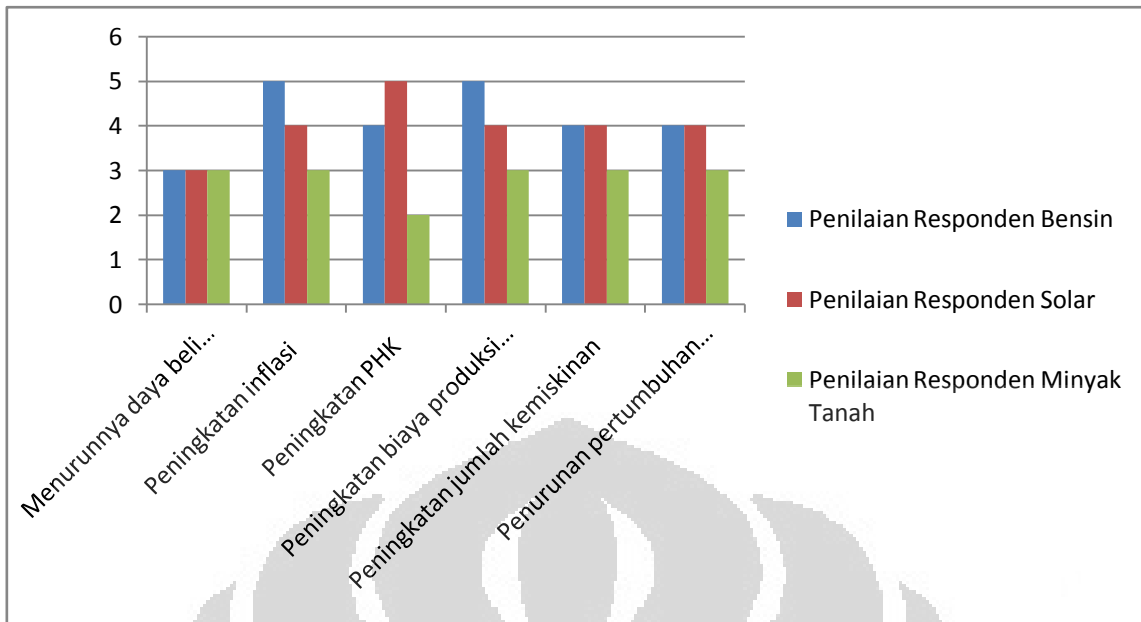
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.174.

Tabel 3.174. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	3	3	3
2	Peningkatan inflasi	5	4	3
3	Peningkatan PHK	4	5	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	5	4	3
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	4	4	3
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3

Gamabr 3.174. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 3.174. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,17, solar 4, dan minyak tanah 2,83. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,67. Nilai 3,67 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner dampak terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.175.

Tabel 3.175. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	2
	Peningkatan	4	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	harga kebutuhan pokok			
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	4	5	3
	Peningkatan PHK	3	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	5	4	3
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	3
	Peningkatan harga kebutuhan	4	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pokok			
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	4	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	4	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	4	4	3
	Peningkatan inflasi	4	4	3
	Peningkatan PHK	4	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3
Penyeleweangan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	3	3	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	3	3	3
	Peningkatan	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pengeluaran masyarakat			
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	3	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	3	3	3
	Peningkatan PHK	3	3	3
	Peningkatan kemiskinan	3	3	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	3

Berdasarkan tabel 3.175. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,57, solar 3,67, dan minyak tanah 2,97. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 3,4. Nilai 3,4 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.176

Tabel 3.173. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	12. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 13. Menumbuhkan iklim usaha 14. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	31. Menumbuhkan iklim usaha 32. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 33. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
2	Peningkatan inflasi	34. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 35. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 36. Menumbuhkan iklim usaha	16. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 17. Menumbuhkan iklim usaha 18. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	4. Menumbuhkan iklim usaha 5. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 6. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
3	Peningkatan PHK	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	7. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 8. Menumbuhkan iklim usaha 9. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	10. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 11. Menumbuhkan iklim usaha 12. Mempermudahh pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Menangani terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha	13. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 14. Menumbuhkan iklim usaha 15. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya pada penurunan daya beli masyarakat. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin prioritas pertama adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah. Tindakan mitigasi untuk solar prioritas pertama adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Sedangkan untuk minyak tanah prioritas pertama adalah menumbuhkan iklim usaha, prioritas kedua adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi

35.3. Probabilitas Sebelum Mitigasi

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 53%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 33%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 50%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 46%.

35.4. Dampak Sebelum Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 53%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 53%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 60%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 56%.

35.5. Probabilitas Sesudah Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 20%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 20%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 20%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 20%.

35.6. Dampak Sesudah Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 33%. Hasil pengolahan data untuk

solar adalah 33%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 46%.

6.3.12.2. Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

- *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.177.

Tabel 3.177. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Keresahan masyarakat	3	5	2	4	3	4

Berdasarkan tabel 3.177 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 3, dan minyak tanah 3,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- i. Ketergantungan masyarakat terhadap bensin dan minyak tanah lebih besar dibandingkan dengan solar karena mayoritas masyarakat Indonesia berada di interval menengah ke bawah.

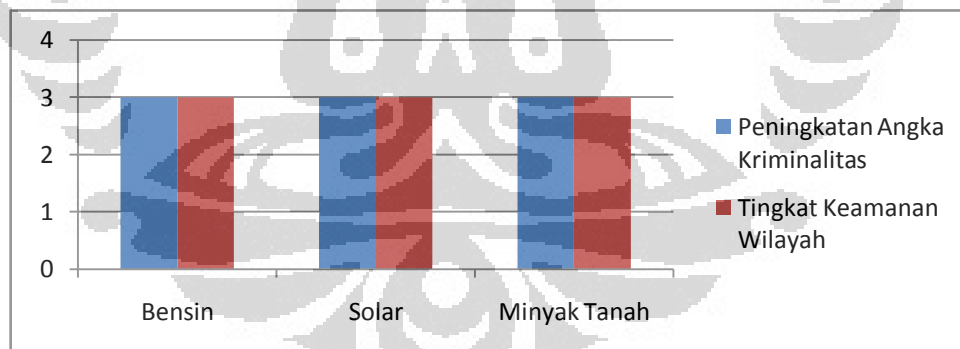
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.178.

Tabel 3.178. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	3	1	3	4
2	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4

Gambar 3.178. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,75, solar 2,25, dan minyak tanah 3,75. Rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,92. Nilai 2,92 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu

diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pengaruh keamanan wilayah dan kriminalitas lebih condong disebabkan minyak tanah karena minyak tanah banyak digunakan dalam masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.179.

Tabel 3.179. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	4	3	4	2	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	2	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	4	2	4	3	4	2
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	3	1	2
	Tingkat keamanan wilayah	4	1	4	3	4	1

Berdasarkan tabel 3.179 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,83, solar 2,83, dan minyak tanah 3,21. Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,93. Nilai 2,96 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dalam mengisi kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.180

Tabel 3.180. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Operasi pasar
2	Peningkatan angka kriminalitas	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah prioritas pertama adalah sosialisasi pengurangan subsidi BBM ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, prioritas kedua adalah mencegah terjadinya penyelewengan pada saat distribusi bensin, solar, dan minyak tanah. Prioritas ketiga untuk bensin dan solar adalah membatalkan pengurangan volume bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan prioritas ketiga pada minyak tanah adalah melakukan operasi pasar dengan menjual minyak tanah murah/bersubsidi.

6.3.12.3. Politik

Hasil kuesioner dampak politik diperoleh dari responden yang berasal dari Kesbanglinmas dan Legislatif. Kedua responden perlu diambil agar survei dapat memberikan hasil yang obyektif dan proporsional sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam menentukan kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.181. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		linmas	Legislatif	linmas	Legislatif	linmas	Legislatif
1	Gejolak Politik	4	5	3	5	5	5

Berdasarkan tabel 3.181 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.5, solar 4.0, dan minyak tanah 5.0. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 4.5. Nilai 4.5 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejolak politik akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

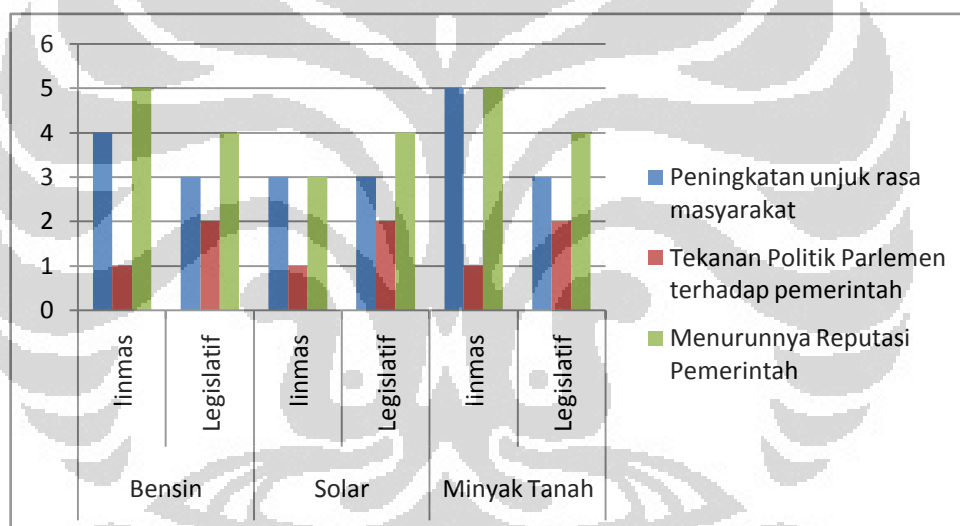
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.182.

Tabel 3.182. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		linmas	Legislatif	linmas	Legislatif	linmas	Legislatif
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	4	3	3	3	5	3
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1	2	1	2	1	2
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	5	4	3	4	5	4

Gambar 3.182. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.182 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.16, solar 2.66, dan minyak tanah 3.33.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 305. Nilai 3.05 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.183.

Tabel 3.183. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		linmas	Legislatif	linmas	Legislatif	linmas	Legislatif
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	5	3	4	3	5	3
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	5	2	4	2	5	2
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	1	4	4	4	1	4
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	5	3	3	3	5	3
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	2	3	2	3	2
	Menurunnya Reputasi	1	4	3	4	1	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		linmas	Legislatif	linmas	Legislatif	linmas	Legislatif
	Pemerintah						
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	5	3	3	3	5	3
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	5	2	3	2	5	2
	Menurunnya Reputasi Pemerintah	5	4	3	4	5	4

Berdasarkan tabel 3.183 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.44, solar 3.16, dan minyak tanah 3.44.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 3.34. Nilai 3.34 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.184. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

1	Unjuk rasa masyarakat	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Konversi ke gas
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan
3	Menurunnya Reputasi Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas,

mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

6.3.12.4. Sosial

Hasil kuesioner dampak sosial diperoleh dari responden yang berasal dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Akademisi. Kedua responden perlu diambil agar survei dapat memberikan hasil yang obyektif dan proporsional sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam menentukan kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.185.

Tabel 3.185. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinkessos	Akademisi	Dinkessos	Akademisi	Dinkessos	Akademisi
1	Keresahan Masyarakat	4	5	3	5	5	5
2	Penolakan Masyarakat	4	5	3	5	5	5

Berdasarkan tabel 3.185. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.5, solar 4.0, dan minyak tanah 5.0. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 4.5. Nilai 4.5 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akan hilang atau berkurang apabila penanganan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi disertai dengan langkah-langkah yang dapat meringankan beban hidup mereka seperti pemberian kompensasi bantuan sosial berupa BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM.

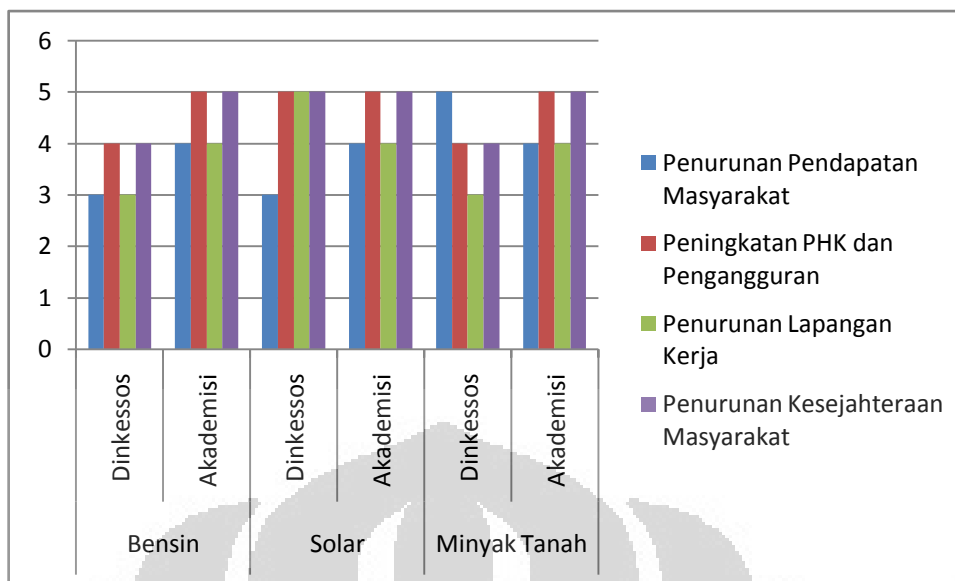
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.187.1.

Tabel 3.187.1. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinkesso s	Akademi si	Dinkesso s	Akademi si	Dinkesso s	Akademi si
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	3	4	3	4	5	4
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	5	5	5	4	5
3	Penurunan Lapangan Kerja	3	4	5	4	3	4
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	5	5	4	5

Gambar 3.187.1. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.187.1 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.0, solar 4.5, dan minyak tanah 4.25. Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 4.25. Nilai 4.25 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Apabila penanganan distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi tidak disertai dengan pemberian kompensasi bantuan sosial, maka yang akan lebih merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke bawah

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.187.

Tabel 3.187. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinkesso	Akademi	Dinkesso	Akademi	Dinkesso	Akademi
		s	si	s	si	s	si

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinkesso s	Akademi si	Dinkesso s	Akademi si	Dinkesso s	Akademi si
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	3	5	3	5	5	5
	Penolakan Masyarakat	3	5	3	5	5	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	5	5	5	5	5
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	5	4	5	5	5
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	5	4	5	3	5
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	4	5	3	5
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	5	3	5	5	5
	Penolakan Masyarakat	4	5	3	5	5	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	5	5	4	5	4	5
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	5	4	4	4	4	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Dinkesso	Akademi	Dinkesso	Akademi	Dinkesso	Akademi
		s	si	s	si	s	si
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	4	4	4	4	4
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	4	4	4	4	4
Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	5	4	5	5	5
	Penolakan Masyarakat	5	5	4	5	5	5
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	4	4	4	4	4
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	4	5	4	4	4
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	4	5	4	4	4
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	4	5	4	4	4

Berdasarkan tabel 3.187 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.33, solar 4.30, dan minyak tanah 4.47.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 4.33. Nilai 4.36 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan

penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.188

Tabel 3.188. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	26. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 27. Hemat BBM 28. Mencari BBM alternatif	22. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 23. Hemat BBM 24. Mencari BBM alternatif	22. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 23. Hemat BBM 24. Konversi ke gas
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) Memberi BLT Tingkatkan pelayanan	Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) Memberi BLT Tingkatkan pelayanan	24. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 25. Memberi BLT 26. Tingkatkan pelayanan
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	25. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa,	22. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	25. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa,

		Kesehatan, Pinjaman lunak) 26. Memberi BLT 27. Tingkatkan pelayanan	23. Memberi BLT 24. Tingkatkan pelayanan	Kesehatan, Pinjaman lunak) 26. Memberi BLT 27. Tingkatkan pelayanan
4	Pengurangan Lapangan Kerja	30. Batalkan 31. Hemat BBM 32. Mencari BBM alternatif	Batalkan Hemat BBM Mencari BBM alternatif	Batalkan Hemat BBM Konversi ke gas
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	33. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 34. Memberi BLT 35. Terapkan sistem kartu kendali	e. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) f. Memberi BLT g. Terapkan sistem kartu kendali	h. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) i. Memberi BLT j. Terapkan sistem kartu kendali

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.13 Provinsi Banten

3.1.13.1 Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi

Banten, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Banten. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi Banten, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Bandung. Kota Serang digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi Banten, Serang merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi Banten.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.189.1.

Tabel 3.189.1. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya transportasi	4	4	
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	3	3
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	3	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	4	2
5	Pengurangan	3	4	2

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	jumlah karyawan di industri			

Berdasarkan tabel 3.189.1. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,6, solar 3,6, dan minyak tanah 2,25. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 3,15. Nilai 3,15 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner probabilitas terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

b. Dampak

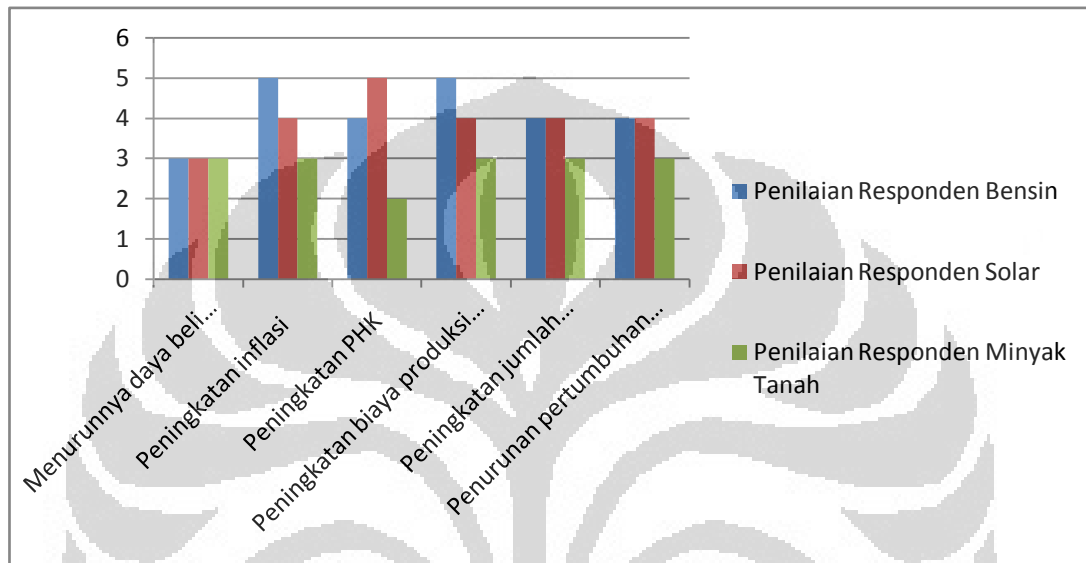
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.189.

Tabel 3.189. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	3	3	3
2	Peningkatan inflasi	5	4	3
3	Peningkatan PHK	4	5	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	5	4	3
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	4	4	3
6	Penurunan	4	4	3

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pertumbuhan ekonomi			

Gambar 3.189. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 3.189. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,17, solar 4, dan minyak tanah 2,83. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,67. Nilai 3,67 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner dampak terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

c. Sumber Risiko

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.190.

Tabel 3.190. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber	Variabel	Penilaian Responden
--------	----------	---------------------

Risiko		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	2
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	4	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	4	5	3
	Peningkatan PHK	3	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	5	4	3
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	4	3
	Peningkatan pengeluaran	4	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	masyarakat			
	Peningkatan biaya produksi di industri	4	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	4	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	4	4	3
	Peningkatan inflasi	4	4	3
	Peningkatan PHK	4	4	3
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3
Penyelewengan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	3	3	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	3	3	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	3	3	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	3	3
	Pengurangan jumlah karyawan	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	di industri			
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	3	3	3
	Peningkatan PHK	3	3	3
	Peningkatan kemiskinan	3	3	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	3	3	3

Berdasarkan tabel 3.190. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,57, solar 3,67, dan minyak tanah 2,97. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 3,4. Nilai 3,4 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.191

Tabel 3.191. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	15. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Mempermudah pencairan anggaran	37. Menumbuhkan iklim usaha 38. Mempermudah

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		16. Menumbuhkan iklim usaha 17. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	pemerintah Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	pencairan anggaran pemerintah 39. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
2	Peningkatan inflasi	40. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 41. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 42. Menumbuhkan iklim usaha	19. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 20. Menumbuhkan iklim usaha 21. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	4. Menumbuhkan iklim usaha 5. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 6. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
3	Peningkatan PHK	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	7. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 8. Menumbuhkan iklim usaha 9. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	10. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 11. Menumbuhkan iklim usaha 12. Mempermudah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Menangani	Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		h pencairan anggaran pemerintah	distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi	pencairan anggaran pemerintah
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha	13. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 14. Menumbuhkan iklim usaha 15. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya pada penurunan daya beli masyarakat. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin prioritas pertama adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah. Tindakan mitigasi untuk solar prioritas pertama adalah

mempermudah pencairan anggaran pemerintah, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Sedangkan untuk minyak tanah prioritas pertama adalah menumbuhkan iklim usaha, prioritas kedua adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi

15.1 Probabilitas Sebelum Mitigasi

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 67%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 67%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 70%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 68%.

15.2 Dampak Sebelum Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 87%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 87%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 90%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 88%.

15.3 Probabilitas Sesudah Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 47%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 47%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 44%.

15.4 Dampak Sesudah Mitigasi

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 47%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 47%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 44%.

6.3.13.2. Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif

sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan untuk menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.192.

Tabel 3.192. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Keresahan masyarakat	3	5	2	4	3	4

Berdasarkan tabel 3.192 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 3, dan minyak tanah 3,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Ketergantungan masyarakat terhadap bensin dan minyak tanah lebih besar dibandingkan dengan solar karena mayoritas masyarakat Indonesia berada di interval menengah ke bawah.

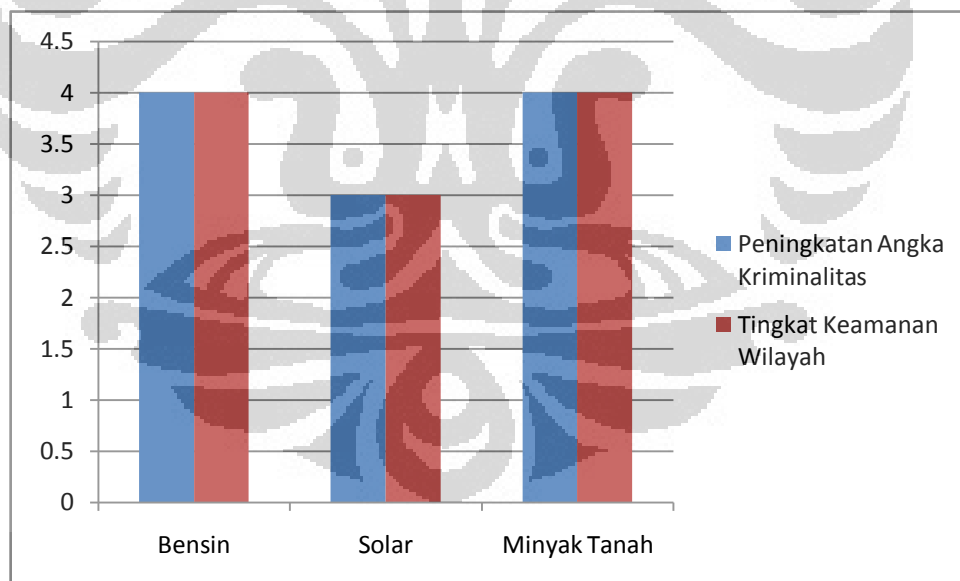
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.108.

Tabel 3.193. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	3	1	3	4
2	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4

Gambar 3.193. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,75, solar 2,25, dan minyak tanah 3,75. Rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,92. Nilai 2,92 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan

tingkat keamanan wilayah akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pengaruh keamanan wilayah dan kriminalitas lebih condong disebabkan minyak tanah karena minyak tanah banyak digunakan dalam masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.194.

Tabel 3.194. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	4	3	4	2	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	2	1	4
	Tingkat	4	2	4	1	4	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
	keamanan wilayah						
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	4	2	4	3	4	2
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	3	1	2
	Tingkat keamanan wilayah	4	1	4	3	4	1

Berdasarkan tabel 3.194 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,83, solar 2,83, dan minyak tanah 3,21. Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,93. Nilai 2,96 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil

keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dalam mengisi kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.110

Tabel 3.110. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Operasi pasar
2	Peningkatan angka kriminalitas	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah prioritas pertama adalah sosialisasi pengurangan subsidi BBM ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, prioritas kedua adalah mencegah terjadinya penyelewengan pada saat distribusi bensin, solar, dan

minyak tanah. Prioritas ketiga untuk bensin dan solar adalah membatalkan pengurangan volume bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan prioritas ketiga pada minyak tanah adalah melakukan operasi pasar dengan menjual minyak tanah murah/bersubsidi.

6.3.13.3. Politik

Responden pada dampak politik adalah ahli dari pemerintah yang diwakili oleh Kabid PKS BAKESBANGPOLLINMAS dan dari independen yang diwakili oleh Dosen Universitas Tarumanegara. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.195.

Tabel 3.195. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI
1	Gejolak Politik	3	4	3	4	2	3

Berdasarkan tabel 3.195 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk

bensin 3.5, solar 3.5, dan minyak tanah 2.5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 2.63.

Nilai 2.66 berarti probabilitas terjadinya dampak politik berupa gejolak politik akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan menimbulkan gejolak politik karena kalangan elit politik akan menyuarakan aspirasi masyarakat jika pengurangan tersebut berdampak pada masyarakat

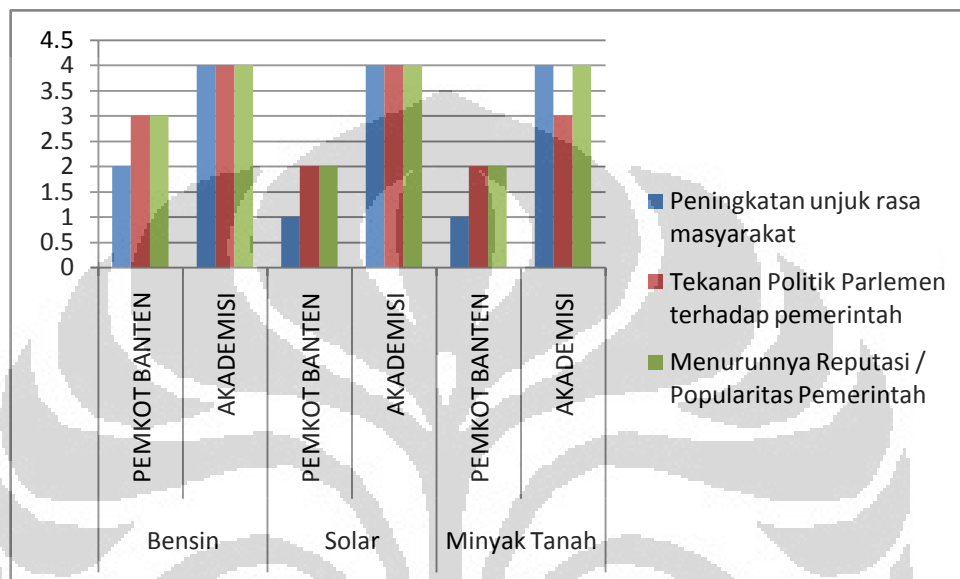
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.193.

Tabel 3.193. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	2	4	1	4	1	4
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	4	2	4	2	3
3	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	3	4	2	4	2	4

Gambar 3.193. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.196 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.33, solar 2.83, dan minyak tanah 2.63.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 2.94. Nilai 2.94 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.197.

Tabel 3.197. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	2	4	1	3	1	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	3	4	2	3	2	4
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	3	4	2	3	2	4
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	2	4	1	4	1	4
	Tekanan Politik Parlemen terhadap	3	4	2	3	1	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI
	pemerintah						
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	2	4	2	4	1	4
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	2	2	1	2	1	2
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	2	4	2	4	1	4
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	2	4	2	4	1	4

Berdasarkan tabel 3.197 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.05, solar 2.5, dan minyak tanah 2.5.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 2.68. Nilai 2.68 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah rendah.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.198

Tabel 3.198. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Konversi ke gas
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan
3	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

6.3.13.4. Sosial

Responden pada dampak sosial adalah ahli dari pemerintah yang diwakili oleh Kasi Bantuan dan Perlindungan Masyarakat dan dari independen yang diwakili oleh Dosen Universitas Taruma Negara. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.199.

Tabel 3.199. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO	AKADE	PEMKO	AKADE	PEMKO	AKADE
		T BANTE N	MISI	T BANTE N	MISI	T BANTE N	MISI
1	Keresahan Masyarakat	3	3	3	3	3	3
2	Penolakan Masyarakat	3	3	3	3	3	3

Berdasarkan tabel 3.199 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.0, solar 3.0, dan minyak tanah 3.0. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 3.0. Nilai 3.0 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Masyarakat akan menolak distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi karena melihat kondisi ekonomi Indonesia yang masih krisis dan belum membaik

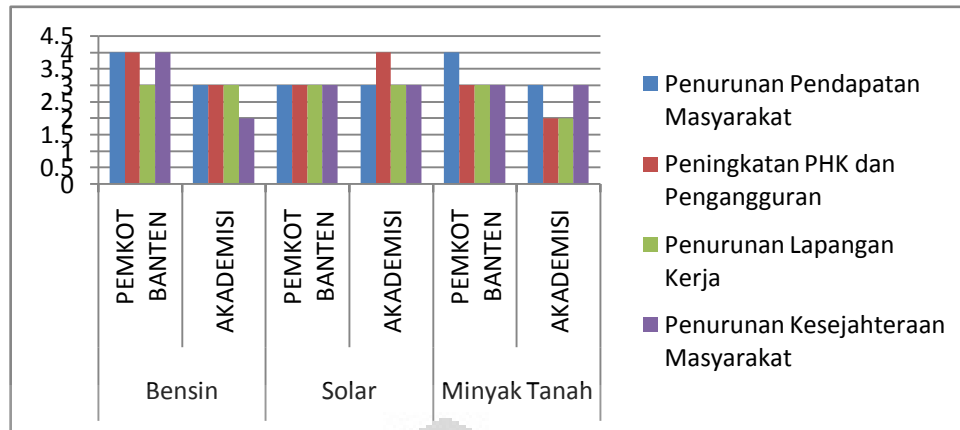
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.200.

Tabel 3.200. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	3	3	3	4	3
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	3	3	4	3	2
3	Penurunan Lapangan Kerja	3	3	3	3	3	2
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	2	3	3	3	3

Gambar 3.200. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.200 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.25, solar 3.12, dan minyak tanah 2.87. Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 3.08. Nilai 3.08 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.201.

Tabel 3.201. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	4	3	3	3	4	3
	Penolakan Masyarakat	5	4	3	4	4	3
	Penurunan	4	3	3	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI
	Pendapatan Masyarakat						
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	3	3	4	3	2
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	3	3	3	3	2
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	2	3	3	3	3
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	2	3	2	4	3
	Penolakan Masyarakat	4	3	3	2	4	3
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	2	3	3	3	3
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	2	3	3	3	2
	Pengurangan Lapangan	4	2	3	3	3	2

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI	PEMKO T BANTE N	AKADE MISI
	Kerja						
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	2	3	3	3	3
Penyelewengan Penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	4	3	4	4	4
	Penolakan Masyarakat	4	3	3	3	4	3
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	3	3	3	3	3
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	3	3	3	3	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	3	3	3	3	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	2	3	3	3	3

Berdasarkan tabel 3.201 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3.36, solar 3.02, dan minyak tanah 3.22.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 3.20. Nilai 3.20 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan

penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Propinsi Banten telah melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg sehingga minyak tanah bersubsidi secara bertahap dikurangi. Dengan demikian dampak sosial akan berkurang juga.
 - Jika terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, masyarakat kecil berpenghasilan rendah dan tidak tetap akan merasakan dampaknya karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi
- Jika terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, maka hendaknya penanganan segera dilakukan.
-

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.202.

Tabel 3.202. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	33. Penanganan 34. Hemat BBM 35. Mencari BBM alternatif	25. Penanganan 26. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 27. Mencari BBM alternatif	25. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 26. Hemat BBM 27. Konversi ke gas
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	7. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa,	10. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa,	27. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan,

		Kesehatan, Pinjaman lunak) 8. Memberi BLT 9. Tingkatkan pelayanan	Kesehatan, Pinjaman lunak) 11. Memberi BLT 12. Tingkatkan pelayanan	Pinjaman lunak) 28. Memberi BLT 29. Tingkatkan pelayanan
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	28. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 29. Memberi BLT 30. Tingkatkan pelayanan	25. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 26. Memberi BLT 27. Tingkatkan pelayanan	28. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 29. Memberi BLT 30. Tingkatkan pelayanan
4	Pengurangan Lapangan Kerja	36. Batalkan 37. Hemat BBM 38. Mencari BBM alternatif	13. Batalkan 14. Hemat BBM 15. Mencari BBM alternatif	16. Batalkan 17. Hemat BBM 18. Konversi ke gas
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	36. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 37. Memberi BLT 38. Terapkan sistem kartu kendali	e. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) f. Memberi BLT g. Terapkan sistem kartu kendali	h. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) i. Memberi BLT j. Terapkan sistem kartu kendali

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT /

beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

3.1.14 Provinsi DKI

3.1.14.1 Dampak Ekonomi

Responden pada dampak ekonomi adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independen sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh ahli ekonomi dari pemerintah Propinsi DKI, sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen ekonomi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di DKI. Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi ekonomi. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak ekonomi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi. Untuk Propinsi DKI, sampel yang digunakan dalam survei adalah kota Jakarta. Kota Jakarta digunakan sebagai sampel karena diantara kota-kota lain di Propinsi DKI, Jakarta merupakan salah satu kota yang paling banyak menggunakan BBM di Propinsi DKI.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.203.

Tabel 3.203. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Kenaikan biaya	4	4	

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	transportasi			
2	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	3	3
3	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	3	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	3	4	2
5	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	2

Berdasarkan tabel 3.203. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,6, solar 3,6, dan minyak tanah 2,25. Nilai rata-rata total probabilitas terhadap dampak ekonomi adalah 3,15. Nilai 3,15 berarti probabilitas terjadinya dampak ekonomi berupa kenaikan biaya transportasi, peningkatan harga kebutuhan pokok, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan biaya produksi industri, dan pengurangan jumlah karyawan di industri akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner probabilitas terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

b. Dampak

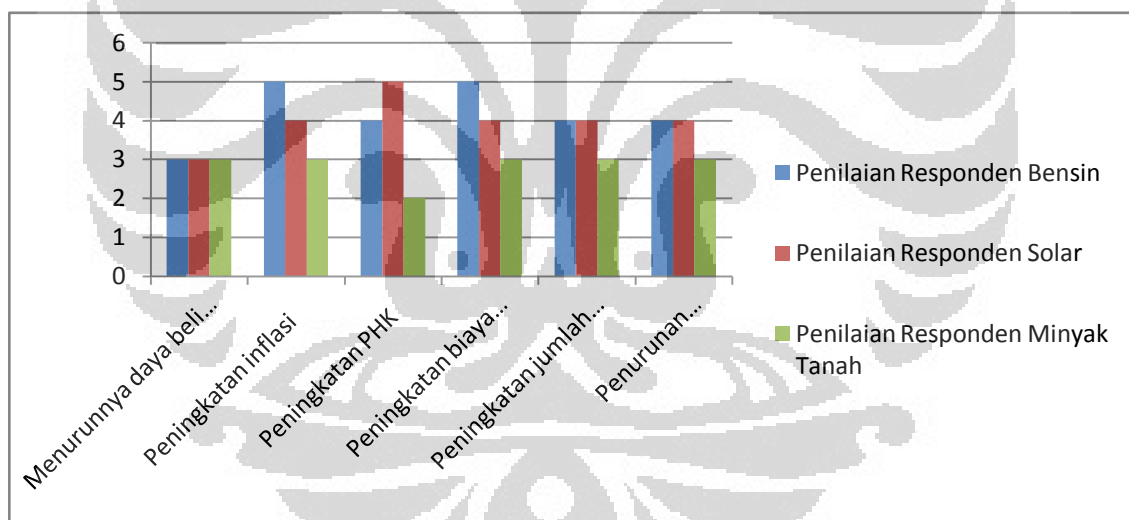
Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.204.

Tabel 3.204. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Menurunnya daya beli masyarakat	3	3	3

No	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
2	Peningkatan inflasi	5	4	3
3	Peningkatan PHK	4	5	2
4	Peningkatan biaya produksi industri	5	4	3
5	Peningkatan jumlah kemiskinan	4	4	3
6	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3

Gambar 3.204. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Ekonomi



Berdasarkan tabel 3.104. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4,17, solar 4, dan minyak tanah 2,83. Nilai rata-rata total dampak terhadap dampak ekonomi adalah 3,67. Nilai 3,67 berarti dampak terjadinya dampak ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat, peningkatan inflasi, peningkatan PHK, peningkatan biaya produksi industri, peningkatan jumlah kemiskinan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden dalam pengisian kuesioner dampak terhadap dampak ekonomi.

yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.205.

Tabel 3.205. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Ekonomi

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
Kelangkaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	2
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	4	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	4	5	3
	Peningkatan	3	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	PHK			
	Peningkatan kemiskinan	4	4	3
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	5	4	3
Pembatasan penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	4	4	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	4	4	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	4	4	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	4	4	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	4	4	3
	Penurunan daya beli masyarakat	4	4	3
	Peningkatan inflasi	4	4	3
	Peningkatan PHK	4	4	3
	Peningkatan	4	4	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	kemiskinan			
	Penurunan pertumbuhan ekonomi	4	4	3
Penyelewengan Penggunaan	Kenaikan biaya transportasi	3	3	3
	Peningkatan harga kebutuhan pokok	3	3	3
	Peningkatan pengeluaran masyarakat	3	3	3
	Peningkatan biaya produksi di industri	3	3	3
	Pengurangan jumlah karyawan di industri	3	3	3
	Penurunan daya beli masyarakat	3	3	3
	Peningkatan inflasi	3	3	3
	Peningkatan PHK	3	3	3
	Peningkatan kemiskinan	3	3	3
	Penurunan	3	3	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
	pertumbuhan ekonomi			

Berdasarkan tabel 3.205. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 3,57, solar 3,67, dan minyak tanah 2,97. Rata-rata total sumber risiko terhadap dampak ekonomi adalah 3,4. Nilai 3,4 berarti sumber risiko terjadinya dampak ekonomi berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden sumber risiko terhadap dampak ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

b. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.206

Tabel 3.203. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Ekonomi

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Penurunan daya beli masyarakat	18. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 19. Menumbuhkan iklim usaha 20. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	43. Menumbuhkan iklim usaha 44. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 45. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
2	Peningkatan inflasi	2. Mempermudah	22. Meningkatkan	4. Menumbuhkan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		h pencairan anggaran pemerintah 3. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 4. Menumbuhka n iklim usaha	pertumbuhan sektor riil 23. Menumbuhkan iklim usaha 24. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	iklim usaha 5. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah 6. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil
3	Peningkatan PHK	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	7. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 8. Menumbuhkan iklim usaha 9. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
4	Peningkatan jumlah kemiskinan	10. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil 11. Menumbuhka n iklim usaha 12. Mempermuda h pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Menangani distorsi pada rantai pasok BBM bersubsidi	Menumbuhkan iklim usaha Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
5	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	13. Meningkatkan pertumbuhan sektor riil

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
		pencairan anggaran pemerintah Meningkatkan pertumbuhan sektor riil	Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha	14. Menumbuhkan iklim usaha 15. Mempermudah pencairan anggaran pemerintah
6	Peningkatan jumlah perusahaan likuidasi	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Menumbuhkan iklim usaha Mempermudah pencairan anggaran pemerintah	Meningkatkan pertumbuhan sektor riil Mempermudah pencairan anggaran pemerintah Menumbuhkan iklim usaha

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak ekonomi terjadi. Misalnya pada penurunan daya beli masyarakat. Apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak ekonomi berupa penurunan daya beli masyarakat, tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin prioritas pertama adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah. Tindakan mitigasi untuk solar prioritas pertama adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, prioritas kedua adalah menumbuhkan iklim usaha, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Sedangkan untuk minyak tanah prioritas pertama adalah menumbuhkan iklim usaha, prioritas kedua adalah mempermudah pencairan anggaran pemerintah, dan prioritas ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan sektor riil.

Kompilasi dan Pengolahan Data Dampak Ekonomi

- **Probabilitas Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data probabilitas dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 60%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 60%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 60%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 60%.

- **Dampak Sebelum Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 67%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 67%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 70%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 68%.

- **Probabilitas Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 40%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk probabilitas sebelum mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

- **Dampak Sesudah Mitigasi**

Pengolahan data dampak dilakukan dengan mencari rata-rata untuk masing-masing BBM. Hasil pengolahan data untuk bensin adalah 40%. Hasil pengolahan data untuk solar adalah 40%. Sedangkan untuk minyak tanah adalah 40%. Rata-rata total untuk dampak sesudah mitigasi pada dampak ekonomi adalah 40%.

6.3.14.2. Dampak Pertahanan Keamanan

Responden pada dampak pertahanan keamanan adalah ahli yang mewakili pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak independent sebagai wakil masyarakat yang menerima kebijakan. Pihak pemerintah diwakili oleh kepolisian sedangkan pihak independen diwakili oleh dosen/LSM Pihak pemerintah dan independen perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi pertahanan keamanan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak pertahanan keamanan akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. *Probabilitas*

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.207.

Tabel 3.207. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Keresahan masyarakat	3	5	2	4	3	4

Berdasarkan tabel 3.207 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 4, solar 3, dan minyak tanah 3,5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 3,5. Nilai 3,5 berarti probabilitas terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Ketergantungan masyarakat terhadap bensin dan minyak tanah lebih besar dibandingkan dengan solar karena mayoritas masyarakat Indonesia berada di interval menengah ke bawah.

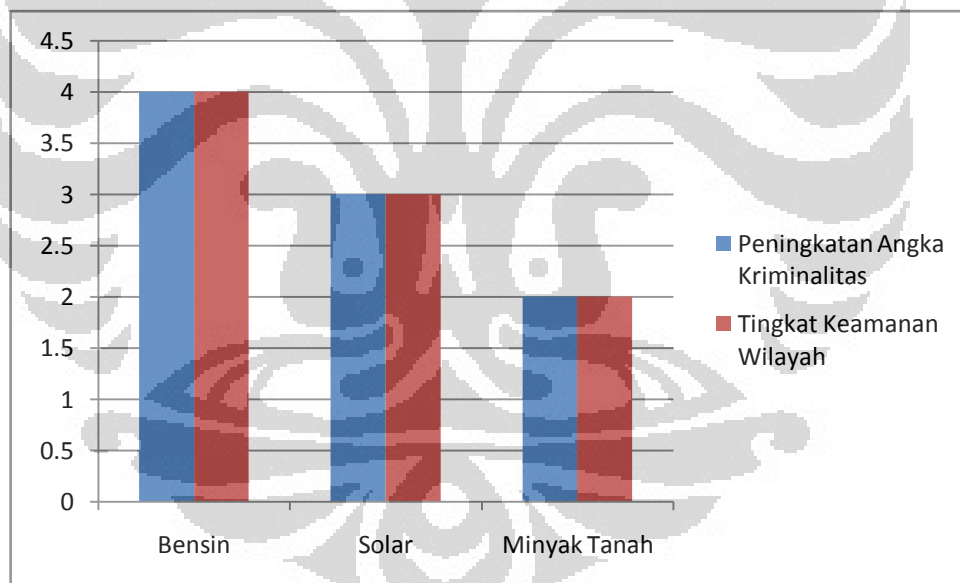
b. *Dampak*

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.208.

Tabel 3.208. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
1	Peningkatan angka kriminalitas	3	2	3	1	3	4
2	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	1	4	4

Gambar 3.208 Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Pertahanan Keamanan



Berdasarkan tabel 3.208 terlihat bahwa distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,75, solar 2,25, dan minyak tanah 3,75. Rata-rata total dampak terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,92. Nilai 2,92 berarti dampak terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa peningkatan angka kriminalitas dan tingkat keamanan wilayah akibat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh

pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Pengaruh keamanan wilayah dan kriminalitas lebih condong disebabkan minyak tanah karena minyak tanah banyak digunakan dalam masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhannya.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.209.

Tabel 3.209. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
Kenaikan harga	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kebutuhan masyarakat	Keresahan masyarakat	4	3	4	2	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	2	1	4
	Tingkat keamanan	4	2	4	1	4	4

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen	Pemerintah	Independen
	wilayah						
Peningkatan PHK	Keresahan masyarakat	4	3	4	3	4	4
	Peningkatan angka kriminalitas	1	4	1	4	1	4
	Tingkat keamanan wilayah	4	2	4	2	4	4
Peningkatan kemiskinan	Keresahan masyarakat	4	2	4	3	4	2
	Peningkatan angka kriminalitas	1	3	1	3	1	2
	Tingkat keamanan wilayah	4	1	4	3	4	1

Berdasarkan tabel 3.209. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan dengan nilai rata-rata untuk bensin 2,83, solar 2,83, dan minyak tanah 3,21. Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan adalah 2,93. Nilai 2,96 berarti sumber risiko terjadinya dampak pertahanan keamanan berupa kenaikan harga, peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan PHK, dan peningkatan kemiskinan akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sedang Tidak ada catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dalam mengisi kuesioner sumber risiko terhadap dampak pertahanan keamanan.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.210

Tabel 3.210. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Pertahanan Keamanan

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan masyarakat	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Batalkan	1. Sosialisasi 2. Cegah penyelewengan 3. Operasi pasar
2	Peningkatan angka kriminalitas	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM	1. Penegakan hukum 2. Cegah penyelewengan 3. Pastikan keamanan posko BBM
3	Penurunan tingkat keamanan wilayah	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum	1. Penyuluhan 2 Pencegahan hukum 3. Penegakan hukum

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak pertahanan keamanan terjadi. Misalnya, apabila pada saat distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi terjadi dampak pertahanan keamanan berupa keresahan masyarakat. Tindakan mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk bensin, solar, dan minyak tanah prioritas pertama adalah sosialisasi pengurangan subsidi BBM ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, prioritas kedua adalah mencegah terjadinya penyelewengan pada saat distribusi bensin, solar, dan minyak tanah. Prioritas ketiga untuk bensin dan solar adalah membatalkan

pengurangan volume bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan prioritas ketiga pada minyak tanah adalah melakukan operasi pasar dengan menjual minyak tanah murah/bersubsidi.

6.3.14.3. Politik

Responden pada dampak politik adalah ahli dari pemerintah yang diwakili oleh Kabid PKS BAKESBANGPOLLINMAS dan dari independen yang diwakili oleh Dosen Fak. Hukum, Universitas Brawijaya. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi politik. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak politik akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.211.

Tabel 3.211. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI
1	Gejolak Politik	5	5	5	5	4	3

Berdasarkan tabel 3.211. terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap gejolak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 5.0, solar 5.0, dan minyak tanah 3.5. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak politik adalah 4.5. Nilai 4.5 berarti probabilitas terjadinya dampak politik

berupa gejala politik akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan menimbulkan gejala politik karena kalangan elit politik akan menyuarakan aspirasi masyarakat jika pengurangan tersebut berdampak pada masyarakat

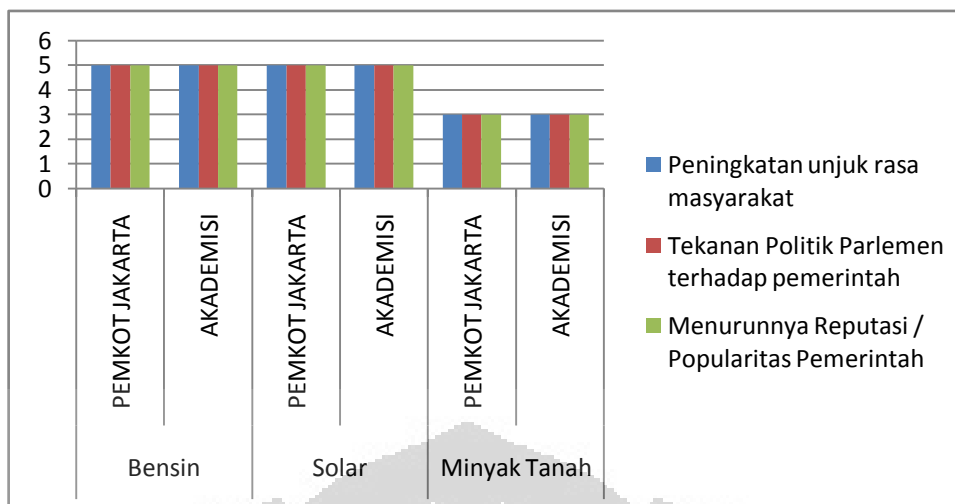
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.212.

Tabel 3.212. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI
1	Peningkatan unjuk rasa masyarakat	5	5	5	5	3	3
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	5	5	5	5	3	3
3	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	5	5	5	5	3	3

Gambar 3.212 Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak terhadap Dampak Politik



Berdasarkan tabel 3.212 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 5.0, solar 5.0, dan minyak tanah 3.0.

Rata-rata total dampak terhadap dampak politik adalah 4.33. Nilai 4.33 berarti dampak terjadinya dampak politik berupa peningkatan unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen, turunnya reputasi pemerintah akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, yaitu:

- Distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup
- Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang kebijakan yang akan diambil

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.213.

Tabel 3.213. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Politik

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah

		PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI
Kenaikan harga	Unjuk rasa masyarakat	5	5	5	5	2	3
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	5	5	5	5	2	3
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	5	5	5	5	2	3
Keresahan dan kekecewaan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	5	5	5	5	2	3
	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	5	5	5	5	2	3
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	5	5	5	5	2	3
Kemiskinan / Turunnya kesejahteraan masyarakat	Unjuk rasa masyarakat	5	5	5	5	2	3
	Tekanan Politik Parlemen	5	5	5	5	2	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI
	terhadap pemerintah						
	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	5	5		5	2	3

Berdasarkan tabel 3.7 terlihat bahwa distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak politik dengan nilai rata-rata untuk bensin 5.0, solar 5.0, dan minyak tanah 2.5.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak politik adalah 4.13. Nilai 4.16 berarti sumber risiko terjadinya dampak politik berupa Unjuk rasa masyarakat, tekanan politik parlemen terhadap pemerintah, dan menurunnya reputasi pemerintah akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.213

Tabel 3.213. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Politik

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Unjuk rasa masyarakat	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa,	1. Batalkan 2. Hemat BBM 3. Konversi ke gas

		(Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak)	kesehatan, pinjaman lunak)	
2	Tekanan Politik Parlemen terhadap pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan
3	Menurunnya Reputasi / Popularitas Pemerintah	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan	1. Beri kompensasi Bansos (Beasiswa, kesehatan, pinjaman lunak) 2. Beri BLT 3. Tingkatkan pelayanan

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM), menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.

6.3.14.4. Sosial

Responden pada dampak sosial adalah ahli dari pemerintah yang diwakili oleh Pemerintah Kota Jakarta dan dari independen yang diwakili oleh Dosen dari Universitas Paramadina. Kedua ahli tersebut perlu diambil sebagai responden dengan harapan supaya survei dapat memberikan hasil yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada BPH Migas dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi dengan melihat dampaknya pada sisi sosial.

Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui probabilitas, dampak, sumber risiko, dan mitigasi pada dampak sosial akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi.

a. Probabilitas

Hasil survei pengisian kuesioner probabilitas dari responden dapat dilihat pada tabel 3.214.

Tabel 3.214. Hasil Pengisian Kuesioner Probabilitas terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JAKARTA A	AKADE MISI	PEMKO T JAKARTA A	AKADE MISI	PEMKO T JAKARTA A	AKADE MISI
1	Keresahan Masyarakat	5	5	4	5	3	3
2	Penolakan Masyarakat	5	5	4	5	3	3

Berdasarkan tabel 3.214 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki probabilitas terhadap dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 5.0, solar 4.5, dan minyak tanah 3.0. Rata-rata total probabilitas terhadap dampak sosial adalah 4.13. Nilai 4.16 berarti probabilitas terjadinya dampak sosial berupa keresahan masyarakat dan penolakan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Masyarakat akan menolak terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi karena melihat kondisi ekonomi Indonesia yang masih krisis dan belum membaik

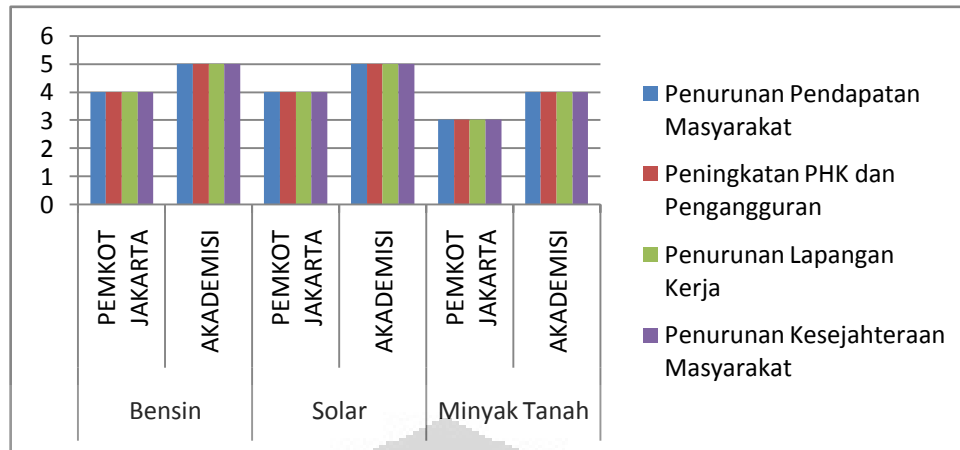
b. Dampak

Hasil survei pengisian kuesioner dampak dari responden dapat dilihat pada tabel 3.215.

Tabel 3.215. Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial

No	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI
1	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	5	4	5	3	4
2	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	5	4	5	3	4
3	Penurunan Lapangan Kerja	4	5	4	5	3	4
4	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	4	5	3	4

Gambar 3.215. Grafik Hasil Pengisian Kuesioner Dampak Sosial



Berdasarkan tabel 3.215 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki dampak sosial dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.5, solar 4.5, dan minyak tanah 3.5. Rata-rata total dampak terhadap dampak sosial adalah 4.13. Nilai 4.16 berarti dampak terjadinya dampak sosial berupa menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya PHK dan pengangguran, menurunnya lapangan kerja, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah sangat tinggi.

c. *Sumber Risiko*

Hasil survei pengisian kuesioner sumber risiko dari responden dapat dilihat pada tabel 3.213.

Tabel 3.213. Hasil Pengisian Kuesioner Sumber Risiko terhadap Dampak Sosial

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI
Kelangkaan	Keresahan Masyarakat	4	5	4	5	2	3
	Penolakan Masyarakat	5	5	4	5	2	3
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	5	3	5	2	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	5	3	5	2	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	3	5	3	5	2	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	3	5	2	3
Pembatasan penggunaan	Keresahan Masyarakat	4	5	4	5	2	3
	Penolakan Masyarakat	4	5	4	5	2	3
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	5	3	5	2	3
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	5	3	5	2	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	5	3	5	2	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	3	5	2	3
Penyelewengan	Keresahan Masyarakat	4	5	4	5	2	3

Sumber Risiko	Variabel	Penilaian Responden					
		Bensin		Solar		Minyak Tanah	
		PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI	PEMKO T JAKAR TA	AKADE MISI
Penggunaan	Penolakan Masyarakat	4	5	4	5	2	3
	Penurunan Pendapatan Masyarakat	4	5	3	5	2	3
	Peningkatan PHK dan Pengangguran	4	5	3	5	2	3
	Pengurangan Lapangan Kerja	4	5	3	5	2	3
	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	4	5	3	5	2	3

Berdasarkan tabel 3.216 terlihat bahwa terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi memiliki sumber risiko terhadap dampak ekonomi dengan nilai rata-rata untuk bensin 4.5, solar 4.16, dan minyak tanah 2.5.

Nilai rata-rata total sumber risiko terhadap dampak sosial adalah 3.72. Nilai 3.72 berarti sumber risiko terjadinya dampak sosial berupa kelangkaan, pembatasan penggunaan, dan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi akibat terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi adalah tinggi.

Namun, ada beberapa catatan yang diberikan oleh responden yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan dalam menghadapi terjadinya distorsi pada Rantai Pasok

BBM bersubsidi, yaitu:

- Jika terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, masyarakat kecil berpenghasilan rendah dan tidak tetap akan merasakan dampaknya karena adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi

- Jika tetap dilakukan terjadi distorsi pada Rantai Pasok BBM bersubsidi, maka hendaknya dilakukan secara bertahap dan tidak drastis serta tidak bersamaan dengan pengurangan subsidi untuk listrik atau gas.

d. Mitigasi

Hasil survei pengisian kuesioner mitigasi dari responden dapat dilihat pada tabel 3.17.

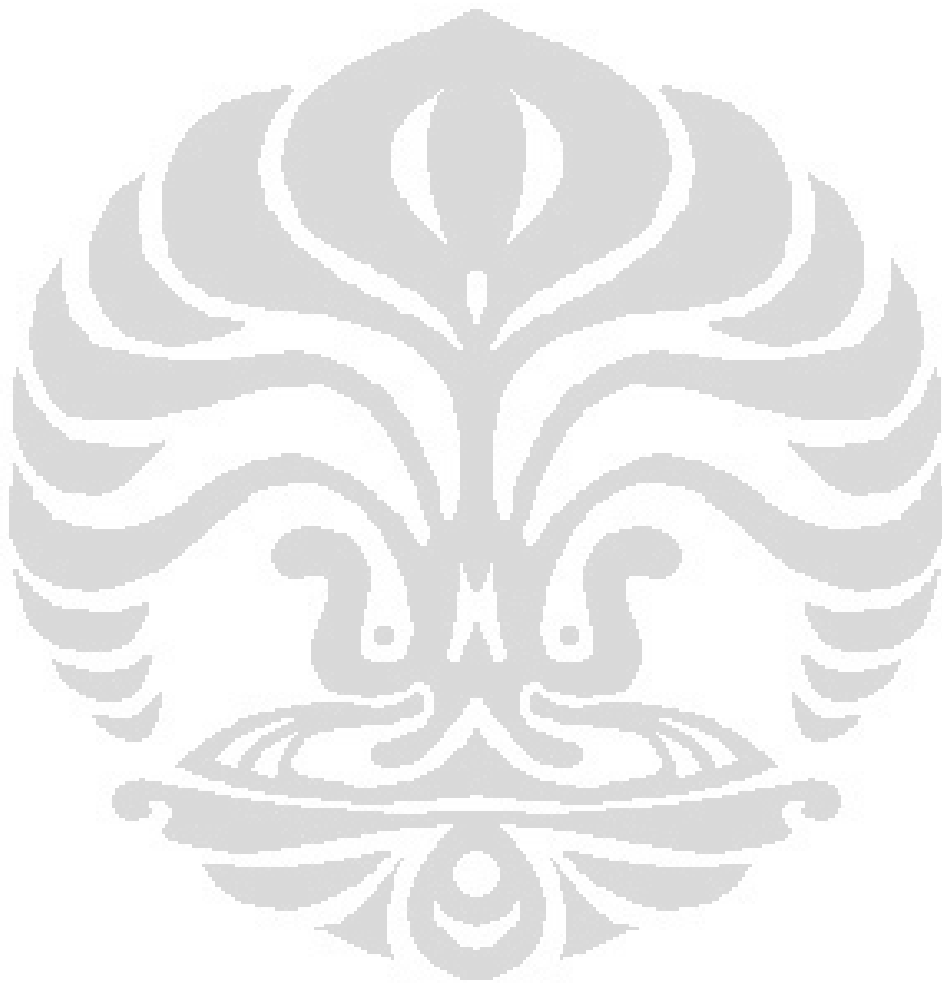
Tabel 3.217. Hasil Pengisian Kuesioner Mitigasi terhadap Dampak Sosial

No	Variabel	Tindakan Mitigasi		
		Bensin	Solar	Minyak Tanah
1	Keresahan Masyarakat	39. Penanganan 40. Hemat BBM 41. Mencari BBM alternatif	28. Penanganan 29. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 30. Mencari BBM alternatif	28. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 29. Hemat BBM 30. Konversi ke gas
2	Penurunan Pendapatan Masyarakat	16. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	19. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak)	30. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 31. Memberi BLT

		17. Memberi BLT 18. Tingkatkan pelayanan	20. Memberi BLT 21. Tingkatkan pelayanan	32. Tingkatkan pelayanan
3	Peningkatan PHK dan Pengangguran	31. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 32. Memberi BLT 33. Tingkatkan pelayanan	28. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 29. Memberi BLT 30. Tingkatkan pelayanan	31. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 32. Memberi BLT 33. Tingkatkan pelayanan
4	Pengurangan Lapangan Kerja	42. Penanganan 43. Hemat BBM 44. Mencari BBM alternatif	22. Penanganan 23. Hemat BBM 24. Mencari BBM alternatif	25. Penanganan 26. Hemat BBM 27. Konversi ke gas
5	Penurunan Kesejahteraan Masyarakat	39. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) 40. Memberi BLT 41. Terapkan sistem kartu kendali	e. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) f. Memberi BLT g. Terapkan sistem kartu kendali	h. Memberi kompensasi Bansos (Beasiswa, Kesehatan, Pinjaman lunak) i. Memberi BLT j. Terapkan sistem kartu kendali

Masing-masing variabel memiliki tindakan mitigasi yang perlu dilakukan apabila dampak sosial terjadi. Misalnya, memberikan kompensasi bantuan sosial (BLT / beasiswa pendidikan / bantuan kesehatan / bantuan pinjaman lunak untuk UKM),

menerapkan sistem kartu kendali (smart card), konversi dari minyak tanah ke gas, mencari energi baru / bahan bakar alternatif, melakukan penghematan BBM, dan meningkatkan kualitas pelayanan distribusi BBM.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini akan diambil kesimpulan untuk selanjutnya akan disampaikan beberapa saran.

5.1. Kesimpulan

1. Kemudahan membeli/memperoleh BBM bersubsidi relatif cukup tinggi, kecuali di provinsi Banten. Gambaran ini berlaku juga bagi pengguna BBM bersubsidi seperti sektor transportasi, nelayan dan Usaha Kecil. Faktor penentu perilaku konsumen tersebut lebih disebabkan oleh rantai pasok BBM bersubsidi yang masih terbilang lancar.

2. Jika terjadi Kelangkaan BBM bersubsidi untuk sektor Rumah Tangga cenderung mengganti dengan sumber energi lainnya, kecuali di provinsi Kepulauan Riau. Faktor penentu perilaku konsumen tersebut disebabkan adanya substitusi komoditi kerosene seperti kayu bakar, gas dan lain sebagainya.

Untuk sektor Usaha Kecil, pengganti kelangkaan BBM bersubsidi dengan sumber energi lainnya terjadi di provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat, kecuali untuk provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Timur cenderung untuk tidak melakukan kegiatan yang menggunakan BBM bersubsidi. Faktor penentu perilaku konsumen tersebut disebabkan adanya substitusi komoditi kerosene seperti kayu bakar, gas dan lain sebagainya.

Untuk sektor Nelayan pengganti kelangkaan BBM bersubsidi dengan menggunakan sumber energi lain sangat bervariasi. Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua Barat mengganti dengan sumber energi lain, sedang pada provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta sumber energinya mencari ke desa/kelurahan lain. Sementara Sumatera Selatan mencari sumber energi ke Kecamatan lain atau tidak melakukan kegiatan yang menggunakan BBM bersubsidi, dan untuk provinsi Riau Kepulauan, Banten dan Sulawesi Utara Nelayannya akan mencari ke

Desa/Kelurahan lain atau mencari ke Kecamatan lain jika terjadi kelangkaan BBM bersubsidi. Faktor penentu perilaku konsumen tersebut disebabkan adanya pasokan BBM bersubsidi yang tidak merata.

Untuk sektor Transportasi , bila terjadi kelangkaan BBM bersubsidi akan mencari ke Desa/Kelurahan lain pada hampir sebagian besar di wilayah provinsi terpilih kecuali provinsi Riau Kepulauan dan Sulawesi Utara jika terjadi kelangkaan BBM bersubsidi adalah dengan mencari ke desa/kelurahan lain atau mencari ke Kecamatan lain. Faktor penentu perilaku konsumen tersebut disebabkan adanya pasokan BBM bersubsidi yang tidak merata di tingkat desa maupun kecamatan.

3. Kecukupan BBM bersubsidi, pada sebagian besar provinsi untuk sektor Rumah Tangga bila kebutuhan BBM bersubsidinya tidak mencukupi umumnya mengganti dengan sumber energi lainnya, kecuali provinsi Riau Kepulauan, Banten, Sulawesi Utara dan Maluku. Faktor penentu perilaku konsumen tersebut disebabkan adanya substitusi Kerosene seperti kayu bakar, gas dan lain sebagainya.

Pada sektor Usaha Kecil jika kebutuhan BBM bersubsidinya tidak terpenuhi, maka pada sebagian besar provinsi cenderung untuk tidak melakukan kegiatan yang menggunakan BBM bersubsidi, kecuali provinsi DKI Jakarta, Riau Kepulauan, Maluku dan Papua Barat. Faktor penentu perilaku konsumen tersebut disebabkan adanya substitusi komoditi.

Untuk sektor pengguna Nelayan jika kebutuhan BBM bersubsidinya tidak terpenuhi pada sebagian besar provinsi cenderung untuk mengganti dengan sumber energi lainnya, provinsi tersebut adalah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua Barat. Sedangkan pada Sumatera Utara mensiasati kekurangan BBM bersubsidi dengan cara mengganti dengan sumber energi lain atau tidak melakukan kegiatan yang menggunakan BBM bersubsidi. Sementara untuk Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta cenderung untuk mencari ke desa/kelurahan lain. Di Sumatera Selatan cenderung mencari ke Kecamatan lain, sementara provinsi Riau Kepulauan dan Banten cenderung untuk mencari ke desa/kelurahan lain atau kecamatan lain. Faktor penentu perilaku konsumen tersebut disebabkan adanya substitusi komoditi kerosene.

Untuk sektor transportasi jika kebutuhan BBM bersubsidinya tidak tercukupi, maka akan mencari ke desa/kelurahan lainnya, ini terjadi pada provinsi Riau

Kepulauan, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat. Faktor penentu perilaku konsumen tersebut disebabkan adanya substitusi komoditi.

4. Bila Harga BBM bersubsidi sangat mahal, maka pada sektor Rumah tangga cenderung tetap membeli seperti di provinsi Sumatera Utara, Riau Kepulauan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat. Sedangkan untuk provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat mensiasatinya dengan cara tidak membeli namun tetap mengganti dengan bahan bakar alternatif. Provinsi lainnya seperti Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur tetap membeli dengan volume dikurangi.

Untuk sektor Usaha Kecil jika harga BBM Bersubsidi sangat mahal umumnya di provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Maluku tetap membeli. Sementara pada provinsi Riau Kepulauan tetap membeli dengan volume dikurangi.

Untuk sektor Nelayan jika harga BBM bersubsidi sangat mahal, maka umumnya kecuali di provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta akantetap membeli. Sedangkan untuk sektor Transportasi umumnya tetap membeli. Faktor penentu perilaku konsumen tersebut disebabkan adanya kekurangan pasokan.

5.2. Saran

1. Membangun integrasi antara pusat dan daerah berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan kerumahtanggaan nasional
2. Meningkatkan akuntabilitas unit kerja pada tingkat pusat/daerah

DAFTAR PUSTAKA

- AR, J. O. (2010). *Semi Kualitatif Analisis Risiko Pipa Penyalur Gas*. Depok: Universitas Indonesia.
- AS/NZS 4360. (2004). *Risk Management. AS/NZS 4360*. Strathfield: Standards Association of Australia.
- BPHMigas. (2010). *Konsumsi BBM Nasional*. Jakarta.
- Captain, K. (2011, Februari 25). *Kennebec Captain*. Diakses Mei 18, 2011, from Passage PLanning Errors - S/V Quests:
<http://kennebeccaptain.blogspot.com/2011/02/passage-planning-errors-sv-quest.html>.
- Chopra, S., & Meindl, P. (2006). *Supply Chain Management*. New York: Pearson Prentice Hall.
- Darmawi, H. (2000). *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Deleris, L. A., & Erhun, F. (2005). Risk Management in Supply Network Using Monte-Carlo Simulation. *Winter Simulation Conference*, (p. 2).
- Drucker, P. (1988). *Technology, Management, and Society: Essays by Peter Drucker*. New York.
- Elkington, P., & Smallman, C. (2002). Managing Project Risk: A Case Study from Utilities Sector. *International Journal of Project Management*, 53.
- Hoyos, I. e. (2008). Risk Analysis of Fuel and CO2 Prices Volatility in Electricity Generation Expansion Planning.
- ISO31000. (2009). *Risk Management - Principles and guidelines on*. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.
- Kerzner, H. (2003). *Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. New Jersey: John Willey & Sons.
- Krukanont, P., & Tezuka, T. (2007). Analysis of Carbon Taxation under Fuel Price Uncertainty in Japanese. *Asian Journal on Energy and Environment*.
- Nussbaum, M. e. (1997). A fuel distribution knowledge-based decision support system. *Omega*, 225-234.
- Oracle. (2011). *Oracle Crystall Ball*. Diakses April 20, 2011, from Oracle:
<http://www.oracle.com/us/products/applications/crystalball/index.html>

- Perry, & Hayes. (1999). Project Management: from conceptual until solving problem. *Engineering Education Australia* , 4.
- Pradana, R. J. (2008, Maret 13). *Teknik Optimasi*. Diakses Maret 13, 2011, from Multiply: http://aajaka.multiply.com/journal/item/6/TEKNIK_OPTIMASI_QAP.
- QAP. (2010). *ISO 31000 - Risk Management*. Diakses Mei 24, 2011, from Qualified Audit Partners: <http://www.qualified-audit-partners.be/index.php?cont=616&lgn=1>
- Regan, S. (2003). *Risk Management Implementation and Analysis*. Washington: U.S. Government Printing Office.
- Rovicky. (2008, Mei 23). *Distribusi di Negara Kepulauan*. Diakses April 20, 2011, from Dongeng Geologi: http://rovicky.multiply.com/journal?&page_start=20
- Siahaan, H. (2009). *Manajemen Risiko pada Perusahaan & Birokrasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Smith, S. (2005). *Applying Risk Management to the Supply Chain*. Los Angeles: Quality Plus Engineer.
- Stoneburner, A., & Feringa, A. (2001). *Risk Management Guide for Information Technology*. Washington: U.S. Government Printing Office.
- TNP2K. (2010). *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Diakses Mei 22, 2011, from TNP2K: <http://tnp2k.wapresri.go.id/data.html>
- Trihastuti, D. (2008). *Analisis Risiko Terhadap Rantai Suplai di PT X*. Depok: Universitas Indonesia.